



SEMINAR SEJARAH NASIONAL III

**SEKSI
SEJARAH
MUTAKHIR
(1)**

Direktorat
Budayaan

PARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DEKORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
K INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH
NASIONAL
1982



SEMINAR SEJARAH NASIONAL III

**SEKSI
SEJARAH
MUTAKHIR**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH
NASIONAL**

1982

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SAMBUTAN DAN PENGARAHAN MENTERI P DAN K	ii
KAPAN LAHIRNYA PANCASILA	1
PENGARUH PERSETUJUAN LINGGARJATI TERHADAP PERJUANGAN ALRI DIVISI IV PERTAHANAN KALIMANTAN	17
USAHA PETANI DALAM MEMPERTAHANKAN HIDUP KISAH PENDUDUKAN JEPANG DIMADIUN	42
WAJAH DUA MUKA SEBUAH KEKUATAN POLITIK	52
PENGARUH RASIONALISASI TERHADAP BADAN BADAN PERJUANGAN DAN TNI	67
CINA ISLAM DI INDONESIA	83
MINORITAS TIONGHOA DALAM SASRA INDONESIA	104
LAMPIRAN - LAMPIRAN	116

KATA PENGANTAR

Bertepatan dengan Hari Pahlawan tanggal 10 Nopember 1981, di Hotel Wisata Internasional, Jakarta, telah berlangsung Seminar Sejarah Nasional III, hingga tanggal 15 Nopember 1981, dengan tema "Melalui Penelitian dan Penulisan Sejarah Nasional dan Lokal kita bina Semangat Persatuan dan Kesatuan Bangsa."

Dalam hal ini penelitian dan penulisan Sejarah Nasional dan Sejarah Lokal hendaknya kita lihat pada konteks yang luas, yaitu dalam rangka pembinaan kebudayaan, termasuk pula semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, bahwa "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia". Itu mengandung arti, bahwa Pemerintah berkewajiban mewujudkan identitas nasional berlandaskan aneka ragam kebudayaan Indonesia; dan juga mewujudkan pedoman pola tingkah laku yang akan menyatukan bangsa yang terdiri dari banyak suku bangsa dengan latar belakang kebudayaan yang beraneka ragam itu.

Di sini perlu kita perhatikan adanya kenyataan, bahwa masyarakat bangsa Indonesia itu merupakan masyarakat yang majemuk dengan aneka ragam latar belakang sejarah dan kebudayaannya. Di samping itu, dengan pengembangan kebudayaan nasional itu diharapkan akan menjadi pegangan ataupun pedoman tingkah laku pergaulan sosial antar warga negara ke luar batas lingkungan suku atau daerah. Kemudian, masih perlu diperhitungkan, bahwa terdapat pula beberapa masalah sebagai akibat pembangunan yang pada hakekatnya merupakan proses perubahan di segala bidang.

Kesemuanya itu berlangsung dalam ruang lingkup dan waktu, yang perlu kita buat inventarisasi dan dokumentasinya sebagai dukungan data yang memadai. Data dan informasi kesejarahan itu pada khususnya diperlukan antara lain untuk menyusun kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional dalam rangka usaha pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian pula diperlukan untuk melihat berbagai kecenderungan yang terjadi dalam proses integrasi nasional secara menyeluruh. Dan yang lebih utama ialah agar masyarakat terbina kesadaran sejarahnya sebagai satu bangsa.

Di dalam Seminar Sejarah Nasional III itu dapat dipertemukan berbagai pihak yang menaruh minat dalam kesejarahan. Di dalam forum Seminar itulah dipersembahkan hasil penelitian para sejarawan, dan mereka memanfaatkannya untuk mempertajam konsep, menyempurnakan metode dan metodologi untuk mempertinggi kemampuan mengungkapkan kembali sejarah bangsa di tingkat nasional maupun daerah. Juga diharapkan untuk mencapai keseragaman bahasa dan penafsiran berbagai peristiwa sejarah bangsa, sehingga dapat menjernihkan berbagai masalah kesejarahan dan mempermudah penanaman kesadaran sejarah pada masyarakat.

Materi kesejarahan dalam Seminar Sejarah Nasional III itu meliputi keseluruhan sejarah nasional Indonesia, yang dibagi ke dalam enam panel, yaitu: prasejarah; sejarah kuno; sejarah pasca kuno meliputi masa sejarah masuk dan berkembangnya Islam; sejarah perlawanan terhadap kolonialisme, sejarah awal abad ke-XX dan pergerakan nasional; dan sejarah mutakhir.

Kesemua materi kesejarahan tersebut berasal dari berbagai penjurur tanah air yang merupakan pusat-pusat pemikiran kesejarahan (Jakarta, Bali, Banda Aceh, Bandung, DI Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Riau, Banjarmasin,

Palembang, Bima, Ujungpandang, Sulawesi Utara, Medan dan Samarinda). Demikian pula tulisan tersebut merupakan hasil penelitian ilmiah yang kritis, berskala nasional ataupun lokal; dan belum pernah dipublikasikan.

Pada akhirnya, dengan diterbitkannya bahan hasil Seminar Sejarah Nasional III ini diharapkan kesadaran sejarah pada masyarakat luas menjadi meningkat.

Jakarta, 21 Agustus 1982
Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional

**SAMBUTAN DAN PENGARAHAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

PADA PEMBUKAAN SEMINAR SEJARAH NASIONAL III

Hadirin sekalian yang saya hormati.

Saudara-saudara sebangsa, sebahasa dan setanah air

Kita berkumpul di sini hari ini untuk bersama-sama melalui seminar sejarah nasional yang ketiga kalinya. Pembahasan tentang sejarah merupakan suatu aktifitas intelektual yang tidak pernah basi walaupun andaikata tema pembahasan yang dipilih tetap sama. Secara naluri selalu ada kecenderungan pada diri manusia untuk mengetahui masa lalu dan berdasarkan pengetahuan tersebut berharap mendapat pelajaran guna menduga, bahkan membangun masa depan yang dikehendaki.

Pengamatan umum ini kiranya tercermin juga pada tema yang ditetapkan oleh seminar kali ini. Tema ini berupa "Melalui Penelitian dan Penulisan Sejarah Nasional dan Lokal Kita Bina Semangat Persatuan dan Kesatuan Bangsa". Dari bunyi tema ini segera dapat diketahui bahwa para peserta seminar tidak hanya menganggap bahwa penelitian merupakan aktifitas yang berguna, tetapi bahwa sejarah layak dijadikan objek penelitian karena ia mengandung suatu arti (sense). Arti yang dikandung oleh sejarah ini harus digali melalui penelitian untuk kemudian dimasyarakatkan melalui penulisan dan selanjutnya dijadikan modal bagi pembinaan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Baik seminar sebagai aktifitas intelektual maupun tema yang dipilih oleh seminar sejarah ini, sangat saya hargai. Melalui semua ini kita ingin menegaskan bahwa kita tidak ingin dikutuk oleh sejarah bahwa kita tidak belajar dari sejarah. Sebab memang acapkali justru dari sejarah kita belajar betapa kita tidak belajar dari sejarah. Namun harus diakui bahwa usaha untuk menarik pelajaran dari sejarah bukanlah pekerjaan yang sederhana. Usaha memperoleh angka yang tinggi dari studi sejarah, bahkan usaha meraih judicium yang membanggakan dari ujian mata pelajaran sejarah pasti jauh lebih mudah dari usaha memahami arti (sense) dari sejarah manusiawi. Betapa tidak. Dengan bermodalkan diktat orang lain atau "singkatan" dari bahan kuliah yang dibuat oleh teman, seorang mahasiswa dapat saja mendapat angka yang lumayan dari ujian yang ditempuhnya. Namun untuk menggali, apalagi dapat menemui arti dari sejarah, si pelajar sejarah dituntut untuk menghayati, sesedikitnya membiasakan diri dengan, falsafah. Falsafah dalam artian pengusutan tentang hakikat dari realitas, baik sebagai keseluruhannya ataupun mengenai salah satu atau beberapa aspek dari sekian banyak aspek yang dikandungnya. Mengingat arti esensial dari falsafah adalah pemikiran yang sistematis sedangkan bekerjanya pikiran manusia pada dasarnya sama, apapun obyek yang dijadikan bahan pemikiran itu, kiranya dapat dikatakan bahwa tidak ada satu falsafah tertentu yang secara khusus disediakan hanya bagi pemikiran sejarah.

Realitas berkaitan erat dengan fakta dan setiap ahli sejarah pasti akan menggunakan fakta tanpa ragu-ragu. Memang bagi ahli sejarah fakta-fakta mengenai masa lalu manusia merupakan perbendaharaan dari bahan pekerjaannya. Tetapi ada baiknya ahli sejarah bertanya pada diri sendiri apa-

kah yang disebut fakta yang dianggapnya sebagai realitas itu dan di mana ia dapat atau telah memperolehnya. Apakah yang dianggapnya sebagai fakta-realitas itu adalah obyek di luar dirinya, seperti batu atau kayu yang dapat ditemui atau dikutip di sepanjang jalan? Apakah fakta-realitas itu sebenarnya bukan hasil ciptaan pikirannya sendiri yang tidak ada bandingnya (counterpart) di luar dirinya?

Pertanyaan seperti ini perlu diajukan mengingat, menurut hemat saya, yang disebut sebagai fakta-realitas itu tidaklah seluruhnya subyektif dan tidak pula seluruhnya objektif, tetapi merupakan benda separuh-buatan, sesuatu "semi-manufactured article". Andaikata benda yang terdapat di luar dirinya itu memang tidak bersesuaian dengan apa yang ada di dalam benak pikiran manusia, si pemikir tidak akan dapat mengenalnya dan lalu mengambilnya sebagai fakta. Di pihak lain, si pemikir telah memilih sejumlah bahan faktual ini dari sekumpulan massa yang mungkin kurang disadarinya bahwa jumlahnya melimpah ruah tidak terbatas. Tetapi kalau dia tidak mengadakan pemilihan dan tidak mempelajari beberapa contoh yang telah dipilihnya itu, dia tidak akan memperoleh fakta yang dapat diolahnya secara mental.

Di dalam melaksanakan proses pengolahan intelektual inilah perlu adanya penghayatan cabang falsafah yang dikenal sebagai "epistemologi", yaitu teori pengetahuan. Sebab pertanyaan mengenai hakikat dari fakta pada gilirannya menimbulkan persoalan tentang hubungan antara hipotesa dengan generalisasi di satu pihak dan di lain pihak tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan hipotesa dan generalisasi tersebut. Hipotesa dan generalisasi tidak begitu saja timbul dalam pikiran. Kehadirannya dalam pikiran karena desakan, suggesti, dari pengamatan atas fakta, tetapi perlu disadari bahwa fakta yang cukup suggestif ini belum tentu, bahkan jauh dari, konklusif. Kalau hipotesa dan generalisasi ini perlu dikukuhkan, validitasnya perlu diuji melalui lebih banyak lagi fakta yang relevan yang dapat dikuasai oleh si pemikir. Tetapi berapa banyak yang dapat dikuasainya? Setiap saat perbendaharaan fakta yang telah dimiliki dapat saja diragukan oleh lain-lain fakta yang selama ini belum diketahui atau belum dipertimbangkan dan berkat kehadiran fakta-fakta baru ini mungkin saja koleksi fakta yang suggestif tersebut runtuh berantakan. Memang pikiran manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mutlak memperoleh pengetahuan tertentu. Gambaran yang dibuatnya mengenai sesuatu gejala dalam batas cakrawalanya sendiri merupakan tidak lebih dari suatu pendekatan terhadap kebenaran yang mutlak.

Hal ini tidak hanya berlaku terhadap pemikiran manusia tentang hal non-manusia, tetapi juga tentang studi mengenai hal-ikhwal manusiawi. Data yang dapat dikumpulkan oleh orang-orang yang mempelajari hal-hal yang lain dari manusia memang sulit untuk dapat dikatakan lengkap dan pemilihan data itu sendiri juga dapat dikatakan arbitrar dan kebetulan. Jadi sejarah mengenai seleksi dan kontruksi intelektual di bidang studi bukan-manusia, kita betul-betul tergantung pada faktor kebetulan. Namun sejauh mengenai studi tentang hal-ikhwal manusia, kita masih tergantung pada beberapa faktor tambahan lainnya, seperti prasangka, pilih-kasih, kecacauan yang disadari atau tidak disadari. Hal ini karena pelajar tentang hal-ikhwal yang bukan-manusia merupakan pengamat yang tidak terlibat pada hal yang dipelajarinya sedangkan orang yang mempelajari hal-ikhwal manusia merupakan sekaligus peserta dan peninjau. Di samping berada di pentas dia berada pula di auditorium. Dia melakukan peranan ganda dan ini pula yang mempersulit situasi kerja intelektualnya.

Pelajar hal-ikhwal manusia sulit untuk melepaskan diri karena ia terlibat, secara emosional dan moral, dalam setiap perbuatan makhluk manusia yang dapat diketahuinya. Mungkin saja ia tidak akan mengutuk seekor harimau yang membantai habis seorang manusia karena mengetahui bahwa binatang buas ini bertindak mengikuti naluri yang berjalanan erat dengan susunan psikosomatik hewani. Tetapi ia pasti mengutuk atau sesedikitnya mengulas sesuatu tindakan seorang manusia dan penilaian moralnya diiringi dengan perasaan yang bobotnya berubah sesuai dengan derajat kebaikan atau keburukan dari tindakan yang berada dalam pengamatannya itu.

Inilah sebabnya mengapa tadi saya katakan betapa perlunya seorang pelajar sejarah menghayati falsafah dan khususnya epistemologi atau teori pengetahuan. Adalah bijaksana apabila seorang pemikir tentang apapun mempelajari lebih dahulu bagaimana bekerjanya pikiran manusia. Apabila hal ini diabaikannya ia tidak akan menyadari keterbatasan dari keterbatasan dari kekuatan pemikiran manusia. Bahkan di samping kelemahan-kelemahan yang umum terdapat pada pemikiran manusia, pemikiran manusia tentang hal-ikhwal manusia mempunyai keterbatasan okkupasionalnya sendiri. Orang yang mempelajari hal-ikhwal manusia harus menyadari akibat dari kedudukannya sebagai peserta yang sekaligus peninjau. Keadaan seperti ini intrinsik dengan obyek studinya, yaitu sesama makhluk manusia seperti dirinya sendiri juga, dan apabila hal ini kurang disadarinya ada resiko ia akan membuat kekeliruan yang mudah sekali dihindarkan oleh orang yang mempelajari hal-ikhwal yang tidak mengenai makhluk manusia.

Para peserta seminar yang terpelajar.

Falsafah, atau sedikitnya epistemologi, juga diperlukan di dalam meng gali atau berusaha menemui arti dari sejarah. Hal ini mengingat adanya ambiguitas dalam perkataan "arti", yaitu arah atau pengertian.

Secara poeitis orang seringkali mengatakan tentang "arus" atau "gelombang" sejarah dan sebagai arus atau gelombang, sejarah membawa, menghanyutkan atau mengantarkan seseorang kesatu realitas dan meninggalkan atau membiarkan yang lain dalam kebingungan. Bila "arti" dari sejarah ini ditafsirkan sebagai "arus" atau "gelombang", kiranya ia ditanggapi sebagai "arah". Artinya, kita seperti melihat di dalam rangkaian momen yang berkesinambungan itu adanya satu arah yang berkelanjutan, yang ditentukan satu dan lainnya oleh kejadian kausal. Tetapi arah, orientasi atau arus ini tidak hanya sekadar diterima sebagaimana adanya. Orang cenderung pula untuk menilainya, bahkan dijadikan sumber dan ukuran dari setiap nilai. Bila demikian pada waktu yang bersamaan "arti" dari sejarah ini diberikan satu tafsiran yang lain, yaitu pengertian, makna atau dasar pengakuan (*raison d'être*). Dengan perkataan lain mempunyai "arti" sekaligus ditanggapi sebagai lawan dari "tanpa arti", lawan dari "non-sens". Jadi "tujuan" secara implisit dimasukkan dalam pengertian "arti" ini.

Soalnya lalu, apakah cukup bahwa sejarah mengandung suatu orientasi atau arah untuk dapat dinyatakan mempunyai arti? Sebaliknya, apakah satu sejarah tanpa arah tidak mungkin dinyatakan mempunyai arti?

Menjawab pertanyaan seperti ini menjadi mudah selama kita menggunakan suatu waktu yang berdimensi tunggal, yang disimbolkan melalui satu garis lurus. Di sini sejarah berjalan sepanjang satu garis lurus yang mengarah dari masa lalu ke masa depan. kesesuaiannya, walaupun ada, membuktikan adanya kesinambungan dari momen yang beruntun saling menyusul, satu arah

yang jelas terbaca dari keseluruhan kejadian. Arah yang berkelanjutan ini, walaupun tidak dengan sendirinya dapat ditafsirkan sebagai suatu "arti" yang berupa dasar pengakuan, sesedikitnya dapat ditanggapi sebagai suatu kondisi.

Agar supaya kesinambungan tersebut pada waktu yang bersamaan dapat ditafsirkan sebagai "pengertian", kita terpaksa untuk memasukkan "tujuan", yang juga bersifat linear. Artinya, momen yang berkesinambungan dari sejarah tidak hanya merupakan satu rangkaian yang berkesesuaian, satu arah yang berkelanjutan, tetapi juga satu penyelesaian. Dengan perkataan lain, pada "arah" atau "orientasi" ini perlu dibubuhi satu tujuan, yang juga terletak pada garis lurus yang sama, dan yang dalam dirinya merupakan "raison d'etre" dan sumber nilai bagi keseluruhan proses sejarah yang bersangkutan.

Bila demikian, bila pengetahuan kesejarahan telah mencapai tingkat perkembangan yang seperti ini, studi mengenai morfologi sejarah menjadi sama pentingnya dengan studi mengenai momen dan kejadian yang kita awasi kaitan yang satu dengan lainnya. Morphologi dari sejarah menjadi semakin penting dengan semakin meluasnya cakrawala pandangan ahli sejarah.

Usaha untuk membuat suatu rekonstruksi dari jalannya kejadian-kejadian masa lalu pada mulanya dibatasi pada penuturan atau cerita dari satu periode tertentu. Memang semua rekonstruksi kesejarahan terpaksa dilakukan dalam bentuk penuturan karena semua hal ikhwal manusia terus terjadi dalam dimensi waktu. Apabila kita berusaha menyetop jalannya kejadian-kejadian untuk sekedar memisahkannya agar tidak bertumpang tindih sebagai benang kusut, kita sebenarnya sudah mengganggu, walaupun tidak merusak, realitas sejarah. Sejarah dapat dilukiskan sebagai suatu arus kejadian-kejadian yang secara metaphoric dapat disamakan dengan suatu arus dari aliran air dan sebagai hal ini, ia mempunyai bentuk yang dapat dilihat dan dianalisa.

Apakah sejarah merupakan suatu gerakan yang kacau balau di mana arusnya tidak mempunyai suatu arah tertentu, atau, apakah arusnya ini jelas mempunyai satu orientasi, sama halnya dengan arus sebuah sungai? Apabila arus sesuatu sungai dapat disamakan dengan arus sesuatu sejarah, apakah sejarah berjalan (mengalir) dengan kecepatan yang sama, atau apakah kecepatan ini berubah-ubah menurut liku dan relung yang dilewatinya, atau apakah sejarah mempunyai kecenderungan umum untuk semakin lama semakin cepat jalannya atau secara bergantian semakin menurun? Dengan cara yang sama kita juga dapat bertanya apakah ia selalu bergerak dalam satu jalur atau selalu bergerak dalam berbagai cabang jalur yang paralel atau kadangkala bersatu atau kadangkala berpisah. Selanjutnya kita dapat pula bertanya apakah bentuk dari alur sungai yang sama tetap sama di titik manapun ia berada, atau berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang dilampauinya, begitu rupa sehingga memudahkan atau mempersulit kita untuk membuat persamaan atau perbedaan di antara bentuk-bentuk tersebut. Cara mempelajari sejarah seperti inilah yang tadi saya sebutkan sebagai "morfologi" dari sejarah, yang agak berbeda dari epistemologi, tetapi biar bagaimanapun, dalam mempelajarinya, tetap diperlukan pemikiran yang sistematis, jadi artinya, tetap memperlakukan penghayatan falsafah. Lebih-lebih bila studi morfologi sejarah ini dilakukan demi menggali "arti" yang dikandungnya itu.

Hadirin sekalian yang saya hormati.

Biar bagaimanapun kita yang hidup dewasa ini sangat jauh lebih beruntung dari nenek moyang kita dahulu. Apakah manusia pertama di bumi pertiwi ini diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuknya yang sempurna seperti makhluk manusia dewasa ini atau tumbuh secara evolutif seperti yang kita lihat dari fosil di lapisan-lapisan lumpur sepanjang tebing dan beting Bengawan Solo, dari manapun mereka berasal an datang, dapat kita bayangkan betapa sulit dan beratnya hidup mereka itu. Walaupun secara berangsur-angsur mereka mampu membangun perlindungan dan meramban makanan, mereka tidak mempunyai keluarga yang dapat memberikan tun-tutan ataupun yang dapat dipakai sebagai contoh. Namun yang paling terasa tidak mereka punyai adalah suatu masa lalu. Mereka tidak mempunyai buku sejarah yang dapat menceritakan bagaimana manusia hidup sebelumnya. Mereka tidak mempunyai musik atau cabang kesenian lainnya, tidak mempunyai falsafah, tidak mempunyai konsep yang seragam tentang itu.

Kita dewasa ini lebih berbahagia dari mereka karena kita kini mempunyai satu masa lalu, mempunyai satu sejarah. Bagi kita sejarah ini merupakan satu warisan nasional. Sekarang kita berkumpul untuk menyimak, menggali "arti" dari warisan kita ini. Dan arti ini, kalau saya tidak keliru menangkapnya, adalah semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Bukankah tema seminar kita ini adalah, saya ulangi, melalui penelitian dan penulisan sejarah nasional dan lokal kita bina semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Bahwa seminar sejarah ini dengan tema seperti ini dimulai pada tanggal 10 Nopember, sungguh merupakan satu kesengajaan yang membanggakan. Tanggal 10 Nopember, yang dengan setia kita peringati setiap tahun, adalah hari pahlawan, hari yang dihiasi dengan semangat patriotik. Sedangkan

Tadi saya katakan bahwa bagi kita sejarah bangsa yang cukup tua ini merupakan satu warisan nasional. Dan satu warisan dalam dirinya merupakan satu hak-kelahiran. A heritage is in itself a birthright. Pada saat dan suasana di mana intrenasionalisme merupakan satu mode, di mana patriotisme dianggap sebagai satu nilai yang kolot, melalui seminar sejarah ini kita tunjukkan bahwa sejarah nasional dan lokal merupakan dasar dari patriotisme yang tidak kunjung padam. Maka itu marilah dengan penuh ketekunan dan melalui keteraturan berpikir, dari sejarah kita, dari warisan nasional ini, kita gali arti yang berguna bagi usaha pembinaan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan harapan seperti ini, dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada Hari Pahlawan ini, Selasa — tanggal 10 Nopember 1981, Seminar Sejarah Nasional ke-III, dengan resmi saya nyatakan dibuka.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Dr. Daoed Joesoef

KAPAN LAHIRNYA PANCASILA

H. AM. EFFENDY SH.

Menjelang HUT Proklamasi 17 Agustus 1981 ini, melalui berbagai mass media banyak orang mempermasalahakan saat lahirnya Pancasila, dan timbul lagi pro dan kontra terhadap peringatan lahirnya Pancasila setiap tanggal 1 Juni, yakni saat Bung Karno pada tahun 1945 mengusulkan Pancasila sebagai Dasar negara.

Bagaimana sebenarnya lahirnya Pancasila itu, siapa yang menggalinya, siapa yang menciptakannya, kapan Pancasila ini dilahirkan sebagai dasar Negara, kapan mulai berlakunya Pancasila itu ?

Berikut ini akan kami coba membahasnya berdasarkan fakta sejarah yang ditulis oleh berbagai ahli seperti tercantum dalam daftar kepustakaan terlampir.

Pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan Hari Raya Tentyioosetsu atau Hari Ulang Tahun Kaisar Jepang Tenno Heika oleh Saiko Sikikan Jawa dibentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Badan Penyelidik) yang beranggotakan 63 orang, terdiri dari Ketua (Kaicoo) Dr. KTR Radjiman Wedyodiningrat, Ketua Muda (Fuku Kaicoo) bangsa Jepang Ichibangase dan seorang Ketua Muda dari bangsa Indonesia, yaitu RP. Soeroso dan 60 anggota biasa (Iin) yang sebagian besar dari pulau Jawa, ada beberapa anggota dari Sumatra, Maluku dan Sulawesi. Disamping itu keanggotaannya dapat dikatakan mencerminkan berbagai golongan yang ada, seperti : golongan Ulama, Cendekiawan, buruh, tani, pedagang, wartawan, bangsawan, rakyat jelata, PETA (Pembela Tanah Air), serta beberapa orang keturunan Eropa, Cina dan Arab.

Pada tanggal 28 Mei 1945 Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) dilantik oleh Seikoo Sikikan, dan diberi nasehat oleh Gunseikan yang antara lain menjelaskan bahwa tugas Badan ini ialah untuk mempelajari dan menyelidiki segala sesuatu urusan penting yang mengenai masalah politik, ekonomi, pemerintahan, kehakiman, pembelaan negeri, lalu lintas, dan sebagainya, yang diperlukan dalam usaha pembentukan Negara Indonesia, dan hasil penyelidikan tersebut harus dilaporkan kepada Gunseikan.

Masa sidang yang dilangsungkan selama 4 hari, mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan bertempat di gedung Tyuoo (sekarang Departemen Luar Negeri). Dalam masa sidang I ini diminta oleh Ketua Badan Penyelidik kepada para anggota untuk lebih dahulu mengemukakan dasar Negara apa yang akan dipakai nanti kalau Indonesia sudah memperoleh kemerdekaannya.

PANCASILA Mr. YAMIN

Pada hari pertama, yaitu tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muh. Yamin menyampaikan pidato yang panjang lebar, semacam prasaran/usul yang telah disiapkan lebih dahulu secara tertulis dengan judul : "Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia" dan ditutup dengan sebuah sajak yang berjudul "Republik Indonesia".

Dalam pidato nya itu diusulkan 5 asas dan dasar negara, dengan istilah dan urutan sebagai berikut :

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan (yang terdiri dari :
 - a. Permusyawaratan
 - b. Perwakilan
 - c. Kebijaksanaan
5. Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial)

Selanjutnya menurut Buku susunan Prof. Mr. H. Muh. Yamin yang berjudul NASKAH PERSIAPAN UNDANG UNDANG DASAR 1945, jilid I, yang dicetak untuk pertama kalinya pada tahun 1959, disebutkan bahwa setelah mengucapkan pidato prasaraannya mengenai dasar negara ini Mr. Muh. Yamin juga menyerahkan perumusan UUD RI yang dimulai dengan "Pembukaan". Yang sangat menarik bagi kita ialah bahwa pembukaan itu hampir sama dengan bunyi alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945, yang di akhiri dengan perumusan yang mirip dengan Pancasila dengan kata-kata sbb.:

"dengan berdasar kepada : Ke -Tuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Persatuan Indonesia, dan rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Jadi pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muh. Yamin secara tertulis mengusulkan lima dasar Negara, yang istilah tertulisnya agak berbeda dengan yang dipidatokan dalam sidang Badan Penyelidik pada hari yang sama, (tetapi mirip dengan Pancasila-nya UUD 1945), yaitu :

1. Ke Tuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima dasar negara yang disampaikan oleh Mr. Muh. Yamin ini, yang tercantum dalam Pidato prasaraannya dan yang tercantum dalam lampirannya, susunan dan istilahnya agak berbeda, namun intinya sama dengan yang sekarang disebut "Pancasila". Hanya saja pada

waktu itu Mr. Muh. Yamin sama sekali tidak mengusulkan nama apapun untuk 5 dasar negara yang diusulkan itu, jadi pada waktu itu belum lahir nama "Pancasila" sebagai dasar negara. Meskipun demikian dari buku susunan Prof. Yamin tersebut diatas timbul kesan seolah-oleh beliaulah yang pertama-tama mengusulkan lima dasar negara yang sekarang tercantum dalam UUD 1945.

Kesan semacam ini dibantah dengan dikritik oleh Dr. Muh. Hatta alm. (bekas Wakil Presiden pada waktu Mr. Muh. Yamin menyampaikan pidatonya juga hadir sebagai anggota Badan Penyelidik). Kritik Bung Hatta ini dapat kita baca dalam kumpulan notulen sidang Panitia Lima yang diterbitkan dalam Buku "Uraian Pancasila" Penerbitan Mutiara Jakarta tahun 1978. (Perlu dijelaskan lebih dahulu bahwa Panitia Lima adalah panitia yang dibentuk oleh Pemerintah untuk memberikan penafsiran mengenai Pancasila sebagai bahan bagi Pemerintah/Presiden dan terdiri dari 5 orang, yaitu : Dr. H. Muh. Hatta, Prof Mr. H. Ahmad Subardjo Djojoadisuryo, Mr. Alex Adrian Maramis, Prof. Mr. Sunario dan Prof. Mr. Abdul Gaffar Pringgodigdo).

Dalam pidatonya yang ke 1 tanggal 10 Januari 1975 Dr. Muh. Hatta, atas pertanyaan dari Prof. Mr. Sunario, mengatakan tidak benar Bung Yamin mengucapkan pidato yang isinya mirip dengan Pancasila pada tanggal 29 Mei 1945. Bung Yamin agak licik "kata Bung Hatta" sebenarnya pidato itu adalah yang diucapkan dalam sidang Panitia Kecil (mungkin yang dimaksud adalah Panitia yang menyusun Pembukaan UUD pada sekitar pertengahan bulan Juli 1945, Peny.).

Anehnya kritik semacam ini tidak pernah dilontarkan pada saat Prof. Yamin masih hidup : bahkan Bung karno sendiri yang mengaku menggali Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 tidak pernah menyanggah notulen pidato Mr. Muh. Yamin dalam bukunya tersebut diatas, yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Mei 1945 telah mempersembahkan kepada sidang suatu rancangan UUD RI. Bahkan dalam rapat Panitia Perancang UUDA tanggal 11 Juli 1945 Bung Karno sebagai Ketua Panitia menyebutkan bahwa Mr. Muh. Yamin telah memasukkan lampiran berisi rancangan UUD RI. Secara tidak langsung Bung Karno mengakui bahwa Mr. Moh. Yamin telah menyarankan 5 dasar Negara yang diucapkan dan disampaikan secara tertulis pada tanggal 29 Mei 1945, yang isinya mirip dengan yang dipidatokan oleh Bung Karno sendiri 3 hari kemudian, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945.

Pada hari kedua sidang Badan Penyelidik, yaitu tanggal 30 Mei 1945, banyak golongan/tokoh-tokoh Islam yang berbicara, seperti K.H. Wahid Hasjim, Ki Bagus Hadikusumo, dan KH. Abdul Kahar Muzakir, yang mengusulkan agar dasar Negara yang dipakai nanti adalah dasar Islam mengingat bahwa sebagian besar rakyat Indonesia beragama Islam. Tetapi Bung Hatta (Drs. Much. Hatta) yang juga berbicara pada hari yang sama, tidak menyetujui dasar

Islam ini dan mengusulkan agar dibentuk negara Persatuan Nasional, dimana urusan agama dipisahkan dari urusan Negara.

Pada hari ketiga antara lain berbicara Prof. Mr. Supomo yang menguraikan panjang lebar tentang teori kenegaraan secara yuridis, politis dan sosiologis, serta syarat-syarat berdirinya negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan dan hubungan antar negara dan agama. Mengenai yang terakhir ini Prof Supomo sependapat dengan Bung Hatta agar urusan agama dipisahkan dari urusan negara dan tidak dapat menyetujui dasar Islam karena "tidak sesuai dengan cita-cita negara persatuan yang telah diidam-idamkan oleh kita semua dan juga yang telah dianjurkan oleh Pemerintah Balatentara (Jepang : peny.). Disamping itu negara yang diusulkan oleh Prof. Supomo adalah negara yang akan menjadi anggota dari lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya, sedang dari lingkungan itu anggota yang lain-lain seperti misalnya negeri Nippon, Tiongkok, Manchukuo, Filipina, Thai, Birma, ialah bukan negara Islam". Demikian pendapat Prof. Mr. R. Supomo.

PANCASILANYA BUNG KARNO

Pada hari keempat yaitu tanggal 1 Juni 1945 berbicara antara lain Ir. Sukarno, salah seorang anggota Badan Penyelidik, yang secara langsung memenuhi permintaan Ketua Badan Penyelidik "untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka, atau yang disebut "Philosoffiche grondslag" atau "Weltanschauung" dari pada Indonesia Merdeka, yaitu "fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. dalam pidato yang diucapkan tanpa teks itu antara lain diusulkan "Dasar-dasar Negara" yang lima jumlahnya yaitu :

1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme
2. Internasionalisme atau perikemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi atau permusyawaratan, perwakilan,
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan atau Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dasar hukum yang diusulkan itu diberi nama "PANCASILA" yang berarti lima dasar atau lima asas. Nama ini diberikan oleh Bung Karno dengan petunjuk seorang temannya yang ahli bahasa (Mr. Moh. Yamin atau Prof. Purbocaroko ?).

Lima dasar Negara dan nama Pancasila sebagai Dasar Negara yang akan didirikan ini bukan satu-satunya yang diajukan oleh Bung Karno dalam pidatonya itu. karena bagi mereka yang tidak senang dengan bilangan lima diusulkan agar dasar Negaranya dijadikan tiga dengan nama : "TRISILA" yaitu :

1. Socio-nationalisme. yang merupakan perasan dari Kebangsaan dan Internasionalisme.

2. Socio-demokrasi, yang merupakan perasan dari demokrasi dan kesejahteraan sosial.
3. Ketuhanan yang menghormati satu sama lain.

Bagi mereka yang tidak suka kepada simbolik lima atau tiga, diajukan usul agar Dasar Negara Indonesia hanya satu saja dengan nama : "EKA SILA", yaitu dasar "GOTONG ROYONG".

Jadi pada tanggal 1 Juni 1945 ini Bung Karno sebagai anggota Badan Penyelidik mengusulkan tiga macam dasar Negara, yaitu Pancasila atau Trisila atau Ekasila. Diantara ketiga usul itu belum ada yang diputuskan untuk dipakai sebagai dasar negara, karena memang pada tanggal 1 Juni 1945 ini belum diadakan pemungutan suara tentang dasar negara yang akan didirikan itu. Demikian pula usul-usul lainnya, baik dari golongan kebangsaan, seperti usul Mr. Muh. Yamin, Mr. Soepomo dan Drs. Muh. Hatta, maupun dari golongan Islam seperti KH. Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, H. Agus Salim, dan KH. Abdul Kahar Muzakir, belum diputuskan oleh sidang Badan Penyelidik manakah yang akan dipakai sebagai Dasar Negara.

Jadi pada tanggal 1 Juni 1945 meskipun istilah Pancasila sudah lahir, namun Bangsa Indonesia belum memutuskan apa dasar Negara yang akan dipakai nanti setelah mendapatkan kemerdekaannya.

Dari peristiwa ini sampai sekarang banyak orang menganggap bahwa Bung Karnolah yang menciptakan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Sejalan dengan itu maka banyak pula orang yang memperingati tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahirnya Pancasila.

Mengenai anggapan bahwa Bung Karno lah yang menciptakan Pancasila dapat dibaca dalam buku karangan Ki Hajar Dewantoro yang berjudul : "Pantja Sila" (tahun 1950) yang menyebutkan bahwa Bung Karno adalah pencipta Pancasila. Demikian pula pada waktu Universitas Gadjah Mada memberikan gelar Doctor Honoris Causa dalam ilmu Hukum kepada Bung Karno pada tanggal 19 September 1951, promotor Prof. Mr. Drs. Notonegoro menyebutkan alasan pemberian gelar tersebut : "dimaksudkan sebagai suatu tanda pengakuan dari Senat akan jasa yang amat besar dari Paduka Yang Mulia sebagai pencipta Pancasila itu." Pada saat itu juga dalam pidato promosinya Dr. Ir. Sukarno menolak keterangan promotor bahwa dialah yang menciptakan Pancasila, karena Bung Karno hanyalah sekedar menjadi perumus dari pada perasaan-perasaan yang telah lama terkandung dalam kalbunya rakyat Indonesia, sekedar menjadi pengutara dari pada keinginan-keinginan dan isi jiwa bangsa Indonesia turun menurun".

Pada lain kesempatan, dalam amanat Presiden tanggal 24 September 1955 Bung Karno menegaskan bahwa : "Aku bukan pencipta Pancasila. Pancasila diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri. aku hanya menggali Pancasila dari bumi bangsa Indonesia.".

Jadi Bung Karno sendiri tidak mau disebut sebagai pencipta Pan-

casila, melainkan hanya sekedar perumus atau penggali saja. Ini pun sebenarnya berdasarkan fakta sejarah, Bung Karno bukan satu-satunya penggali atau perumus Pancasila, karena pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muh. Yamin telah lebih dahulu menggali perumusan lima dasar Negara yang oleh Bung Karno diberi nama Pancasila, meskipun hasil penggalian dan perumusan kedua tokoh kemerdekaan ini tidak samadengan perumusan Pancasila yang sekarang yang menjadi dasar negara kita.

Tanggal 29 Mei dan 1 Juni 1945 barulah merupakan awal dari proses usaha perumusan Pancasila, karena masih diolah dan digodog oleh tokoh-tokoh kemerdekaan lainnya pada hari-hari berikutnya.

PANCASILANYA BADAN PENYELIDIK

Untuk menggolong-golongkan dan memeriksa catatan-catatan atau usul tertulis yang disampaikan oleh anggota Badan Penyelidik, dibentuk sebuah Panitia Kecil yang terdiri dari 8 orang, yaitu : Ir. Sukarno sebagai Ketua dengan anggota-anggotanya : Drs. Moh. Hatta, KH. Wahid Hasyim, Mr. Muh. Yamin, Ki Bagus Hadikusumo Mr. Maramis, Sutardjo dan Otto Iskandar Dinata.

Dalam sidang-sidang hari berikutnya Panitia Kecil ini membahas berbagai macam masalah, mulai dari prosedur yang akan ditempuh agar lekas mencapai kemerdekaan sampai pada menyusun Hukum dasar (Undang-undang Dasar).

Dalam membicarakan hubungan antara(tidak jelas dibaca)

Pada hari itu juga Panitia sembilan ini berhasil mendapatkan suatu jalan keluar yang merupakan hasil kompromi dari golongan Islam dan golongan Kebangsaan.

hasil kompromi yang merupakan "suatu modus" atau persetujuan antara fihak Islam dan fihak kebangsaan, ini tercantum dalam suatu Rancangan Pembukaan Hukum Dasar atau Rancangan Preambul Hukum Dasar yang ditanda tangani oleh 9 orang anggota Panitia Kecil, yang oleh Mr. Muh. Yamin disebut sebagai Gentlement agreement.....suatu "Jakarta Charter" atau "Piagam Jakarta".

Pada kalimat terakhir dari Piagam Jakarta ini disebutkan bahwa : "....., maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada :

"ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syairat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar

"kemanusiaan yang adil dan beradab,

"persatuan Indonesia, dan

"kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Jadi dalam Rancangan Pembukaan Hukum Dasar yang disebut Piagam Jakarta ini terdapat rumusan yang sistimatis dari Pancasila dan ini merupakan rumusan yang pertama dibuat oleh suatu lembaga resmi pada waktu itu, ialah Panitia Kecil Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Perlu dijelaskan disini bahwa rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta dan bahkan hampir semua isi kalimat keempat Piagam ini mirip dengan Rancangan Pembukaan yang disampaikan oleh Mr. Muh. Yamin seara tertulis pada tanggal 29 Mei 1945, hanya istilah "Undang-undang Dasar" dalam konsep Yamin diganti Hukum Dasar dan Ketuhanan Yang Maha Esa" diubah menjadi "Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan Syairat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini tidak mengherankan karena setelah tercapai kata sepakat mengenai pemeluk-pemeluk Agama Islam, maka perumusannya diserahkan kepada Bung Karno, yang kemudian minta bantuan kepada Mr. Muh. Yamin untuk menyusun kalimatnya.

Selanjutnya dalam Sidang Badan Penyelidik tanggal 14 Juli 1945 Panitia Perancang UUD yang dibentuk oleh BPUUPKI melapor hasil karyanya antara lain berupa Rancangan UUD yang tercantum dalam 3 bagian yaitu :

- a. Pernyataan Indonesia Merdeka atau Declaration of Independence yang isinya agak panjang, karena mengutarakan sejarah sejak adanya VOC, kemenangan Jepang atau Rusia pada tahun 1905, lahirnya pergerakan bangsa Indonesia, pecahnya Perang Dunia ke II kehendak Jepang untuk membangun negara-negara merdeka dilingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya dan diakhiri dengan pernyataan kemerdekaan rakyat Indonesia.
- b. Pembukaan UUD, yang isinya hampir sama dengan alinea keempat dari Piagam Jakarta.
- c. Batang tubuh UUD, yang terdiri dari 42 pasal.

Setelah diadakan pembahasan mengenai isinya dan diadakan perubahan redaksionil yang tidak prinsipiil, maka Rancangan Pernyataan Kemerdekaan dan Pembukaan UUD dapat diterima secara bulat oleh Badan Penyelidik.

PEMBENTUKAN PPKI

Setelah Badan Penyelidik dapat menyelesaikan tugasnya maka Badan ini kemudian dibubarkan dan sebagai kelanjutannya berdasarkan Pengumuman dari Pemerintah Bala Tentara Jepang untuk daerah Selatan (termasuk Indonesia) pada tanggal 7 —

Agustus 1945, maka pada pertengahan bulan Agustus akan dibentuk sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan, (Dokuritsu Zyunbi linkai) yang akan mempelajari bahan-bahan yang telah disusun oleh Badan Penyelidik dan mempersiapkan datangnya kemerdekaan yang akan "dihadiahkan" oleh Pemerintah Jepang. Untuk keperluan tersebut, pada tanggal 8 Agustus Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta dan Dr. Rajiman Wedyodiningrat berangkat ke Saigon atas panggilan Jendral Besar Terauchi, Seiko Sikikan untuk Daerah Selatan (Nanpoagun). Pada tanggal 9 Agustus 1945 Terauchi telah mengambil 3 keputusan, yaitu :

Ir. Sukarno diangkat sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Drs. Moh Hatta sebagai Wakil Ketua dan Dr. Rajiman hanya sebagai salah seorang anggota.

- a. Ir. Sukarno diangkat sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Ketua dan Dr. Rajiman hanya sebagai salah seorang anggota.
- b. PPKI boleh mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945.
- c. Cepat tidaknya pekerjaan PPKI terserah sepenuhnya kepada PPKI sendiri.

Tiga keputusan tersebut diumumkan oleh Bung Karno pada tanggal 14 Agustus 1945, sekembalinya di Jakarta dari Saigon. Menurut rencana Pemerintah Tentara Jepang di Jakarta, PPKI yang mempunyai anggota 21 orang ini akan dilantik pada tanggal 18 Agustus, mulai bersidang pada tanggal 19 Agustus, dengan mempergunakan bahan-bahan yang sudah disiapkan oleh Badan Penyelidik, dan diperkirakan pada tanggal 24 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia sudah akan dapat disahkan oleh Pemerintah Jepang di Tokio.

Tetapi man proposed, God disposed, manusia merencanakan, Tuhanlah yang menentukan. Dan Syukur Alhamdulillah, bahwa bangsa Indonesia tidak jadi menerima hadiah kemerdekaan dari Pemerintah Jepang, karena pada tanggal 14 Agustus Kaisar Jepang Tenno Heika telah mengeluarkan sabdanya bahwa Pemerintahnya telah menerima dan mengiakan Maklumat bersama keempat Negara Sekutu (yaitu : Amerika, Inggris, Tiongkok dan Sovyet Rusia), atau dengan kata lain : telah menyerah tanpa syarat. Hal ini dilakukan setelah Amerika menjatuhkan bom atomnya di Hiroshima (tanggal 6 Agustus) dan di Nagasaki (tanggal 9 Agustus) yang menyebabkan kedua kota ini rata dengan tanah dengan menewaskan puluhan ribu penduduknya.

Kejadian ini mengakibatkan Pemerintah Jepang tidak dapat meneruskan usahanya mengenai kemerdekaan bangsa Indonesia, karena Sekutu melarang Pemerintah Jepang mengadakan perubahan ketatanegaraan" di daerah yang didudukinya. Oleh karena itu maka diteruskan atau tidaknya hal tersebut terserah kepada

para pemimpin Indonesia sendiri. Mereka ini dibawah pimpinan Bung Karno kemudian memutuskan untuk meneruskan usaha-usaha persiapan kemerdekaan dengan melanjutkan atau mengaktifkan PPKI yang belum dilantik itu. Keputusan semacam ini banyak menimbulkan reaksi dikalangan masyarakat, terutama dari golongan muda yang tergabung dalam "Gerakan Angkatan Baru" dan "Barisan Pelopor Istimewa" yang ingin menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka berdasarkan kekuatan sendiri tanpa bantuan Jepang itu.

Mereka mendesak kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamkan kemerdekaan Indonesia, tanpa menunggu persetujuan dari Pemerintah Tentara Jepang di Indonesia (Gunseikanbu).

Atas desakan golongan muda ini pada tanggal 15 Agustus Bung Karno menjawab bahwa hal itu masih akan ditanyakan kepada Gunseikanbu pada tanggal 16 Agustus besok. Rupanya jawaban ini tidak memuaskan golongan Muda yang khawatir kalau sampai Gunseikanbu ini menolak, akan gagallah rencana kemerdekaan yang sudah sangat diharapkan.

Sehubungan dengan itu maka pada tanggal 15 Agustus malam beberapa orang dari golongan muda menculik Bung Karno, Bung Hatta, Ibu Farmawati dengan puteranya yang masih bayi (Guntur) dan dibawa ke Markas Peta di Rengasdeklok (Krawang). Pada tanggal 16 Agustus pagi Bung Karno menjanjikan kepada "para penculiknya" (Shoudanco Singgih, Shoudanco Affan dan Sukarni) bahwa Proklamasi Kemerdekaan akan dibacakan setelah tiba kembali di Jakarta. Hari itu juga shoudanco Singgi segera berangkat kembali ke Jakarta untuk menyampaikan berita tentang akan diadakannya Proklamasi hari berikutnya, tanggal 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada (Lapangan Gambir, sekarang Monas).

Demikian pula Bung Karno dan Bung Hatta tanggal 16 Agustus petang kembali ke Jakarta, dan pada malam itu juga menghubungi para anggota PPKI lainnya untuk mengadakan pertemuan guna menyusun naskah Proklamasi. Untuk menjaga kemungkinan, maka rapat pada malam itu tidak diadakan di tempat seperti biasanya di Gedung Pejabon atau di rumah Bung Karno di Pegangsaan Timur 56, melainkan di rumah seorang Laksamana Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia yaitu Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol Jakarta.

PENYUSUNAN DAN PEMBACAAN PROKLAMASI

Rapat yang mendadak ini tidak dapat dihadiri oleh semua anggota PPKI, karena belum sempat diberitahu, tetapi sebaliknya hadir pula beberapa orang dari golongan pemuda yang bukan anggota PPKI. Rapat yang diakhiri pada tanggal 17 dini hari (kl. jam 03.00) telah mengambil keputusan dengan suara bulat untuk

memproklamkan Kemerdekaan Indonesia pada pagi harinya dengan membacakan naskah proklamasi yang sudah ditanda tangani malam itu oleh Bung Karno dan Bung Hatta.

Rupanya rencana membaca proklamasi di lapangan Ikada, yang sudah disebar luaskan secara diam-diam kesegenap pelosok Jakarta, sudah dicium oleh fihak Tentara Jepang, ternyata pada tanggal 17 pagi lapangan Ikada sudah banyak sekali tentara Jepang yang bersenjata lengkap berjaga-jaga disana. Oleh karena itu maka tempat pembacaan proklamasi tidak jadi di lapangan Ikada, tetapi di alihkan ke Pengangsaan Timur 56 Jakarta, rumah kediaman Bung Karno.

Tepat jam 10.00 pagi Hari Jum'at Legi tanggal 17 Agustus 1945, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhon 1364 H. Bung Karno membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang tersohor dan keramat itu, di ruang depan rumahnya (beranda), dihadapan beberapa orang anggota PPKI yang sempat hadir, ratusan massa rakyat dan pemuda.

Isi teks proklamasi itu lengkapnya sbb. :

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17-8-05
Wakil-wakil Bangsa Indonesia

ttd.

Sukarno - Hatta

Sesaat setelah membacakan teks Proklamasi, Bung Karno memberikan sambutan singkat, dan kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera sang Saka Merah Putih di halaman depan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Walikota Suwiryo dan diakhiri dengan sambutan Dr. Muwardi sebagai Kepala Keamanan. Kemudian upacara dibubarkan.

(Ket. : th. '05 = 2605 Th. Jepang = 1945 M).

PEMBENTUKAN NEGARA R.I.

Dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan ini belum berarti bahwa bangsa Indonesia sudah memiliki Negara Indonesia yang merdeka, karena untuk adanya suatu Negara harus dipenuhi 4 syarat, yaitu adanya Rakyat, Daerah, Pemerintah dan Kedaulatan. Pada hari proklamasi ini baru 3 syarat yang ada, yaitu Rakyat (bangsa Indonesia) daerah (yaitu bekas daerah Hindia Belanda dahulu) dan kedaulatan (karena telah menyatakan merdeka lepas dari penjajahan oleh siapapun). Tetapi Pemerintahnya yang akan mengatur bangsa Indonesia ini yang belum ada, bahkan siapa Kepala Pemerintahnya pun belum ditentukan. Oleh karena itu tahap berikutnya yang harus diusahakan ialah membentuk Pemerintah atau sekurang-kurangnya memilih siapa yang akan memimpin pemerintah itu. Untuk itu lebih dahulu harus ada ketentuan atau peraturan siapa yang berhak memilih kepala pemerintah. Jadi yang diperlukan adanya peraturan atau undang-undang Dasar untuk mengatur semuanya itu.

Pada waktu itu yang ada hanyalah rancangan Undang-undang Dasar yang telah disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sidangnya bulan Juli 1945, tetapi Badan Penyelidik ini sudah dibubarkan dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang telah berhasil melahirkan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu jalan selanjutnya ialah melanjutkan tugas yang sudah ada dimulai oleh PPKI ini sebagai Pembentuk Negara, dengan menyusun atau mengesahkan UUD dan memilih Presiden dan wakil Presiden sebagai pemimpin Pemerintah.

Sehubungan dengan itu, maka PPKI yang semula merupakan badan resmi buatan Jepang oleh ketuanya Ir. Sukarno atas tanggung jawabnya sendiri ditambah jumlah anggotanya dengan 6 orang lagi (menjadi 27 orang), agar lebih mencerminkan kepada rakyat Indonesia, sehingga PPKI ini berubah sifatnya menjadi badan pendahuluan bagi Komite Nasional, yang berhak mewakili rakyat Indonesia menyusun UUD. Semula sebenarnya keanggotaan PPKI ini akan ditambah 6 orang tetapi tiga orang (yaitu Sukarni, Chairul Saleh dan Adam Malik) menolak keanggotaan mereka, karena menganggap PPKI ini badan buatan Jepang.

Tugas PPKI menyusun UUD ini dilaksanakan sehari sesudah proklamasi, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Tetapi sehari sebelum itu, yaitu pada tanggal 17 sore terjadi suatu peristiwa yang sangat penting yang ikut menentukan nasib kehidupan syariat Islam pada masa-masa yang akan datang. Sore itu Bung Hatta kedatangan seorang opsir Jepang dari Kaigun (angkatan laut yang menguasai daerah Indonesia Timur) didampingi oleh Masyijima (pembantu Laksamana Maeda), yang mengaku utusan dari Kaigun untuk memberitahukan dengan sungguh-sungguh bahwa wakil-

wakil Protestan dan Katholik di daerah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang sangat keberatan terhadap bagian kalimat dalam Rancangan Pembukaan UUD, yang berbunyi : "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Mereka mengakui bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka yang tidak beragama Islam, tetapi tetapi tercantum ketetapan seperti itu dalam suatu dasar yang menjadi pokok UUD, berarti mengadakan diskriminasi terhadap mereka golongan minoritas. Jika apa yang mereka namakan diskriminasi itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri diluar Republik Indonesia.

Apa yang disampaikan oleh utusan dari Kaigun ini rupanya mendapat perhatian yang sangat dari Bung Hatta, karena adanya kekhawatiran timbul perpecahan dikalangan bangsa Indonesia yang baru saja pagi harinya memproklamkan kemerdekaannya. Kalau hal itu sampai terjadi maka perjuangan beliau yang sudah lebih dari 25 tahun lamanya untuk mencapai Indonesia Merdeka yang bersatu padu, akan sia-sia belaka.

PANCASILANYA UUD 1945.

Oleh karena itu, maka esok paginya tanggal 18 Agustus 1945 sesaat sebelum dilangsungkan sidang PPKI untuk menyusun UUD. Bung Hatta mengajak beberapa orang tokoh Ummat Islam yang duduk dalam PPKI yaitu : Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Moch. Hasan (dari Sumatra) untuk mengadakan rapat pendahuluan (semacam lobbying) guna membicarakan usul yang dibawakan oleh utusan Kaigun tersebut. Dalam waktu kurang dari 15 menit, mereka dapat mengambil keputusan mengenai suatu masalah yang sangat prinsipil, yang bisa membahayakan keutuhan negara, semata-mata dengan pertimbangan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu menyetujui kalimat yang dianggap diskriminatif itu dengan : "Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan kata lain, mereka menyetujui perubahan dasar Negara : dari Pancasila-Islam" menjadi Pancasila.

Perubahan yang telah disepakati oleh 5 orang ini kemudian disetujui oleh sidang Pleno PPKI dengan suara bulat, yaitu pada waktu PPKI mengesahkan Piagam Jakarta menjadi Pembukaan UUD dengan perubahan sila yang pertama seperti tersebut diatas tadi. Dengan demikian maka pada hari itu, yaitu Sabtu Pahing tanggal 18 - 8 - 1945 lahirlah secara resmi Dasar Negara Indonesia yang pertama, dengan diiringi oleh bergelornya semangat persatuan dan kesatuan serta toleransi yang besar dari tokoh-tokoh umat Islam yang duduk dalam PPKI.

Jadi lengkapnya 5 dasar Negara Republik Indonesia, yang kemudian terkenal dengan nama Pancasila, adalah sebagai berikut

* Ketuhanan Yang Maha Esa

- * Kemanusiaan yang adil dan beradab
- * Persatuan Indonesia
- * Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu :
- * Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setelah PPKI berhasil mengesahkan UUD, maka sidang dilanjutkan untuk menetapkan Batang Tubuh UUD, yang rancangannya telah disusun dan disahkan oleh sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 14 Juli 1945. Hampir semua pasal dalam rancangan tersebut diterima oleh sidang PPKI dengan suara bulat dengan beberapa perubahan disana-sini. Perubahan yang sangat prinsipil dan mempunyai pengaruh besar terhadap kedudukan agama Islam dikemudian hari ialah kelanjutan dari perubahan sila pertama dari dasar Negara kita yang tercantum dalam Pembukaan, yakni perubahan isi pasal 6 dan pasal 29 :

- Pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi : "Presiden ialah orang Indonesia Asli yang beragama Islam, kata-kata yang beragama Islam" dicoret, dengan penjelasan bahwa "kata-kata itu agak menyinggung perasaan dan pun tidak berguna, oleh karena mungkin dengan sendirinya barangkali orang Islam yang akan menjadi Presiden, sedang membuang kata-kata ini maka seluruh Hukum UUD dapat diterima oleh daerah-daerah Indonesia yang tidak beragama Islam, umpamanya yang pada waktu itu diperintah oleh Kaigun. Demikian antara lain penjelasan Wakil Ketua PPKI Drs. Moh. Hatta dalam sidang PPKI tanggal 18 - 8 - 1945.

- Perubahan penting lainnya isi pasal 29 ayat 1 yang semula berbunyi : "Negara berdasar atas Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dirobah menjadi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan penjelasan oleh Wakil Ketua PPKI : "Inilah perubahan yang maha penting menyatukan segala bangsa".

Memang kalau kita kaji lebih mendalam, maka ketiga perubahan tersebut diatas benar-benar merupakan perubahan yang sangat fundamental karena merubah dasar negara dari "Pancasila - Islam" menjadi "Pancasila". Dan hal ini telah dilakukan dengan penuh kesadaran oleh wakil-wakil bangsa Indonesia yang duduk dalam Badan Pendiri negara Republik Indonesia, yaitu PPKI. Terutama hal itu dapat terjadi berkat keikhlasan wakil-wakil golongan Islam yang telah menyetujui penghapusan ketentuan yang mewajibkan umat Islam menjalankan syariat agamanya, demi menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.

MULAI BERLAKUNYA PANCASILA DAN UUD 1945

Mungkin ada yang menanyakan : kapan mulai berlakunya dasar negara Pancasila yang telah dilahirkan pada tanggal 18 Agustus 1945 ini ? Sebagaimana kita ketahui Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sedang UUD ini tidak menentukan kapan mulai berlakunya UUD tersebut. Oleh karena itu maka mulai berlakunya dasar negara Pancasila tidak dapat kita ketahui dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUD 1945. Apabila berlakunya suatu ketentuan perundangan, maka dalam ilmu pengetahuan ada suatu asas yang telah diakui oleh para ahli hukum pada umumnya, yaitu bahwa berlakunya ketentuan hukum tersebut ialah mulai dilaksanakan oleh yang berhak melaksanakannya.

Kalau demikian kapan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 mulai dilaksanakan ? Kalau kita telusuri kembali sejarah penyusunan UUD 1945 maka ternyata ada satu pasal yang sudah dilaksanakan pada tanggal 18 - 8 - 1945 yaitu pasal mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk pertama kalinya. Penjelasannya sebagai berikut :

Diatas telah dikemukakan bahwa setelah PPKI berhasil mengesahkan Pembukaan UUD, sidang dilanjutkan untuk membahas batang tubuh UUD yang rancangannya telah disiapkan oleh Badan Penyelidik pada tanggal 14 Juli 1945. Sidang PPKI yang membahas batang tubuh UUD ini memulai pasal 1 sampai pasal 37 yang mengatur perubahan UUD, berlangsung secara kilat dan selesai pada kl. jam 15.00 siang.

Setelah sidang dischors 15 menit untuk istirahat, sidang dilanjutkan pada jam 15.15 untuk menyelesaikan Aturan Peralihan yang jumlahnya 4 pasal dan Aturan Tambahan. Tetapi pembahasannya tidak dimulai dari pasal I Aturan Peralihan, oleh karena para wartawan telah menunggu keputusan yang sangat penting, yaitu siapa yang akan dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang pertama bagi Negara Indonesia, maka didahulukan mengesahkan pasal III yang berbunyi : "Untuk pertama Kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia".

Setelah pasal ini disetujui oleh sidang, sebelum membahas pasal yang lain sidang lebih dahulu memasuki acara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang berlangsung tidak sampai 15 menit, karena atas usul anggota PPKI Otto Iskandar Dinata sidang dengan aklamasi menyetujui Ir. Sukarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakilnya.

Setelah terpilih sebagai Presiden, Ir. Sukarno selaku Ketua PPKI melanjutkan sidang PPKI untuk menyelesaikan pasal-pasal yang belum disahkan, yaitu Aturan Peralihan pasal I, II dan IV serta dua buah Aturan Tambahan.

Pada jam 16.12 tanggal 18 - 8 - 1945 sidang PPKI yang sangat bersejarah ini ditutup, setelah berhasil menetapkan seluruh pasal

dalam UUD 1945 serta memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama.

Dari uraian diatas ternyata bahwa salah satu pasal dari UUD 45 telah dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, yang berarti pula bahwa UUD ini mulai berlaku sejak pada hari itu juga. Ini berarti bahwa Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 juga telah mulai berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945.

Arti lain dari telah adanya Presiden (dan Wakil Presiden) Republik Indonesia ialah bahwa pada hari tersebut berarti bangsa Indonesia telah memiliki Pemerintah sendiri yang merdeka dan berdaulat sehingga telah resmiah berdiri Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syaratnya yang lengkap, yaitu : mempunyai Daerah, Rakyat, Pemerintah dan Kedaulatan sendiri, baik kedalam maupun keluar.

KESIMPULAN

Sebagai penutup dari uraian ini, akan kami sampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggal 1 Juni 1945 bukanlah HARI LAHIRNYA Pancasila sebagai Dasar Negara RI, dan oleh karena itu tidak perlu setiap tanggal 1 Juni diadakan peringatan mengenai lahirnya Pancasila. Tanggal 1 Juni lebih tepat merupakan hari lahirnya nama atau istilah Pancasila untuk menanamkan 5 asas yang diusulkan sebagai dasar Negara.

Pancasila yang menjadi dasar Negara yang kita pergunakan sekarang ini baru lahir secara resmi dan sah pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu pada saat 5 sila disahkan rumusannya oleh PPKI. (Sebagai perbandingan oleh Presiden Suharto, bukanlah tanggal 12 April 1976, yaitu pada saat isi dan nama itu dipidatoken oleh Presiden Suharto di Istana Negara dalam rangka Pembukaan Muker Kwarnas Gerakan Pramuka, tetapi yang benar : lahirnya P.4 ialah pada saat Eka Prasetya itu disahkan sebagai pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila oleh MPR pada tanggal 22Maret 1978, di tuangkan dalam TAP MPR no. II/MPR/1978.

2. Ir. Sukarno/Bung Hatta bukanlah orang yang menciptakan Pancasila, dan memang beliau sendiri tidak mau mengaku sebagai pencipta Pancasila, melainkan hanya mengaku Penggali atau perumus dari Pancasila. Pengakuan semacam inipun tidak dimonopoli oleh Bung karno seorang diri karena :
 - a. Kalau yang dimaksud dengan "penggali" adalah pengusul atau pemrasaran, maka 3 hari sebelum Bung Karno mengusulkan atau menyarankan Pancasila, sebagai Dasar Negar, Mr. Moh. Yamin telah lebih dahulu mengusulkannya, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945, bahkan dengan urutan sistematika dan perumusan yang lebih mirip dengan yang tercantum

dalam UUD 1945.

- b. Kalau yang dimaksud menggali adalah merumuskan kelima sila itu secara sistematik, maka penggantinya adalah semua tokoh-tokoh kemerdekaan yang menandatangani Piagam Jakarta, yang kemudian di sempurnakan oleh semua anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan disahkan oleh PPKI.

Mengenaisiapa yang menciptakan Pancasila sebagai Dasar Negara, maka :

- a. Kalau yang dimaksud adalah menciptakan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan budaya bangsa yang memancarkan pandangan hidup bangsa Indonesia, maka yang berhak mendapat predikat sebagai Pencipta Pancasila adalah segenap bangsa Indonesia.
- b. Kalau yang dimaksud dengan menciptakan Pancasila sebagai Dasar Negara yang secara resmi dan formal tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka penciptanya tidak lebih ialah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang telah merumuskan secara sistimatis dan mengesahkannya sebagai Dasar Negara pada tanggal 18 Agustus 1945.
3. Tanggal 18 - 8 - 1945 bukan hanya merupakan tanggal lahir Pancasila, melainkan juga tanggal berlakunya Pancasila sebagai Dasar Negara, karena mulai berlakunya Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 ini adalah sama dengan mulai berlakunya UUD 1945. Sedang mulai berlakunya UUD 1945 adalah tanggal 18 - 8 - 1945, yaitu sejak salah satu pasal dari padanya dipergunakan untuk mengadakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Tanggal 18 - 8 - 1945 adalah juga merupakan tanggal berdirinya Negara Republik Indonesia, karena meskipun bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi Republik Indonesia secara resmi dah sah serta memenuhi syarat sebagai suatu Negara baru lahir sejak tanggal 18 Agustus 1945, yaitu setelah adanya Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (Disamping telah adanya daerah, rakyat dan kedaulatan).

PENGARUH PERSETUJUAN LINGGARJATI TERHADAP PERJUANGAN ALRI DIVISI IV PERTAHANAN KALIMANTAN

Oleh : Drs. Gazali Usman

I. Pendahuluan

a. Latar belakang masalah

Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 rakyat di Kalimantan Selatan sudah mengambil sikap yang positif tentang lahirnya negara Republik Indonesia yang merdeka dari segala penjajahan. Sikap yang positif ini terlihat dengan jelas pada saat-saat terakhir dari kekuasaan Jepang di Kalimantan Selatan begitu pula pada saat Belanda kembali mengambil kekuasaan dari tangan pasukan Australia. Rakyat membentuk gerakan-gerakan illegal yang berjuang membangkitkan semangat rakyat membebaskan kembali daerah Kalimantan Selatan dari kekuasaan NICA.

Dari beberapa organisasi illegal ini lahirlah sebuah wadah perjuangan bersenjata yang bernama ALRI Divisi IV/A dibawah pimpinan Hasa Basry (18 Nopember 1946), sebagai organisasi bersenjata yang langsung menghadapi Belanda di Kalimantan Selatan. Markas Besar ALRI Divisi IV/A ini berpusat di Mojokerto dan kemudian pindah ke Tuban dibawah pimpinan Letkol Zakaria Madun seorang putera Kalimantan asal Amuntai bekas marinir Belanda.

Markas Besar ALRI Divisi IV/A ini berada dibawah koordinasi Gubernur Kalimantan Ir. Pangeran Muhammad Noor yang juga berkedudukan di Jawa.

Dalam suatu persetujuan Linggarjati disebutkan bahwa yang diakui secara de facto oleh pemerintah Belanda hanyalah Jawa, Madura dan Sumatera saja, sedangkan daerah lainnya termasuk Kalimantan secara praktis berada dalam kekuasaan Belanda. Akibat langsung dari persetujuan ini ialah status Gubernur Kalimantan dengan Markas Besar ALRI Divisi IV/A yang merupakan instansi tertinggi dari ALRI Divisi IV/A Kalimantan dihapuskan secara resmi. Bagi pimpinan ALRI Divisi IV/A Kalimantan hal ini berarti bahwa mereka berjuang tanpa ada atasan dan tidak ada hubungan dengan Republik Indonesia. Situasi inilah yang menyebabkan ALRI Divisi IV/A Kalimantan menyusun pemerintahan tentara sebagai suatu pemerintahan tandingan dari pemerintah Belanda yang sah saat itu. (sah menurut persetujuan Linggarjati).

Pemerintah tandingan ini dicetuskan melalui sebuah Proklamasi Gubernur Tentara tanggal 17 Mei 1949 yang melahirkan pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV/A Pertahanan Kalimantan dengan Hasan Basry sebagai Gubernur Tentara dengan pangkat Letnan Kolonel.

b. Ruang lingkup masalah

Perjuangan rakyat Kalimantan Selatan sebagai usaha untuk menghancurkan penjajahan merupakan perjuangan yang gigih dalam usaha membebaskan Kalimantan Selatan dari penjajahan Belanda dan menyatukannya dengan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan.

Sesuai dengan topik dari makalah ini ruang lingkup masalah yang akan dibahas ialah meliputi perjuangan dalam sikap perjuangan rakyat Kalimantan Selatan terutama segi militer dari ALRI Divisi IV/A Kalimantan sebagai pengaruh dari persetujuan Linggarjati. Memang pengaruh persetujuan tersebut juga menyangkut perjuangan politik dalam Dewan Banjar yang terorganisir dalam partai politik Serikat Kerakyatan Indonesia (S.K.I.) dan Serikat Muslimin Indonesia (SERMI), tetapi dalam ruang lingkup yang menjadi pembahasan dalam makalah ini hanyalah yang menyangkut perjuangan bersenjata dari ALRI Divisi IV/A saja.

II. Sikap perjuangan rakyat sebelum Persetujuan Linggarjati.

Sikap positif terhadap Proklamasi Kemerdekaan tersebut tampak terlihat dengan lahirnya organisasi politik di Kalimantan Selatan yang bernama Persatuan Rakyat Indonesia (PRI) pada tanggal 16 Agustus 1945 yang berusaha menyusun pemerintahan yang merdeka sebagai bagian dari Republik Indonesia. ¹⁾ PRI menunjuk Pangeran Musa Ardikesuma sebagai Residen Kalimantan Selatan, dan membentuk Komite Nasional Indonesia dengan ketua M. Ruslan serta Hadhariyah dan F. Mohani sebagai sekretaris I dan II.

Pelaksanaan pemerintahan di daerah ini direncanakan pada tanggal 10 Oktober 1945. Rencana ini tak dapat terlaksana karena tidak diizinkan oleh komandan pasukan Australia, Kolonel Rabson. Berakhirnya perang dengan kemenangan pihak Sekutu berarti pula kembali wilayah Belanda yang bernama Hindia Belanda ke tangan Belanda kembali sesuai dengan perjanjian Postdam. ²⁾ (2) Dengan demnikian gagallah usaha rakyat Kalimantan Selatan membentuk Pemerintahan Republik Indonesia.

Sejak bulan Oktober 1945 itu Belanda semakin kuat mempertahankan kedudukannya dengan ancaman dan penahanan terhadap anggota Pengurus Besar PRI yaitu Pangeran Musa Ardikesuma, A. Ruslan, Hadhariyah M, Abubakar, H. Abdullatif dan Amir Hasan Bondan. Dengan adanya tekanan dari pemerintah Belanda ini suasana perjuangan berubah dalam bentuk gerakan illegal, karena cara perjuangan politik kurang menguntungkan. Pangeran Musa Ardikesuma sendiri berhasil dipikat Belanda dengan memberinya jabatan sebagai district-hoofd NICA.

Gerakan Illegal yang lahir itu antara lain seperti : BARisan Pemuda Republik Indonesia Kalimantan (BPRIK) pada tanggal 16 Oktober 1945, Gerakan Rakyat Mempertahankan Indonesia (GER MERI) Barisan Pelopor Pemberontak Kalimantan Indonesia (BPPKI). Di Amuntai Hulu Sungai Utara berdiri GERPINDOM (Gerakan Rakyat Pembela Indonesia Merdeka) tanggal 20 Nopember 1945, juga terbentuk Pasukan Berani Mati (BPM) 23 September 1945 dibawah pimpinan seorang ulama yang berpengaruh H. Hasbullah Yasin. Di Rantau berdiri Banteng Borneo dibawah pimpinan M. Hammy

Organisasi yang terbesar di Kalimantan Selatan dan Tengah ialah MTKI dibawah pimpinan Tjilik Riwut ³⁾

Pada saat itu pusat pemerintahan Gubernur Kalimantan yang dijabat oleh Ir. Pangeran Muhammad Noor sebagai Gubernur berkedudukan di Mojokerto yang kemudian pindah ke Tuban mengirim sejumlah ekspedisi bersenjata untuk menghancurkan Belanda di

1) Syarifuddin, Sikap pergerakan rakyat menghadapi Belanda di Kalimantan selantan, Periode 1945 sampai 17 Agustus 1950..

Tesis, Fak. Keguruan UNLAM, Banjarmasin, th. 1974, hal 132

2) IDKD, Sejarah Rvolusi Kemerdekaan (1945 - 1949) Daerah Kalimantan Selatan, th. 1979, hal 166.

3) Tjilik Ruwut, Kalimantan Membangun, 1979, hal 102

Kalimantan antara lain :

- ekspedisi MN 1001 dibawah pimpinan Tjilik Riwut.
- ekspedisi Husno Hamzah di Pangkalan Bun.
- ekspedisi Mustafa Idham di Batakan.
- ekspedisi Sembilan orang yang beroperasi di Marabahan.
- ekspedisi Asli Zuhri dan Mursid yang mewakili Markas Besar ALRI Divisi IV yang berkedudukan di Mojokerto ⁴⁾

Suasana perjuangan tambah panas setelah Belanda-NICA dengan resmi pada tanggal 24 Oktober 1945 mengumumkan penyerahan kekuasaan atas Kalimantan oleh Pemimpin Tertinggi Tentara Australia. ⁵⁾ Insiden-insiden terjadi dan tak dapat dihindarkan, seperti penembakan seorang ulama terkenal pemimpin Pasukan Berani mati (PBM) H. Hasbullah Yasin di Alabio.

Di Banjarmasin terjadi peristiwa 9 Nopember 1945, yaitu penyerangan pada siang hari terhadap pertahanan Belanda yang dipimpin oleh BPRIK dengan korban 9 orang pahlawan. Di Rantau pada hari yang sama 9 Nopember 1945, telah terjadi perkelahian antara rayat dengan tentara Belanda dengan dua orang korban sebagai pahlawan.

Usaha perlawanan bersenjata dalam bentuk gerakan illegal ini, terasa kurang menguntungkan di samping ketidak seimbangan kekuatan antara gerakan rakyat dengan kekuatan Belanda-NICA.

Kelemahan perjuangan dalam bentuk illegal ini antara lain karena kurang terkoordinasi dan antara gerakan satu dengan lainnya tidak ada hubungan tidak ada rencana dan persiapan yang terarah.

PRI yang semula merupakan wadah perjuangan politik secara legal sudah tidak berdaya lagi, dan karenaitulah tokoh-tokoh politik seperti A.A. Rivai, Dr. DS Diapari, Dr. Soeranto, A. Sinaga dan Abdullah diadakan rapat kilat di Hendrik Weg No. 14 Banjarmasin pada tanggal 19 Januari 1946 yang melahirkan organisasi politik baru yang bernama Serikat Kerakyatan Indonesia (S.K.I.) dengan Pengurus Besarnya berkedudukan di Banjarmasin. ⁶⁾ Untuk mengikut sertakan rakyat dalam perjuangan menghadapi Belanda, SKI membentuk organisasi non-politik sebagai wadah bagi kader-kader partai jika seandainya pada suatu saat SKI tidak berdaya lagi. Organisasi itu ialah :

- a. Perwani (Persatuan Wanita Indonesia)
- b. P.P.I. (Persatuan Pemuda Indonesia)
- c. Perpi (Persatuan Pemuda Indonesia)
- d. K.R.I. (Kepanduan Rakyat Indonesia)
- e. PKDI (Persatuan Kaum Dagang Indonesia)
- f. SERMI (Serikat Muslimin Indonesia).

Untuk menghadapi kekuatan rakyat ini pemerintah Belanda membentuk suatu organisasi tandingan yang bernama S.R.I. (Serikat

4) M. Budhigawis, Letkol, Laporan dari Mungu Raya, Brosur, hal 6

5) Pengumuman tersebut tertanggal 1 Oktober 1945, tetapi baru dilaksanakan tgl. 24 Oktober 1945.

6) Syarifuddin, op cit, hal 137

Rakyat Islam) yang menjadi alat pemerintah Belanda terutama dalam kegiatan umat Islam.

Seiring dengan perjuangan dan kegiatan S.K.I. dengan SERMI maka dari segi perjuangan kelayakaran terdapat pula perubahan. Organisasi pejuang kelayakaran yang pada mulanya berdiri sendiri sendiri dapat digabungkan dalam satu wadah perjuangan bersenjata ALRI Divisi IV/A yang berbentuk satu batalyon pada tanggal 10 Nopember 1946. Sebagai komandannya ditunjuk H. Hasan Basry.

Lahirnya ALRI Divisi IV.

Dengan mengambil tempat di Hotel Palace Malang tgl. 4 April 1946 Laksamana Muda M. Mazir melantik satuan TRI Bagian laut, bernama ALRI Divisi IV/Pertahanan Kalimantan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Panglima Divisi	:	Letkol Zakaria Madun
Kepala Staf	:	Mayor Firmansyah
Bagian Keuangan	:	Mayor G. Obos
Wk. Bag. Keuangan	:	Letnan I A. Sarwani
Tata Usaha	:	Letnan I H. Sirat
Wk. Tata Usaha	:	Letnan II Gt. Anwar
Perlengkapan	:	letnan II Darmansyah
Penghubung/Intel	:	
dengan MB. ALRI	:	Kapten Anwar Beyk
P.H.B.	:	Letnan II Asli Zuhry

Susunan tersebut hasil penggodokan formatur yang terdiri Ir. Pangeran Mohammad Noor Gubernur Kalimantan, Zakarian Madun, Firmansyah, Hasyim Amin, Abdul Murad dan Razikin dari beberapa organisasi pejuang Kalimantan yang berada di Jawa seperti : Pesindo Divisi I, Kaigun Haiho, Serikat Pelayaran Indonesia dan P.R.I.K. ⁷⁾ Maksud dari penggabungan ini ialah menyatukan organisasi perjuangan bersenjata maupun perjuangan politik, baik yang bergerak di Jawa maupun yang bergerak di Kalimantan sendiri.

Pada tanggal 10 Oktober 1946 dikirimlah beberapa perwira penghubung dari Markas Besar ALRI Divisi IV ke daerah-daerah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Pembagian wilayah telah diatur oleh Markas Besar ALRI Divisi IV sebagai berikut : Kalimantan Selatan sebagai daerah ALRI Divisi IV Pertahanan "A", Kalimantan Barat sebagai daerah ALRI IV Pertahanan "B", dan Kalimantan Timur, Pertahanan "C" serta Riau, sebagai pertahanan "D". ⁸⁾

Pada tanggal 10 Oktober 1946 Letnan II Asli Zuhry dan Letnan Muda Mursid berangkat menuju Kalimantan dengan perahu dan mendarat di sungai Tambangan Batakan (Kabupaten Tanah Laut).

7) H. Hasan Basry, *Kisah Gerilya Kalimantan*, Yayasan Lektur Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 1961, hal 92

8) *Ibid*, hal 93

Setelah dengan susah payah barulah bertemu dengan pimpinan "Banteng Indonesia" yang saat itu mengembangkan organisasinya. Setelah melalui musyawarah yang mendalam bertempat di desa Tabihi 3 km di luar kota Kandangan mereka bersepakat untuk melebur "Banteng Indonesia" menjadi inti pasukan ALRI Divisi IV yang akan dibentuk kemudian. Kemudian selanjutnya ditandatangani pembentukan Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV/A, oleh Letnan I. Asli Zuhry dan Hasan Basry.⁹⁾

Tugasnya bukan hanya berjuang semata tetapi juga berusaha mempersatukan badan-badan perjuangan yang akan menjadi satu kekuatan nasional yang kuat melawan Belanda-NICA. Untuk mempersatukan perjuangan ini diadakan rapat di Tabihi pada pertengahan bulan Desember 1946 dihadiri oleh utusan gerakan-gerakan rahasia lainnya.

Rapat ini kurang lancar jalannya karena intres golongan terlihat dengan jelas, namun demikian rapat telah merencanakan :

- a) Membentuk persatuan komando perjuangan di Kalimantan Selatan oleh ALRI Divisi IV/A.
- b) Hasan Basry pimpinan umum ALRI Divisi IV/A disertai tugas mengkoordinir dan mengatur langkah-langkah komando perjuangan tersebut.

Sayang sekali hasil permusyawaratan yang baik ini disertai pula dengan syarat-syarat yang tidak logis, yaitu :

- a). bahwa keputusan itu syah apabila disetujui oleh Gubernur Kalimantan Ir. Pangerah Mohammad Noor.
- b). membuat resolusi agar Guber menyetujui penggabungan tersebut.¹⁰⁾

Dalam revolusi segala sesuatu harus segera dan cepat dijalankan, dan untuk menghubungi Gubernur Kalimantan di Jawa bukanlah hal mudah, disamping itu masih terdapat suara sumbang bahwa di Kalimantan tidak boleh ada gerakan lain kecuali yang dipimpin oleh golongan Gusti (feodal).

Akibat ketidak pastian keputusan yang diambil karena persyaratan yang tidak rasional, maka BPPKI melakukan tindakan sendiri dengan memutuskan hubungan telpon Hulu Sungai - Banjarmasin, pengrusakan jembatan-jembatan dan sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan Belanda melakukan pembersihan besar-besaran terhadap orang yang dicurigai, yang kesemuanya melumpuhkan gerakan-gerakan rahasia. Operasi pembersihan yang dilakukan Belanda tersebut dilakukan pada tanggal 3 dan 4 Januari 1947, sehingga juga turut melemahkan perjuangan ALRI Divisi IV sendiri.

Dalam situasi ini Markas ALRI Divisi IV dipindahkan ke Tanuhi

9) M. Idwar Saleh, Nasionalisme dan Perjuangan Kemerdekaan di Kalimantan Selatan, Vidya Karya, No. 2, 1970, hal 14.

10) M. Idwar Saleh, op cit, hal 15

100 km dari kota Kandangan di daerah pegunungan di hulu Sungai Amandit. Sementara itu GERPINDOM Birayang juga mengalami kemunduran tetapi segera mengadakan konsolidasi.

Pada tanggal 3 Agustus 1947 mereka menghadang konvoi militer Belanda yang terdiri dari 7 buah truk militer. Pertempuran terjadi di Hambawang Pulasan yang menghancurkan 2 buah truk militer Belanda dengan sejumlah tentara Belanda tewas. Oleh Pemimpin Umum (PU) Hasan Basry mereka dilebur menjadi ALRI Divisi IV.

Markas di Tanuhi terjamin dan aman karena mendapat dukungan dari suku Bukit di sana. Dari markas ini dikeluarkan instruksi untuk membasmi semua spion Belanda, dan pembersihan ini penting artinya bagi perjuangan.

Mengingat bahwa hubungan dengan Markas Perjuangan Kalimantan (MPK) ALRI Divisi IV di Tuban sangat sulit, maka timbul pemikiran agar MPK itu dipindahkan ke Kalimantan, dan memang rencana dari Panglima MPK Letkol Zakaria Madun, MPK ini secara berangsur akan dipindahkan ke Kalimantan.

Untuk sementara instruksi-instruksi hanya dikirimkan lewat kurir dengan resiko ditangkap NICA. Instruksi yang ke empat kalinya yang pernah disampaikan dari MPK Tuban antara lain berbunyi :

- a). melanjutkan usaha-usaha penyelesaian tugas-tugas yang telah berjalan, penyempurnaan organisasi pertahanan ALRI Divisi IV, penerapan petunjuk-petunjuk baru tentang susunan komando.
- b). menggiatkan perlawanan terhadap kekuasaan Belanda secara berencana, perang total dalam segala bidang baik politik maupun ekonomi, perang urat syaraf untuk melumpuhkan semangat dan moril musuh.

Sebaliknya ALRI Div. IV mengusulkan :

- a). segera bantuan alat-alat senjata dapat dikirim,
- b). kalau mengirim senjata atau pasukan sebaiknya melalui udara, tempat penerjunan yang paling aman adalah pegunungan Bulanang di timur kota Kandangan, penyambutan kalau malam dengan unggun api besar segi tiga sebagai tanda, di tengah-tengah sebuah bendera merah putih terhampar dikelilingi obor-obor membentuk segi tiga. ¹¹⁾

Dapatlah digambarkan bahwa hubungan instruksi dari MPK ALRI di Tuban dapat berjalan lancar, meskipun memakan waktu yang agak lambat, dan hal ini akan berbeda sekali setelah persekutuan Linggarjati, dimana hubungan tersebut putus sama sekali.

11) M. Idwar Saleh, op cit, hal 17

III. Sikap perjuangan rakyat setelah Persetujuan Linggarjati

Dengan diparafnya persetujuan Linggarjati jpada tanggal 15 Nopember 1946 oleh kedua delegasi RI dan Belanda yang kemudian disahkan oleh Komite Nasional Pusat pada tanggal 25 Januari 1947, maka kekuasaan pemerintah RI de facto hanya meliputi Jawa-Madura dan Sumatra saja, sedangkan daerah di luar dari ini secara sah dibawah kekuasaan Belanda. Secara resmi pula Pemerintah RI menyerahkan kekuasaan pada Belanda atas daerah-daerah di luar Jawa, Madura dan Sumatera yang berarti Kalimantan dengan para pejuangnya yang sudah bertekad ingin mempertahankan hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, sudah berada di luar dari RI.

Dengan terjadinya agresi Belanda yang pertama terhadap RI sebagai suatu perobekan terhadap persetujuan Linggarjati yang sudah disetujui bersama, Markas Besar ALRI Divisi IV di Tuban dipindahkan ke Madiun disertai dengan perubahan statusnya. Ia sekarang menjadi Mobiele Brigade ALRI dengan komandan Mayor Firmansyah. Letkol Zakaria Madun dipindahkan ke Markas Besar ALRI Pusat, sebagai Perwira Intel. Markas ini berada di bawah komando Mayjen. Dr. Mustopo yang menjabat Komandan Territorial Jawa Timur.¹²⁾

Laporan permintaan bantuan yang harusnya diberikan kepada MPK ALRI Divisi IV Tuban telah disampaikan kepada komandan Brigade ALRI Mayor Firmansyah yang meneruskan permohonan ALRI Divisi IV/A itu kepada Gubernur Kalimantan di Yogyakarta. Pengiriman Tim Kurir ke-5 ke Kalimantan Selatan gagal oleh penangkapan-penangkapan anggotanya di Surabaya oleh Belanda. Oleh karena itu untuk menjelaskan perubahan-perubahan di pusat kepada ALRI Div IV/A tak pernah sampai, sedangkan reorganisasi dan reformasi TNI yang diadakan mengakibatkan Mobiele Brigade ALRI tersebut, dirubah statusnya menjadi kesatuan tempur dengan nama Batalyon X C4/Komando Group Kalimantan dan sebagai unit dari Brigade XVI Komando seberang. Pemimpinnya adalah Mayor Firmansyah. Sejak itu putuslah hubungan ALRI Div. IV/A dengan induk pasukannya di Jawa sampai dengan datangnya Mayjen Suharyo tanggal 2 September 1949 dalam pertemuan di Munggu Raya-Kandangan.

Kalau ALRI Divisi IV Tuban telah dibubarkan, dan cabang-cabangnya di Kalimantan Barat, Timur, Riau mati, maka cabang ALRI Div. IV/A di Kalimantan Selatan tetap hidup dan dari sumber inilah nanti dicetuskan proklamasi pembebasan dan pengiriman pasukan.

ALRI Div. IV/A tetap hidup dan tumbuh karena mendapat dukungan dari rakyat tani dan nelayan dan juga kerjasama dengan tokoh-tokoh politik yang berjuang secara legal dalam Dewan-Banjar. Semangat yang mendorong tetap hidupnya ALRI ini ialah semangat

12) M. Idwar Saleh, op sit, hal 18

nasionalisme agama yang kuat yang telah hidup secara terorganisir sejak berdirinya SI tahun 1912 di Kalimantan Selatan.

Bagi rakyat daerah ini kemudian perjuangan kemerdekaan menegakkan wilayah RI di Kalimantan Selatan menjadi identik dengan ALRI Divisi IV yang dalam bahasa rakyat disebut ALRI.¹³⁾

Hilangnya hubungan dengan pusat inilah yang menguatkan pemikiran dan perhitungan bahwa markas Pertahanan Kalimantan (MPK) ALRI Div. IV perlu segera didirikan di Kalimantan Selatan. Keputusan yang diambil kemudian ialah menghapuskan ALRI Div. IV dan MPK-ALRI Div. IV dijadikan dengan sebutan Sentral Organisasi Perjuangan/Pemberontakan Indonesia Kalimantan (SOPIK) ALRI Divisi IV. kemudian dalam perkembangan organisasi selanjutnya nama ini dikembalikan lagi menjadi MPK ALRI Divisi IV. Komandannya adalah Hasan Basry, bekas komandan ALRI Div. IV dengan sebutan pangkat tetap Pimpinan Umum (PU).

ALRI Divisi IV menyusun kekuatan

Penggabungan dengan gerakan kelayakaran lainnya menyebabkan bertambah kuatnya ALRI Div. IV, seperti dengan Gerpindom pimpinan H. Aberani Sulaiman, Banteng Borneo pimpinan A. Hamy, Badan Pemberontak Indonesia pimpinan Hamdi Budhigawis, sehingga akhir tahun 1948 dan awal tahun 1949 ALRI Div. IV cukup besar pengaruhnya dan pasukannya cukup kuat, kecuali hanya MTKI yang saat itu belum menggabungkan ke dalam ALRI Divisi IV.

ALRI Divisi IV kemudian membentuk organisasi sebagai Markas Besar dengan kedudukan di Barayang yang dikenal sebagai Markas Besar RX-8 ALRI Divisi IV/A.¹⁴⁾ Selanjutnya dalam penyusunan organisasi disusunlah hierarchi pemerintahan sebagai berikut :

- a. Pimpinan Markas Besar
- b. Pimpinan Markas Daerah
- c. Pimpinan Markas Pangkalan

Pimpinan Markas Besar tetap Hasan Basry dengan sebutan Pimpinan Umum (P U), Markas -Markas daerah dibentuk dengan sandi tertentu seperti misalnya :

- Markas Daerah batumandi/Balangan : Markas Daerah B-27
- Markas Daerah Amuntai Selatan : Markas Daerah BN-5.U
- Markas Daerah Kandangan : Markas Daerah K-1
- Markas Daerah Rantau : Markas Daerah 0-½.17
- Markas Daerah Cantung-sampanahan: Markas Daerah PD-10
- Markas daerah Marabahan-Dayak Besar : Markas Daerah BN-10
- Markas Daerah Barabai/Pagat : Markas daerah Z-61
- dan lain-lain (lihat lampiran).

13) M. Idwar Saleh, op cit, hal 18

14) Sejarah Kalimantan Selatan, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Dept. P dan K 1977 / 78, hal 178.

Markas Pangkalan mempunyai kekuatan pasukan cadangan yang disebut "Riwas". Markas Pangkalan masih membawahi beberapa buah Markas Seksi, 10 sampai 15 Markas Seksi, yang berkedudukan di desa. Markas Seksi mempunyai pula kekuatan yang tidak resmi yang dikenal dengan sebutan "hahawar ambun" (bahasa banjar, hahawar artinya orang yang menghawar, atau orang yang memukul-mukul embun, ambun = embun).

Tugas Pokok Markas Pangkalan adalah :

- mengadakan penyergapan terhadap pos-pos Belanda yang terdekat dengan daerahnya untuk memperoleh senjata dan melumpuhkan musuh.
- mengadakan penyanggulan (penghadangan) dan rintangan di jalan agar pengiriman perbekalan Belanda terputus.
- mengumpulkan dana perjuangan yang diambil dari rakyat melewati Markas Seksi di tiap desa.

Untuk menghadapi ini Belanda-NICA membentuk kekuatan kontra perjuangan dengan membentuk gerakan rahasia yang bernama PAIM (Partai anti Indonesia Merdeka) yang diketuai oleh Kiai Merah Nadalsyah dengan barisan bersenjata yang bernama "Barisan parang Bungkul" 15)

Anggota PAIM bertugas sebagai petunjuk jalan pasukan NICA yang melakukan penyerangan terhadap Markas ALRI Div. IV dan ternyata berhasil, seperti terjadi pada pertempuran di Janggar pada bulan Desember 1947 dekat gunung Menteng dan yang kedua pada bulan Mei 1948 di kaki gunung Ambilik. ALRI membalas taktik Belanda ini penyergapan terhadap pos-pos NICA yang terpencil dan membentuk pasukan berjibaku yang bertuas di kota, di pasar-pasar untuk merebut senjata.

Persetujuan Linggarjati seperti telah dijelaskan, adalah suatu tindakan yang mensahkan pemerintah Belanda menjajah Kalimantan dan dengan kekuatan kolonialnya berusaha untuk menghancurkan perjuangan rakyat Kalimantan. Dengan dasar inilah pemerintah Belanda menganggap bahwa ALRI Divisi IV adalah organisasi teror, pengacau dalam negara yang sah dan disebut sebagai kaum extremist, seperti apa yang disebut oleh Residen Borneo Selatan A.G. Deelman dalam suratnya yang ditujukan pada Kuta Dewan Banjar tertanggal 20 Desember 1948. (terlampir).

Keputusan KNIP yang menerima Persetujuan Linggarjati ini menimbulkan suasana hangat dan timbul keresahan di kalangan rakyat Kalimantan Selatan. Keresahan-keresahan itu tercermin dari sikap rakyat dalam beberapa kongres dan rapat-rapat, antara lain :

15) Kiji adalah jabatan pamong praja dalam pemerintahan Belanda.

Kni - Camat, Kiai Besar = Bupati

Parang Bungkul = parang yang lengkung keluar berlawanan dengan arit yang lengkung ke dalam.

- a. Diadakannya Kongres Pemuda yang tergabung dalam pelbagai organisasi, yaitu PPI (Persatuan Pemuda Indonesia) yang bergabung menjadi GAPPIKA (Gabungan Pemuda Pemuda Indonesia Kalimantan). Kongres ini berlangsung di Kandangan pada tanggal 17 Maret 1947. Kongres yang ditokohi oleh H.M. Rusli ini merupakan suatu gelombang tekad rakyat, pemuda pemudi Kalimantan Menentang keputusan Persetujuan Linggarjati dan tetap mendesak agar daerah Kalimantan tetap menjadi wilayah Republik Indonesia. ¹⁶⁾
- b. Rapat luar biasa S.K.I. (Serikat Kerakyatan Indonesia) pada tanggal 11 Mei 1947 mendesak kepada R.I. dan Belanda agar mengadakan muktamar untuk menentukan status Kalimantan. Keputusan rapat luar biasa SKI ini mendapat dukungan dari organisasi-organisasi lain, seperti : PPI, Perwani, Wanita SERMI, Perpi dll. Malah organisasi tersebut lebih tegas dalam tuntutanannya agar Kalimantan Selatan selekas mungkin dijadikan bagian dari R.I. ¹⁷⁾
- c. Kongres Umat Islam Kalimantan yang diadakan oleh SERMI pada tanggal 15 Juni 1947 di Amuntai, pada dasarnya seirama dengan keputusan dan keinginan S.K.I. ¹⁸⁾
- d. disusul pula pernyataan-pernyataan yang sama yang dikeluarkan oleh I.N.I. (Ikatan Nasional Indonesia) di Kalimantan Timur GAPI (Gabungan Persatuan Indonesia) di Kalimantan barat ¹⁹⁾

Pernyataan-pernyataan tersebut mendapat reaksi keras dari pemerintah Belanda-NICA, terlebih-lebih terhadap Kongres Umat Islam Kalimantan. Para tokoh yang mengikuti kongres tersebut mendapat tekanan keras dan diantaranya ditangkap oleh Belanda, seperti Danil Bangsawan, Zafri Zamzam, H.M. Rusli, H. Marzuki, sedangkan H. Hasan Suni dapat lolos dan lari menggabungkan diri dengan badan kelayakaran untuk turut bergerilya. ²⁰⁾

Untuk menghadapi politik divide et impera Belanda dengan segala aktivitasnya, S.K.I. dan SERMI membentuk badan koordinasi terutama menghadapi konsep federalisme Belanda. Pertemuan diadakan di Banjarmasin pada tanggal 1 Juni 1947, dilanjutkan pada tanggal 8 Juni 1947 yang menetapkan R. Sa'ban sebagai Ketua Badan Koordinasi terpaksa menerima pembentukan Dewan Banjar dalam suatu siasat perjuangan agar dapat membelokkan konsep Belanda yang semula bertujuan terbentuknya negara bagian untuk Kalimantan.

16) Kodam X/LM, Kodam XLM Membangun, 1962, hal 464

17) A. Gafuri, Sejarah Perjuangan Gerilya Menegakkan Republik Indonesia dik Kalimantan Selatan (1945 - 1949). Skripsi, FKIS- IKIP Malang, 1968, hal. 77

18) Ibid, hal 78.

19) Syarifuddin, op cit, hal 166.

20) Sejarah Daerah Kalimantan Selatan, op cit, hal 180

Persetujuan Perjanjian Renville memungkinkan lebih jauh kekuasaan Belanda untuk membentuk negara-negara boneka lainnya. Sejak pertemuan Renville tanah atau wilayah Indonesia telah terbagi dua bagian yaitu :

- a. Daerah Republik Indonesia yang berpusat di Jogja.
- b. Daerah Federal dengan Badan Permusyawaratan Federalnya atau BFO.

Di Kalimantan Selatan terbentuk Dewan Banjar dengan ketetapan pemerintah Belanda No. 1 tanggal 14 Januari 1948 yang tercantum dalam Staatsblad No. 14 tahun 1948, yang disusul dengan beslit tambahan Pembentukan daerah Banjar tanggal 24 Juni 1948, No. 2 Stb. 1948, no. 124. (2) Badan ini dibentuk sementara negara Kalimantan belum berdiri.

SKI dan SERMI mengatur siasat perjuangan dalam perebutan untuk duduk dalam Dewan. Siasat SKI dan SERMI ini berhasil dalam kampanye pemilihan dan memenangkan 60% suara dari jumlah kursi yang diperebutkan, yaitu 35 kursi anggota. Usaha selanjutnya ialah dalam persidangan dewan dan berhasil dalam pemilihan Pengurus Harian, Golongan Republikan berhasil mendudukkan 5 orang wakilnya dari 7 orang Pengurus Harian yg diperebutkan. ²²⁾

Belanda berusaha untuk mengimbangi kemenangan golongan Republikan ini dengan memperlambat persetujuan Peraturan Daerah oleh Residen Borneo Selatan, disamping itu Belanda menangkap tokoh-tokoh beberapa anggota Dewan yang terpilih, antara lain : h. Subli, Adi Saputra dan Zafri Zamzam. Situasi genting inilah yang menyebabkan tokoh-tokoh SKI dan SERMI mengadakan konsultasi dengan pimpinan ALRI Divisi IV dengan hasil pembicaraan bahwa SKI dan SERMI harus tetap pada dasar perjuangan yaitu berpihak pada Republik Indonesia dalam dewan Banjar.

Meskipun secara organisasi tidak ada hubungan antara anggota Republikan dalam Dewan Banjar dengan ALRI Divisi IV tetapi secara rahasia selalu mengadakan hubungan dan saling informasi. Sebagai contoh kerjasama itu antara lain adalah :

- sebagai anggota Dewan mereka selalu mendapat informasi dari Belanda untuk disampaikan ke pedalaman. ²³⁾
- sebagai anggota Dewan mereka berusaha untuk melicinkan jalannya perjuangan gerilya ALRI Divisi IV. ²⁴⁾

Hubungan seperti ini berlangsung lama dan ternyata sangat menguntungkan. Tetapi hubungan baik kemudian terputus ketika pada suatu saat Anggota Dewan menerima konsep Belanda dalam

21) H. Ramli Nawawi, Dewan Banjar. Skripsi. FKG UNLAM, Banjarmasin tahun 1972, hal 21

22) Sanit Seman, Sejarah Politik Pendudukan Belanda di Kalimantan Selatan. Skripsi, FKG -UNLAM, Banjarmasin, th. 1972, hal. 66

23) Pedalaman adalah Bahasa rakyat untuk menyebutkan Markas ALRI.

24) M. Idwar saleh, op cit. hal 18

pembentukan Negara Kalimantan. Hal ini menyebabkan Pimpinan ALRI Divisi IV tidak mempercayai lagi terhadap Dewan banjar dan mengusulkan agar Dewan ini dibubarkan dengan surat yang ditandatangani oleh Gubernur Tentara yang disampaikan oleh P. Arya dan Gt. Aman, dan ditujukan kepada anggota Dewan yang diperkirakan memihak pada perjuangan.

Proklamasi Gubernur Tentara Program perjuangannya.

Organisasi perjuangan dan program perjuangan telah mendapat perhatian yang serius dari pemimpin-pemimpin ALRI Divisi IV/A yang program selanjutnya untuk menyusun pemerintahan di Kalimantan Selatan pada masa yang akan datang. Hal ini terbukti telah dipikirkan konsep untuk mendirikan :

- Komite Nasional Indonesia
- Mendirikan Partai Republik Indonesia Kalimantan (PRIK) yang akan menjadi tulang punggung perjuangan K.N.I.

Pembicaraan yang keempat kalinya di Padang Batung (Kandangan) yang dihadiri oleh H. Aberani Sulaiman, Hamdi Budhigawis H. Damanhuri, Daeng Ladjida, Gt. Aman dan Maximle Meity membicarakan tentang struktur organisasi ALRI Divisi IV/A, disamping membicarakan bidang politik, sosial ekonomi dan sebagainya. Konsep ini kemudian dibicarakan lagi dalam pertemuan yang lebih besar yang dihadiri oleh PU (Pimpinan Umum) Hasan Basry pada tanggal 9 dan 10 Mei 1949.

Dengan mengambil tempat di Ambarawa (Telaga Langsung) pertemuan lanjutan membicarakan tentang konsep Pemerintahan Gubernur Tentara sebagai suatu tandingan terhadap kekuatan militer Belanda. Yang hadir pada pertemuan ini hanya H. Aberani Sulaiman, Gt. Aman, Maximle Miety, Hamdi Budhigawis dan Romansi, pada 15 Mei 1949. Pertemuan ini mengambil keputusan :

- a. Memproklamkan Pemerintahan Gubernur Tentara guna mengatasi masalah politik, tata pemerintahan dan masyarakat.
- b. Mengatur ekonomi dengan mendirikan koperasi-koperasi dengan tujuan mengubah struktur ekonomi kolonial ke perekonomian revolusioner.
- c. Menembus blokadi NICA agar perjuangan Kalimantan dapat diketahui Republik Indonesia dan dunia ²⁵⁾

Konsep Proklamasi selesai menjelang 16 Mei dan proses verbal tentang hasil rapat ditandatangani oleh H. Aberani Sulaiman; Hamdi Budhigawis, Gt. Aman, Maxim dan Romansi untuk disampaikan

25) H. Hasa Basry. Kisah Gerilya jilid II, naskah yang belum diterbitkan.

kan kepada PU Hasan Basry yang bermarkas besar di Niih (jarak dari Telaga Langsung dengan Niih, satu hari berjalan kaki melalui hutan rimba pegunungan).

Dengan disaksikan oleh masyarakat Niih, Pimpinan Umum Hasan Basry dan tokoh-tokoh pimpinan ALRI lainnya, Proklamasi diumumkan yang berbunyi :

PROKLAMASI

Merdeka,

Dengan ini Kami Rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan, mem-permakloemkan berdirinya Pemerintahan Goebornoer Tentara dari ALRI melingkoepi seloeroeh daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Repoeblik Indonesia, oentoek memenoehi isi Proklamasi 17 Agoestoes 1945 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Hal-hal yang bersangkoetan dengan pemindahan kekoesaan akan dipertahankan dan kalaoe perloe diperdjoengkan sampai tetes darah yang penghabisan.

Tetap merdeka
Kandangan, 17 Mai IV Rep.
a.n. Rakyat Indonesia di Kalimantan
Selatan
Goebornoer Tentara,

Hasan Basry. ²⁶⁾

Dengan diumungkannya Proklamasi 17 Mei tersebut, dimaksud-agar :

- a. Untuk menyatkan kepada masyarakat dan Pemerintah Republik Indonesia serta dnia bahwa gerilya ALRI Divisi iv Pertahanan Kalimantan itu yang berada di wilayah Belanda-NICA benar-benar ada dan mempunyai kekuatan dan kemampuan yang cukup untuk menyusun suatu Pemerintahan Indonesia.
- b. menyatukan Pimpinan dan Organisasi perjuangan ke dalam satu pimpinan yang berbentuk Pemerintahan Gubernur Tentara.
- c. Disamping itu untuk mengisi kekosongan Pemerintahan karena Asisten-Aseisten Kiai Belanda ditarik dari pos-posnya. Karena setelah terjadi serangan-serangan gerilya terhadap Kota Kandangan, Nica terpaksa menarik orang-orang pemerintahannya yang kemudian ditempatkan di Banjarmasin. ²⁷⁾

26) H. Hasan Basry, op cit.

27) Hamdi Budhigawis, op cit, hal 8

**Personalia Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV
Pertahanan Kalimantan, sebagai berikut :**

1. Gubernur Tentara/Panglima Divisi : Hasan Basry
2. Kepala Staf : H. Aberani Sulaiman
3. Kepala Departemen Pertahanan : H. Hamy alias Banteng Borneo
4. Kepala Departemen Urusan Umum : Hasan Basry
5. Wk. Kep. Departemen Ur. Umum : P. Arya
6. Kep. Depart. Tata Pemerintahan : H. Aberani Sulaiman
7. Wk. Kep. Depart. Tata Pemerintahan: Gusti Aman
8. Kepala Departemen Keuangan : Maximle Miety
9. Wk. Kep. Departemen Keuangan : Hasnan Basuki
10. Kepala Departemen Penerangan : Budhigawis
11. Wk. Kep. Depart. Penerangan : Amin (Isah)
12. Kep. Departemen Urusan Agama : H. Hasa Mugni Marwan
13. Depart. Infiltrasi dan Tenaga dan Potensi : M. Nurdin. ²⁸⁾

Program perjuangan yang telah ditetapkan :

- Membentuk dan menjalankan Pemerintahan Gubernur Tentara.
- Membagi Kalimantan Selatan dalam 3 wilayah/Daerah Besar, yaitu : a. Daerah Besar Utara meliputi Amuntai, Tanjung dan Kelua, dengan pimpinan komandan militer Resimen I, b. Daerah Besar Tengah, meliputi Kandangan, Ran tau, Negara, Barabai dengan pimpinan komandan militer Resimen II. c. Daerah Besar Selatan, meliputi Banjarmasin, Martapura, Pleihari, Kotabaru, Barito Kuala, Dayak Besar (Kalimantan Tengah).
- Membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah Kalimantan.
- Membentuk kehidupan beragama yang urusannya dikelola oleh Alim Ulama.
- Memperbanyak senjata dengan berbagai cara. (membuat senjata granat, pistol).
- memperhebat propaganda perjuangan untuk kemenangan ALRI
- Mengatur perekonomian rakyat dengan cara :
 - a. mengusahakan biaya perjuangan
 - b. mengembangkan koperasi,
 - c. menghancurkan perekonomian Belanda dengan blokade ekonomi.
 - d. mengadakan uang Republik (uang ORI) ²⁹⁾

²⁸⁾ Hasan Basry, op cit

²⁹⁾ M. Idwar Saleh, op cit, hal 27 - 28

Pada rapat pimpinan Gubernur Tentara, 3 Juli 1949 ditetapkan lagi hal-hal sebagai berikut :

- Markas-markas daerah dan Markas Seksi dihapuskan dan diganti dengan nama kampung asalnya dan kemudian diadakan pemilihan untuk memilih kepala kampung.
- Mengizinkan kembali dibukanya rumah asap, remeling dan diharuskan perdagangan lewat koperasi.
- Menetapkan pangkat-pangkat militer. Untuk seluruh daerah Gubernur Tentara ALRI ditetapkan pangkat militernya dan jabatannya, pangkat tertinggi adalah Gubernur Tentara dengan pangkat Letnan Kolonel. Pangkat dan jabatan itu antara lain :
 - a. H. Aberani Sulaiman, Kepala Staf merangkap komandan daerah Utara berpangkat Mayor.
 - b. P. Arya atau Maxim Le miety, komandan Daerah Besar Selatan yang kemudian menjadi Markas Besar Alam Roh, berpangkat Mayor.
 - c. Martinue, Komandan Resimen I, menguasai daerah Utara berkedudukan di Pasar Arba, TANjung, berpangkat Letnan Satu.
 - d. Damanhuri, Komandan Resimen II bagian Tengah menguasai Hulu Sungai TEngah dan Selatan, berkedudukan di Padang Batung, berpangkat Letnan Satu.
 - e. Rustam, Komandan Resimen III, menguasai daerah Selatan, Banjarmasin, Martapura, Kapuas, Sampit, berkedudukan di Sampit, berpangkat Letnan Satu.
- Melarang penduduk Kalimantan Selatan Naik Haji,
- Merealisir pembentukan Polisi Tentara dan Polisi Negara.
- Mengumumkan SOB dalam daerah hukum Gubernur Tentara ³⁰⁾

Keputusan pimpinan Gubernur Tentara tertanggal 7 Agustus 1949, menetapkan sebagai berikut :

- a. Penetapan pajak dan cukai
- b. Pembentukan Komisi umum,
 - Komisi Umum menjadi Kepala Pemerintahan dalam lingkungan daerah kekuasaannya dan merangkap Panglima Tentara.
 - Komisi umum menjadi Koordinator keamanan dalam daerah lingkungannya.
 - Komisi Umum adalah merupakan daerah propinsi tentara. Jabatan Komisi Umum tersebut adalah sebagai berikut :
 - H. Aberani Sulaiman : Komisi Umum daerah Barabai
 - Gusti Aman : Komisi Umum daerah Kandungan/Ranta.
 - M. Hamy A.M. : Komisi Umum daerah Amuntai/Tanjung.

30) H. Hasan Basry, op cit

- HAH. Budhigawis : Komisi Umum Daerah Negara.
Hasnan Basuki : Komisi Umum daerah Martapura dan
- P. Arya : Komisi Umum daerah Banjarmasin.

c. Reorganisasi pasukan-pasukan Riwas. ³¹⁾

Puncak perjuangan dan kesan terakhir

Dalam pesanggrahan Munggu Raya yang bersejarah, May.Jen. Suharjo mengucapkan perintah sebagai Inspektur Jenderal APRI meresmikan ALRI Divisi IV Kalimantan sebagai bagian dari TNI dan meresmikan Hasan Basry sebagai Panglimanya dengan pangkat Letnan Kolonel dan kepada Letkol Hasan Basry diperintahkan dalam tempo 14 hari diadakan perundingan dengan pihak Belanda mengenai penghentian tembak menembak. Demikianlah ALRI Divisi IV yang dibubarkan oleh R.I. pada tahun 1947 setelah agresi militer Belanda I kembali menjadi hidup menjadi ALRI Div. IV/A Kalimantan Selatan.

Dengan cease fire Munggu Raya (2 September 1949), tugas May.Jen. Soeharjo selesai tetapi bagi ALRI Div. IV menghadapi situasi yang lebih gawat, karena antara lain :

- Perundingan dilakukan tanpa garis demarkasi,
- tanpa persaksian pihak ketiga,
- tanpa mempunyai hak yuridis untuk melarang Belanda memasuki wilayah ALRI untuk tidak dipersalahkan melanggar penghentian tembak menembak,
- dari dalam ALRI dirongrong oleh MTKI yang sebelumnya telah menyatakan melebur ke dalam ALRI Div. IV/A.

Situasi ini dipergunakan Belanda sebaik-baiknya dan dengan cara mengulur-ulur waktu perundingan, Belanda berusaha, menamabah persenjataan, pasukan Polisi Kilat Cakra dan Belanda selalu mengadakan tekanan dengan serang-serangan.

Disamping itu Pemerintah Belanda memulihkan kembali pemerintahannya, dewan federal kembali berfungsi, dan anggotanya kembali melaporkan diri untuk aktif kembali. Dan sementara itu perundingan-perundingan militer berkali-kali diadakan selalu buntu. Perundingan diadakan di Troepen Commando dekat getek Telawang. Dari pihak Belanda ialah Letkol Veenendal, Mayor Couvreur, Kapten Snijder dan seorang Sekretaris, sedangkan di pihak ALRI Div. IV ialah : Mayor P. Arya, Kapten Gusti aman dan Sekretaris Mas Soenaryo. (1)

Pihak ALRI menghendaki agar Pemerintah Darurat dan K.N.I.

³¹⁾ M. Idwar Saleh, op cit, hal 25, No. 4

dsetujui lebih dahulu oleh Belanda dan apabila KNI menyetujui penghentian tembak menembak, barulah dapat dijalankan penghentian tembak menembak tersebut, sedangkan pihak Belanda menganggap bahwa Mayjen Soeharjo tidak menyinggung masalah Pemerintahan Darurat tersebut. Memang ALRI telah diakui sebagai bagian dari TNI, tetapi daerah atau pemerintahan tempat/wilayah ALRI itu tidak diakui.

Pemerintah Belanda melapor pada R.I. tentang perundingan yang selalu buntu, sehingga datanglah kembali Mayjen. Soeharjo bersama Letkol Jayadiningrat dari ALRI bersama sebuah delegasi militer yang diketuai oleh Letkol Sukanda Bratamanggala

Sejak itu mulailah secara sistimatis riwayat ALRI Divisi IV/A dihancurkan, yaitu oleh tokoh-tokoh politik federalis, tokoh kota BANjarmasin, bahkan beberapa pejuang de facto memprotes penguatan terhadap ALRI Div. IV/A, karena pbertentangan dengan perintah dan instruksi yang dikeluarkan pada saat pembubaran ALRI Div. IV Jawa (1947) dan dihapuskannya jabatan Gubernur,

Sistimatika penghancuran itu adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 1 Nopember 1949, ALRI Div. IV dirubah menjadi Divisi Lambung Mangkurat.
2. Letkol Hasan Basry digeser jabatannya dan diberi jabatan sebagai Sub Teritorial Militer III dan dipisahkan dari stafnya,
3. H. Damanhuri, ex. Letkol Zakaria Madun Ex Komandan ALRI Div. IV Jawa yang datang ke Kalimantan disuruh tangkap oleh Letkol Hasan Basry, padahal Hasan Basry tidak mengetahui sama sekali
4. Kapten M. Hamy AM dipindahkan ke Pontianak dan tak lama kemudian keluar dari tentara.
5. Dalam bulan Januari 1950 Letnan I MS Rusman bersama 40 orang perwira dan bintara bawahannya dikirim ke Jogja untuk kuliah aplikasi pada Akademi Militer. Pengiriman ini tidak ada pemberitahuan lebih dahulu ke Jogja, dan hanya satu orang dari 40 ini yang lulus.
6. Ibnu Hajar yang diberi tugas di Pontianak, setelah kembali mendapat perlakuan yang menyakitkan hati, karena perbedaan fasilitas dengan pasukan dari Jawa, patah hati dan bergerilya kembali sebagai pengacau.
7. Akhirnya Letkol Hasan Basry ditugas belajarkan ke Al Azhar Cairo.
8. Letnan Hasan Basuki, Kapten Gusti Aman, Letnan MR Rusman, Letnan M. Yunus dan tokoh-tokoh ALRI lainnya di CTNkan, sehingga pasukan inti dari ALRI sangat sedikit sekali, sisanya dikembalikan ke masyarakat dengan surat tanda penghargaan ditambah 3 jar tekstil dan uang Rp. 50,-

Divisi Lambung Mangkurat akhirnya diganti menjadi T.T. VI Tanjungpura dan sejak itu hilanglah bekas-bekas perjuangan ALRI

Divisi IV/A Kalimantan, dan ditetapkan bahwa Kalimantan tak pernah ikut dalam perjuangan bersenjata, karena perjuangan itu dilakukan oleh gerilya kesiangan yang baru bergerak setelah cease fire diadakan, dan karena itu di Kalimantan tidak berlaku P.P. no. 6 tahun 1950. Untuk Kalimantan tidak diperlukan anggaran dari Biro Rekonstruksi Nasional, dan 10 tahun kemudian ketika upacara pembukaan Cabang Bank Dagang Negara di Banjarmasin, seorang pembesar dalam upacara resmi itu berkata :

"Kalimanta tak jpernah ikut memperjuangkan kemerdekaan namun begitu sama-sama diberi kesempatan untuk membangun sama dengan daerah yang berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan Indonesia".¹²⁾

Tragis dan suatu kenyataan !

12) M. Idwar Saleh, op cit, H. Hasan Basry, op cit, dan hasil wawancara dengan P. Arya, Gusti alam.

IV. PENUTUP /KESIMPULAN

Rakyat Kalimantan Selatan telah membuktikan semangat perjuangannya yang gigih, menghimpun potensi dan kekuatan rakyat yang ada dengan mengkoordinir wadah perjuangan bersenjata dengan nama ALRI Divisi IV/A Pertahanan Kalimantan.

Persetujuan Linggarjati memutuskan hubungan perjuangan Kalimantan dengan induk pimpinan ALRI Divisi IV Jawa dan memutuskan hubungan dengan RI dan menghapuskan status Gubernur Kalimantan, pejuang Kalimantan dianggap Belanda sebagai pengacau dalam negara yang sah. Akibat dari putusannya hubungan ini, kalau ALRI Div. IV Jawa dibubarkan dan diganti dengan struktur baru, ALRI Div. IV/A Kalimantan Selatan tetap hidup.

Persetujuan Linggarjati mempunyai pengaruh yang besar terhadap taktik perjuangan bersenjata ALRI Div. IV/A yang antara lain bahwa ALRI Div. IV/D harus mampu menyusun perjuangan sendiri, menyusun kekuatan sendiri dengan pembagian wilayah militer, menetapkan tanda pangkat militer sebagai suatu tandingan terhadap kekuatan militer Belanda-NICA.

Meskipun Belanda telah berusaha memisahkan Kalimantan dari RI dengan menyusun pemerintahan federal dalam rangka pembentukan Negara Kalimantan, Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV/A Pertahanan Kalimantan telah menjawab bahwa tekad rakyat Kalimantan adalah Kalimantan Selatan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia.

Akhirnya perjuangan ALRI Div. IV/A dan apa yang telah disumbangkannya untuk menegakkan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan, disudutkan, dan akhirnya dianggap sebagai pahlawan kesiangan. Tragis dan memang kenyataan.

Saran-saran

Menyarankan agar tindak lanjut dari Seminar Sejarah Nasional ke III ini untuk dapat mengadakan penelitian yang mendalam terhadap perjuangan rakyat di Kalimantan Selatan, agar image negatif tersebut dapat dihilangkan dengan dasar-dasar penelitian ilmiah

dan sangat berguna bagi persatuan dan menghilangkan anggapan bahwa hanya sebagian dari bangsa Indonesia ini yang berjuang untuk memenangkan perjuangan bangsa.

DAFTAR BACAAN

1. A. Gafuri, Sejarah Perjuangan Gerilya menegakkan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan (1945-1949), Tesis, FKIS-IKIP Malang, 1968.
2. H. Hasan Basry, Brigjen Kisah Gerilya Kalimantan, yayasan Lektur Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 1961
3. H. Hasan Basry, Brigjen, Kisah Gerilya Kalimantan , jilid II, naskah yang belum diterbitkan.
4. H. Ramli Nawasi, Dewan Banjar, Skripsi, FKg.-Unlam Banjarmasin 1972.
5. IDKD, Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Kalimantan Selatan, Departemen P dan K, 1979.
6. Kodam X/LM, Kodam X/LM Membangun, Banjarmasin, 1962
7. M. Idwar Saleh, Nasionalisme dan Perjuangan Kemerdekaan di Kalimantan Selatan, Vidya Karya no. 1, no. 2, no. 3 dan no. 4 Fkg. - Unlam Banjarmasin, 1970
8. M. Budhigawis, Letkol, Laporan dari Munggu Raya, Borsur.
9. Syarifuddin, Sikap Pergerakan Rakyat Menghadapi Belanda di Kalimantan Selatan, Periode 1945 sampai 17 Agustus 1950, Tesis FKg-Unlam, Banjarmasin, 1974.
10. Tjilik Riwut, Kalimantan Membangun, 1979.

LAMPIRAN I Surat Residen Borneo Selatan.

SALINAN : dari Notulen Rapat Dewan Banjar tanggal 31 Maret.

Banjarmasin, 20 Np. 1948.

Nomor : 56 I/12

Lamp. : 2

Pokok : Keadaan politik, pengacau dan extremismisme dalam daerah Banjar.

Kepada

Ketoea Desa Bandjar
di Banjarmasin.

Bersama ini dengan hormat diminta perhatian Padoeka Toean tentang hal yang berikoet.

Baik Toean maepoen Anggota2 dari Dewan Bandjar tentoe telah mengetahoei, bahwa di Hoeloe Soengai, dalam beberapa boelan yang terakhir ini terdjadi keroesoehan dengan tjara besar2an, yang sedari permulaan boelan Nopember jang laloe telah bertambah begitoe hebat. Tetapi oemoem beloem mengetahoei, apa jang sebenarnja telah terdjadi.

Agar Toean dan Anggota2 Dewan mengetahoei tentang perlunyadiambil beberapa tindakan dengan in saja lampirkan soeatoe tjatatan tentang pengatjaoean2 jang dilakoekan dan kenjataan2 jang lainnya di Hoeloe Soengai dari tanggal 1 Nopember jang laloe. Sebagian besar dari pengatjaoean ini ternjata dengan terang bahwa hal2 ini dilakoekan oleh gerombolan2 jang bersendjata modern dan berpakaian oeniform, jang bertindak atas nama Repoeblik Djokja, sisanya dilakoekan oleh orang2 pendoedoek jang ikoet toeroet2an. Disamping itoe Toean akan lihat soeatoe tjatatan dari orang2, terhadap siapa soedah diambil tindakan2. Dari orang2 ini ternjata adanja keterangan bahwa mereka telah memberikan pertolongan dan kerdja sama kepada gerombolan2 jang bertanggung djawab atas kekatjaoean di Hoeloe Soengai.

Orang itoe telah diinternir.

Soedah tentoe aksi dari kaoem pengatjaoe ini tidak dapat diterima dalam soeatoe negara jang berada, menimboelkan reaksi dari pembesar2 jang bertanggung djawab oentoek keamanan dan ketentraman.

Sekarang adalah tergantoeng dari sikap kaoem pendoedoek sendiri, tindakan2 apa jang akan haroes diambil selanjutnya.

Pengatjaoan seterusnya tentoe akan memerloekan penangkapan-penangkapan lebih landjoet dan moengkin diambil tindakan2 jang lebih keras.

Resident Borneo Selatan

dt. A. G. Deelman.

LAMPIRAN II (Sumber dari Legiun Veteran Kal-Sel),

Daftar susunan Markas Daerah, Markas Pangkalan dan Markas Seksi

1. Markas daerah dan Markas Pangkalan serta Markas Seksi adalah organisasi teritorial dari ALRI Divisi IV/A. Markas Daerah membawahi beberapa Markas Pangkalan dan Markas Pangkalan membawahi beberapa Markas Seksi.
2. Kepada Markas Daerah adalah juga komandan Sektor, tetapi kadang-kadang jabatan komandan Sektor tidak dirangkap oleh Kepala Markas Daerah. Komandan Sektor membawahi Batalyon Territorial.
3. Kepala Pangkalan adalah juga Komandan Kompi Territorial, tetapi kadang-kadang Komandan Kompi Territorial tidak dirangkap oleh Kepala Markas Pangkalan.

4. Organisasi :

Markas Daerah,

- a. Kepala Markas Daerah/Komandan Sektor
- b. Wkl. Kepala Markas Daerah/Wk. Komandan Sektor
- c. Sekretaris
- d. Bagian Keuangan/Supply
- e. Bagian Penyelidikan/Security/Kepolisian
- f. Bagian Persenjataan/Perlengkapan
- g. Bagian Penghubung/Pengangkutan
- h. Bagian Pengerahan.

Markas Pangkalan,

- a. Kepala Markas Pangkalan/Komandan Kompi
- b. Wk. Kep. Markas Pangkalan/Wk. Komandan Kompi
- c. Bagian Perbendaharaan
- d. Bagian Pengumpulan/Penyimpanan
- e. Bagian Pengawasan/Penyelidikan
- f. Bagian Perhubungan/Pengerahan.

Markas Seksi,

- a. Kepala Markas Seksi
- b. Bagian Pengumpulan/Penyimpanan
- c. Bagian Penyerahan/Penyelidikan.

5. Markas Daerah dinamakan dengan pemberian nama samaran dan kode. Markas Pangkalan juga demikian, tetapi kadang-kadang disebutkan nama aslinya. Kalau ini terjadi sebaliknya nama Kepala Markas disamakan.
6. MPK ALRI Div. IV/A sendiri mempunyai kode : RXOOZ-½
7. Daftar daerah-daerah :

Daerah Baturandi/Balangan	:	Markas Daerah B-27
Daerah Paringin	:	Markas Daerah R-27
Daerah Lampihong Kanan	:	Markas Daerah R-10
Daerah Lampihong Kiwa	:	Markas Daerah R-13

- | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------------|
| Daerah Tanjung/Haruai | : | Markas Daerah X-7 |
| Daerah Amuntai Utara | : | Markas Daerah BN-5.U |
| Daerah Kalua | : | Markas Daerah BN-8 |
| Daerah Alabio | : | Markas Daerah BS-10
Gajah Mada. |
| Daerah Danau Panggang | : | Markas Daerah BA-3 |
| Daerah Birayang/Batang Alai | : | Markas Daerah R-7 |
| Daerah Ilung/Jambu | : | Markas Daerah R-2 |
| Daerah Pantai Habawang | : | Markas Daerah O-12 |
| Daerah Kandangan Utara | : | Markas Daerah K.18.U |
| Daerah Kandangan | : | markas Daerah K-1 |
| Daerah Rantau/Tambarangan | : | Markas Daerah 0-½.17 |
| Daerah Margasari | : | Markas Daerah Tapin Hilir |
| Daerah Barabai/Pagat | : | Markas Daerah Z-61 |
| Daerah Pangaron | : | Markas Daerah Ps-14 |
| Daerah Martapura | : | Markas Daerah Kota Celap |
| Daerah Bati-Bati | : | Markas Daerah Bati-Bati |
| Daerah Pleihari | : | Markas Daerah Pleihari |
| Daerah Gambut | : | Markas Daerah Ps-6.Djk. |
| Daerah Banjarmasin | : | Markas Daerah Ps-6.St.Banta |
| Daerah Kelayan/Jambu Burung | : | Markas Daerah Ps-6,
SOPIK Jakarta. |
| Daerah Cantung/Sampanahan | : | Markas Daerah PD-10 |
| Daerah Batulicin | : | Markas Daerah Kuarau/
Bt. Licin. |
| Daerah Kotabaru | : | Markas Daerah Pulau
Laut |
| Daerah Marabahan/Dayak besar | : | Markas Daerah BN-10 |
| Daerah Anjir Serapat | : | Markas Daerah BN-11 |
8. Daftar Markas Pangkalan dan Markas Seksi sangat banyak sebab meliputi seluruh desa. Tiap Markas DAerah membawahi 15 sampai 30 Markas Pangkalan, begitu pula Markas Pangkalan membawahi berpuluh-puluh Markas Seksi.

USAHA PETANI DALAM MEMPERTAHANKAN HIDUP KISAH PENDUDUKAN JEPANG DI MADIUN

Oleh : I Gde Putu Gunawan

Pendahuluan

Tujuan tulisan ini adalah ingin menyampaikan suatu kisah tentang kehidupan petani di Madiun pada masa pendudukan Jepang, meliputi reaksi mereka terhadap kebijaksanaan pemerintah pendudukan dan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut. Karena hubungan Indonesia — Jepang pada masa itu bukanlah semata-mata hubungan antara yang dijajah dengan penjajah, akan tetapi juga meliputi problem latar belakang budaya. Individu dengan latar belakang budaya berbeda secara langsung berhubungan, cenderung bertingkah laku menurut nilai yang dianutnya, sehingga tidak jarang menimbulkan reaksi yang emosional.

Untuk memudahkan pembahasan, tulisan ini dibagi atas dua bagian, yang pertama adalah merupakan latar belakang timbulnya reaksi petani terhadap kebijaksanaan pemerintah pendudukan. Di sini mula-mula dikisahkan bahwa faktor-faktor yang secara langsung tidak menyangkut masalah pertanian turut menentukan kehidupan para petani Madiun. Faktor tersebut antara lain dipaksanya petani untuk merehabilitasi sarana-sarana komunikasi, dalam hal ini jalan raya dan jembatan, sehingga waktunya untuk bekerja di sawah/lat⁵ g menjadi berkurang. Sedang faktor yang berhubungan dengan pertanian adalah adanya larangan dari pemerintah agar petani tidak menanam tebu dan membuat gula. Hal ini merupakan pukulan berat bagi petani Madiun, menyebabkan hilangnya mata pencaharian mereka, atau dengan kata lain membuat mereka menjadi penganggur.

Kebijaksanaan Jepang yang ingin memenangkan perang, membuat petani mempunyai berbagai peranan antara lain sebagai penanam dan pemelihara padi, penanam dan pemelihara tanaman kapuk dan kapas, sebagai **romusha** dan ditambah beban yang dituntut pemerintah kepada mereka adalah "penyerahan wajib" padi. Semua ini memberatkan para petani, sementara tenaga mereka diperas, kebutuhan organisanya tidak dapat terpenuhi sehingga timbul penyakit kurang gizi membuat stamina mereka menurun.

Kekecewaan terhadap pemerintah memuncak ketika mereka melihat terjadinya kecurangan-kecurangan dari petugas pengumpul padi, atau bertimbunnya pada pada tempat-tempat pemusatan, sementara mereka mengalami kesukaran dalam memperoleh bahan makanan. Keadaan ini mendorong petani bereaksi yang terwujud sebagai perlawanan diam-diam, terutama sehubungan dengan penyerahan wajib. Adapun bentuk perlawanan ini dikisahkan pada

bagian yang kedua tulisan ini.

Selain terwujud dalam bentuk perlawanan, wujud lain dari pada usaha petani Madiun **Shu1**) mempertahankan hidupnya adalah dengan cara mengembangkan industri kecil dan kerajinan tangan. Mereka yang kreatif segera membentuk perkumpulan-perkumpulan usaha tertentu atau meningkatkan aktifitasnya dalam anyam meng-anyam. Reaksi ini timbul pada saat bertambahnya kebencian petani di satu pihak dan usahanya mempertahankan hidup di lain pihak.

Latar belakang

Sebelum melihat keseluruhan persoalan-persoalan usaha petani Madiun mempertahankan hidupnya, terlebih dahulu beberapa hal perlu kita ketahui yakni latar belakangnya. Karena beberapa masalah yang secara langsung tidak menyangkut pertanian turut menentukan kehidupan para petani Madiun. Semua ini erat hubungannya dengan situasi ekonomi yang lumpuh dihadapi Jepang, ketika ia menginjakkan kakinya di Keresidenan Madiun pada tanggal 8 Maret 1942.

Lumpuhnya ekonomi pada masa itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah karena politik "bumi hangus" yang dilakukan oleh Belanda sebelum ia meninggalkan Madiun. Sambil melarikan diri kearah selatan (Pacitan)²⁾ beberapa buah jembatan dan jalan-jalan penting berhasil di hancurkan sehingga rusaknya sarana komunikasi antar daerah. Karena itu perbaikan sarana pengangkutan seperti jembatan dan jalan-jalan raya adalah hal yang mendapat perhatian istimewa dari pemerintah Jepang pada masa awal pendudukannya. Pelaksanaan perbaikan ini semuanya dibebankan kepada penduduk atau dengan kata lain, penduduk dipaksa bekerja siang malam untuk menyelesaikan tugas itu secepat-cepatnya. Bagi petani pekerjaan tambahan seperti ini tentu merupakan beban karena mengurangi konsentrasinya di sawah atau ladang dan juga menyebabkan berkurangnya hasil yang mereka peroleh.

Faktor lain adalah terjadinya perampokan pada toko-toko milik orang Cina dan pabrik-pabrik milik orang Belanda. Dua buah pabrik beras yang menjadi sasaran yakni pabrik beras "Gedoro" dan pabrik beras "Walikukun"³⁾ juga lima buah pabrik gula yakni "Pagotan", "Poerwodadi", "Redjoagoeng", "Redjosari", "Soedono".⁴⁾ Pada mulanya Jepang mengizinkan penduduk untuk melakukan perampokan bahkan beberapa toko milik orang Cina sengaja dibuka dan menyuruh penduduk mengambil isinya. Namun kemudian ia mengadakan larangan ketat, bahkan memberi hukuman berat bagi yang melanggar.

Sementara itu bantuan dari negeri Jepang sendiri tidak dapat

1) Jepang dalam pemerintahannya di Indonesia memperkenalkan istilah *Shu* untuk keresidenan dan *Shuchokan* untuk kepala residen, *kencho* dan *ken* untuk bupati dan kabupaten, *guncho* dan *gun* untuk wedana dan kawedanan, *soncho* dan *son* untuk camat dan kecamatan, *kuncho* dan *ku* untuk lurah dan kalurahan.

2) Wawancara dengan Iai Ridwan Hadjir, Jetis, 16 Juli 1980

3) *Soeara Asia*, 2 Agustus 1942

4) *Pewarta Perniagaan*, 23 Juni 1942

diharapkan karena adanya blokade dari pihak Sekutu. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh Jepang untuk mengatasi hal ini adalah memanfaatkan semua sumber ekonomi daerah, dikerahkan untuk kepentingan perang dan pelaksanaan sistem autarki daerah, artinya tiap-tiap keresidenan harus memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa tergantung dari keresidenan lain.

Penguasaan sumber ekonomi daerah adalah tujuan utama dari sistem autarki tersebut karena telah diperkirakan bahwa perang akan berlangsung lama, sehingga penguasaan daerah yang kaya akan bahan mentah sangat meringankan beban yang dipikul oleh Jepang. Pelaksanaannya dilakukan melalui dua tahap, pertama adalah tahap penguasaan terhadap harta benda milik musuh (Belanda). Harta milik Belanda yang disita antara lain perkebunan-perkebunan, pabrik-pabrik, telekomunikasi, perusahaan-perusahaan transport dll. Kemudian langkah selanjutnya adalah merehabilitasinya. Tahap yang kedua adalah merupakan rencana jangka panjang yaitu menyusun kembali struktur ekonomi wilayah yang diduduki dalam rangka memenuhi bahan-bahan untuk perang.

Setelah selesainya rehabilitasi terhadap jembatan dan jalan-jalan raya, maka dibuka beberapa route bis baru antara lain route Madiun — Magetan melalui Gorang-gareng dan melalui Maospati, route Ponorogo Pacitan dan route Magetan — Ngawi 5) Sedangkan untuk jenis perkebunan tidak semua diijinkan untuk direhabilitasi karena tidak semua perkebunan dinilai dapat menunjang kebutuhan perang. Di Madiun perkebunan yang paling banyak diusahakan oleh para petani adalah perkebunan tebu. Oleh pemerintah pendudukan dianggap bahwa kebutuhan pulau Jawa akan gula sudah mencukupi maka tidak semua pabrik gula di sini dibuka kembali. lebih-lebih lagi pada tahu 1944 dikeluarkannya **Osamu Seirei** No. 31 yang isinya melarang penduduk untuk menanam tebu dan membuat gula, 6) menyebabkan banyak petani Madiun kehilangan mata pencahariannya sedangkan pemerintah pendudukan belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk mereka. Untuk pengganti perkebunan tebu kepada petani dianjurkan menanam tanaman penghasil bahan makanan, penghasil bahan pakaian dan jarak untuk pelumas.

Kemudian terjadi juga dalam perdagangan karena ikut campurnya pemerintah dalam menetapkan harga barang, mengatur kepada siapa barang boleh dijual dan kepada siapa tidak. Olehnya telah dipersiapkan badan yang bertindak sebagai pembeli tunggal, terutama terhadap barang-barang yang diklasifikasi penting untuk perang. Karena itu Madiun **Keizaibu** (Departemen Perekonomian) membentuk badan-badan seperti **Haiyu Kumiai** yaitu koperasi yang bertugas mendistribusikan barang-barang dan **Shuka Kumiai**

5) *Asai Raya*, 26 September 1942

6) *Kan Po*, No. 44, Juni 1944. (Osamu Seirei adalah Undang-Undang yang dikeluarkan oleh panglima Tentara Jepang)

adalah koperasi yang bertindak sebagai pembeli dan pengumpul barang-barang dari penduduk.⁷⁾ Bersama ini dikeluarkan aturan-aturan yang melarang penduduk membawa barang-barang tertentu keluar dari Madiun **Shu**, dengan sanksi berat bagi yang melanggar.

Dalam waktu yang relatif singkat yakni sejak kedatangannya bulan Maret sampai bulan Agustus, pemerintah pendudukan telah berhasil memulihkan ketertiban dan menguasai sumber-sumber penting untuk kebutuhan peranganya. Persoalan lain yang harus dihadapinya adalah menjamin kebutuhan hidup bagi personil militernya yang ada di Indonesia maupun yang ada di berbagai daerah yang diduduki. Untuk itu ia menyusun sistem penyerahan wajib padi dari petani.

Metode yang dipakai untuk pengumpulan padi ini adalah sebagai berikut, mula-mula pemerintah pusat mewajibkan kepada setiap keresidenan untuk mengumpulkan pada sejumlah tertentu berdasarkan produktivitas keresidenan tersebut. Kemudian Residen mengumpulkan para bupatinya dan membagi penyerahan wajib keresidenan antara kabupaten. Bupati melakukan hal yang sama kepada Wedana dan kawedanan, lalu Wedana kepada camatnya dan kecamatan, camat kepada lurah dan kelurahan dan akhirnya lurah kepada petani.

Dalam kenyataannya penyerahan wajib ini sangat memberatkan para petani Madiun, karena jumlah padi yang harus mereka serahkan terlalu berlebihan jika dibandingkan dengan hasil yang mereka peroleh. Menurut Mr. R.M. Sartono seorang anggota **Sanyo Kaigi** (Dewan Penasehat Pemerintah) yang mengawasi keresidenan Madiun mengatakan bahwa petani hanya mendapatkan $\frac{1}{4}$ hasil padinya, karena 50 % harus diserahkan kepada pemerintah dan 25 % kepada Madiun **Shu Hokokai** (Himpunan Kebaktian rakyat Madiun)⁸⁾ Sedangkan harga yang dibayar oleh pemerintah sangat murah, yakni f1.88 untuk setiap kwintal walaupun oleh pemerintah pendudukan telah ditetapkan bahwa harga untuk satu kwintal padi di Madiun **Shu** adalah f 3. 80 9)

Kesulitan petani semakin bertambah bila gagalnya panen yang biasanya disebabkan oleh terlalu panjangnya musim kemarau banjir pada musim hujan dan yang paling penting adalah kurangnya waktu bagi petani untuk mengerjakan sawahnya karena tenaga mereka harus dibagi untuk mengerjakan pekerjaan lain selain menanam dan memelihara padi. Pekerjaan itu adalah sehubungan dengan masalah penting kedua yang dihadapi Jepang setelah pangan yaitu kurangnya kebutuhan akan sandang. Untuk itu petani Madiun diwajibkan menanam, kapuk dan kapas, memelihara ulat sutera di samping menanam tanaman yang dibutuhkan untuk ke-

7) Ibid, april 1944.

8) Ben Anderson, "The Problem of Rice", *Indonesia* II, Oktober 1966, hal 104.

9) *Kan Po*, 10 April 1943.

pentingan perang seperti Jarak.

Mengatasi masalah ini kembali tenaga para petani diperas, kepada mereka dibebankan tugas membuka tanah pertanian baru untuk tanaman kapuk dan kapas di sekitar Uteran **Gun** seluas 820 ha. 10) Sedangkan dalam rangka mengatasi banjir dan memperbaiki saluran irigasi, petani dijadikan **romusha** dalam membuat bendungan antara lain di Ngawi **Ken** yang akan direncanakan mengairi sawah disekitar Gredo **Ku**, Mangoenredjo **Ku** dan Banjarsari **Ku**. Bendungan yang kedua terletak di Gembes **Ku**, direncanakan untuk mengairi sawah di Ponorogo **Ken**, Slaheong **Gun** dan Bangkal **Ku**. 11) Di Djetic **Son** sebuah sungai yang bernama "Ke-yang" setiap tahun mendatangkan banjir sehingga merusak tanaman yang ada disekitarnya. Di sini pemerintah pendudukan memperkaryakan ± 2000 orang petani untuk memperdalam atau meluruskan sungai tersebut. 12)

Seperangkat peranan yang dijalankan oleh petani, antara lain sebagai penanam dan pemelihara padi, sebagai pemelihara tanaman kapuk dan kapas, sebagai **roumusha** dalam membuat bendungan, melebarkan sungai dll, tidak seimbang dengan kebutuhan sistem organisnya, dalam hal ini karena kurangnya gizi yang mereka dapat dari makanan. Keadaan di mana manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, fisiknya secara berangsur-angsur kekurangan kalori, vitamin, dan protein kemudian cenderung mulai tidak sehat.

Tenaga para petani yang terus menerus diperas dan ditambah oleh kurangnya gizi menyebabkan stamina mereka mundur. Keadaan ini merupakan keadaan yang berlawanan dengan gagasan melipatkan hasil bumi, bahkan menimbulkan kesengsaraan. Namun pemerintah pendudukan seolah-olah tidak mau tahu tentang masalah tersebut. Penyerahan wajib tetap mereka tuntutan sampai pada masa akhir kekuasaannya. Sedangkan petani tetap menyerahkan padinya, dari pada ia berurusan dengan Kenpeitai (polisi militer Jepang).

Keadaan petani yang menghadapi kesulitan dalam menempuh hidup adalah berjalan sejajar dengan usahanya mempertahankan hidup. Kemiskinan petani adalah akibat yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan pemerintah pendudukan yang ambisius ingin memenangkan perang. Hal ini menyebabkan timbulnya dua macam reaksi dari petani antara lain :

- Timbulnya perlawanan diam-diam dari petani terhadap kebijaksanaan Jepang. Terutama sehubungan dengan penyerahan wajib.
- Meningkatnya kreatifitas petani dalam mengembangkan industri kecil dan kerajinan tangan.

10) *Sovara Asia* 12 Juni 1943

11) *Ibid.* 2 Maret 1943

12) *Ibid.* 25 Februari 1944

Kedua macam reaksi ini timbul pada saat bertambahnya kebencian petani kepada pemerintah pendudukan di satu pihak, dan usaha mempertahankan hidup dilain pihak. Setelah mereka melihat terjadinya kecurangan-kecurangan pada sistim pengumpulan padi, atau kadang-kadang mereka menyaksikan bahwa padinya bertimbun di tempat-tempat pemusatan bahkan adakalanya sampai tumbuh kembali. Sementara mereka kekurangan bahan makanan. Walaupun di Madiun ada kebiasaan petani makan gaplek atau ampas singkong yang telah dijadikan tapioka, ¹³⁾ hal ini tentu tidak banyak dapat membantu dalam arti mereka tetap kekurangan gizi.

Mempertahankan Hidup

Seperti dikatakan di atas, bahwa setelah petani menyaksikan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para petugas pengumpul padi dimana mereka sering melakukan tindakan mencari untung sendiri dan seringnya padi tertimbun pada tempat-tempat pemusatan karena sukarnya pengangkutan, mendorong petani menentang kebijaksanaan pemerintah terutama menyangkut pengumpulan wajib ini. Di samping itu cara-cara memberikan penerangan mengenai penyeteroran padi dari pemerintah, kurang jelas bagi petani, kebanyakan diantara mereka berpendapat bahwa padinya dibawa keluar keresidenan atau ke luar Jawa.

Sesungguhnya a tanpa keadaan inipun, petani merasa enggan menyerahkan padinya karena harga yang dibayar oleh pemerintah sangatlah murah. Sehubungan dengan kesulitan menempuh hidup, mereka terpaksa melakukan perlawanan diam-diam. Mereka tidak lagi menyerahkan padinya tetapi cenderung menimbun dan nantinya dijual di pasaran gelap dengan harga yang lebih mahal dari harga yang dibayar oleh pemerintah. Di Pasar gelap harga satu liter beras mencapai antara f 1.20 sampai f 3.25. ¹⁴⁾ Sedangkan harga yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang di Madiun hanya 8.20 sen setiap satu liter. ¹⁵⁾

Tindakan petani ini bukannya tidak mengandung resiko tertentu karena terbukti banyak di antara mereka harus berurusan bahkan mengalami siksaan dari **Kenpeitai**. Sesungguhnya kegiatan mereka tidak lepas dari pengawasan **Keibodan** (barisan pembantu polisi) yang dibayar oleh pemerintah Jepang untuk mengawasi para petani yang tidak mau menyerahkan padinya. ¹⁶⁾

Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi adanya pasar gelap ini, antara lain membentuk badan-badan tertentu yang bertugas mengumpulkan atau membeli beras dari petani dan badan-badan yang bertugas mendistribusikan, bahkan pada

13) Wawancara dengan Bapak Moelyoto, eks pamongpraja, Madiun, 5 Juli 1980

14) Ben Anderson, op sit, hal 92

15) *Kan Po*, 10 April 1943

16) *Soeara Asia*, 6 Mei 1944

tanggal 8 Januari 1945, **Sanyo Kaigi** (Dewan Penasehat Pemerintah) diminta bersidang untuk memecahkan masalah beras ini ¹⁷⁾, namun kegiatan pasar gelap tidak pernah berakhir sampai pada masa akhir pemerintahan Jepang di Madiun.

Bentuk lain dari perlawanan diam-diam petani Madiun adalah pada waktu menanam padi, mereka memilih bibit padi yang umurnya tidak sama. Bibit padi yang umurnya lebih tua ditanam lebih ke tengah dan dikelilingi oleh bibit padi yang lebih muda. Sementara bibit padi yang muda sudah mulai menguning, bibit padi yang lebih tua yang ditanam lebih kedalam sudah siap dipotong. Pemotongan dilakukan pada waktu malam hari. ¹⁸⁾

Dengan cara ini resiko berhadapan dengan Kenpeitai lebih kecil karena rahasia ini hanya diketahui oleh para petani saja. Walaupun banyak di antara mereka melakukan perlawanan dengan cara ini, keadaan mereka tidak banyak mengalami perubahan, dalam arti mereka tetap miskin. Tindakan yang mereka lakukan bukanlah semata-mata keinginan untuk mencari keuntungan tapi hanya mempertahankan hidup, setelah gagal mencari jalan yang lebih baik.

Di atas telah dikatakan bahwa mata pencaharian petani di Madiun sebelum kedatangan Jepang adalah menanam tebu. Oleh Jepang dianggap bahwa kebutuhan pulau Jawa akan gula sudah cukup sehingga produksi gula dikurangi, bahkan pada tahun 1944 dikeluarkannya Osamu Seirei No. 31 yang isinya melarang petani menanam tebu dan membuat gula. Hal itu secara langsung mematikan mata pencaharian petani, banyak di antara mereka menjadi penganggur karena pemerintah penduduk belum dapat menciptakan lapangan kerja baru buat mereka. Nasib buruk juga menimpa petani yang biasanya menjual hasil sawah atau kebunnya, kini oleh pemerintah pendudukan telah disediakan badan sebagai pembeli tunggal dengan harga yang telah ditentukan.

Petani-petani yang kreatif tetap berusaha mengatasi keadaan, dengan akal dan alat yang ada mereka membentuk perkumpulan-perkumpulan tertentu dengan tujuan menampung tenaga kerja yang nganggur dan menciptakan lapangan kerja yang baru. Mereka berusaha dengan cara sendiri mengembangkan industri kecil atau kerajinan tangan. Di Madiun **Shu** banyak perkumpulan industri kecil yang muncul, walaupun dalam pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan bebas karena usaha mereka tidak lepas dari campur tangan pemerintah Jepang terutama terhadap barang-barang yang dianggap penting untuk kebutuhan perang.

Usaha pendirian perkumpulan ini dipelopori penduduk Bandjarsari **Son**. Perkumpulan yang mereka dirikan bernama : "Perapen Djawi" yang giat memproduksi alat-alat pertanian seperti, alat

17) Ben Anderson, op cit, hal 77 - 123

18) Wawancara dengan Kiai Ridwan Hadjir, Jetis, 16 Juli 1980

bajak, pacul, arit, skop dll. Mengingat pentingnya alat-alat ini Pemerintah Jepang menempatkan seorang pengawas bangsa Jepang untuk memperbaiki teknik pekerjaan dan mengatasi kualitas bahan. Perkumpulan ini berhasil menyerap \pm 1000 orang tenaga kerja. 19)

Sudah tentu bahwa hasil produksi perkumpulan Perapen Djawi ini tidak boleh sembarang diperjual belikan karena sangat berguna bagi Jepang, terutama untuk program melipat gandakan hasil bumi. Ia telah membentuk satu badan bertindak sebagai pembeli tunggal yang bernama **Nokoji Kumiai** (koperasi pembeli alat-alat pertanian dari besi)

Contoh lain yang menunjukkan kreatifitas petani yang berusaha mempertahankan hidupnya adalah terbentuknya sebuah perkumpulan yang bernama 'Panti Yoga', adapun kegiatannya adalah membuat barang-barang kerajinan dari tulang, diolah menjadi kancing baju, sikat gigi dll. Perkumpulan ini tidak sebesar perkumpulan yang disebutkan diatas, melihat jumlah tenaga kerja yang dapat diserapnya hanya 23 orang. Mengenai hasil kerajinannya dapat dijual langsung ke masyarakat tanpa melalui badan buatan Jepang. 21) Selain perkumpulan-perkumpulan yang disebutkan di atas tentu saja masih banyak perkumpulan-perkumpulan lain seperti perkumpulan pembuat kertas, perkumpulan pengangkutan dari cikar, perkumpulan pemasakan kulit dll. dalam makalah ini tentu tidak dapat dibahas satu persatu.

Tidak semua petani mempertahankan hidupnya dengan cara bergabung pada perkumpulan tertentu, akan tetapi membuat aktifitas di rumahnya masing-masing. Sebagai contoh di Karanggebang **Ku**, Ponorogo **Ken**, mereka menambah penghasilannya dengan menganyam capil. Hasilnya dibeli oleh pemerintah dan akan dibagikan kepada **romusha** yang ada di Madiun maupun di luar Madiun.

Adakalanya propaganda yang dilakukan oleh Jepang tidak merugikan petani dalam jangka waktu tertentu malah menguntungkan dalam arti dapat digunakan mempertahankan hidup. Misalnya saja dalam mengatasi masalah sandang, pemerintah pendudukan menganjurkan kepada petani Madiun untuk menanam kapuk di pekarangan rumahnya, bahkan kepada mereka diberikan bibit yang dianggap baik. Ternyata setelah pohon ini menghasilkan merupakan tanaman yang sangat membantu petani dalam mempertahankan hidupnya karena pada saat-saat kritis hasilnya dapat dijual kepada pemerintah yang telah mempersiapkan sebuah badan yang bertugas memonopoli pembelian kapuk dengan harga 11.40 sen untuk setiap kilo gram. 22) Ataukah bila petani ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak mereka terlebih dahulu mengolah kapuk itu menjadi benang sebelum di jual.

Menghadapi perlawanan diam-diam dari petani adalah merupa-

19) *Soeara Asia*, 12 Juli 1943, dan 6 Mei 1944

20) *Madiun Syuu Ho*, 31 Mei 1944

21) *Soeara Asia*, 1 Mei 1943

22) *Asia Raya*, 30 Januari 1943

kan sebab gagalnya penyetoran padi, ditambah lagi dengan sukarnya masalah angkutan yang memungkinkan timbulnya kecurangan-kecurangan dalam pengumpulan padi, pasar gelap dll. Jepang sadar bahwa desa adalah merupakan landasan kokoh guna menunjang kedudukannya di Indonesia. Maka sejak awal tahun 1945 ia berusaha memulihkan kepercayaan rakyat, dengan mengadakan beberapa perubahan dalam pemerintahan. Terlihat dalam tindakan direalisasi-sanya janji "Kemerdekaan" yang pernah dijanjikan oleh Perdana Menteri Koiso.

Kesimpulan

Dalam halaman-halaman di atas telah dibahas berbagai persoalan-persoalan yang menyangkut interaksi antara petani Madiun dengan tentara pendudukan Jepang yang ambisius ingin mewujudkan Lingkungan bersama Asia Timur Raya. Dari berbagai kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Jepang, petani adalah golongan yang paling banyak merasakan pahitnya masa tiga setengah tahun itu karena dalam usaha memenangkan perangnya, Jepang tidak segan-segan memeras keringat para petani dan menjadikan mereka miskin sampai jpada tingkat kemiskinan yang paling buruk. Beras hasil jerih payah mereka di sawah hanya sebahagian kecil saja dapat di makan karena harus diserahkan untuk memenuhi penyerahan wajib. Sedangkan makanan lain yang dianjurkan sebagai pengganti beras tidak banyak dapat merubah keadaan. Penderitaan ini memuncak sampai pada masa akhir kekuasaan Jepang, ditandai dengan meningkatnya angka kematian dan menurunnya angka kelahiran. Hal ini berhubungan dengan keadaan di mana manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, fisiknya secara berangsur-angsur kekurangan kalori, vitamin dan protein kemudian cenderung mulai tidak sehat, walaupun tidak mendadak jatuh sakit atau mati.

Tantangan lain yang harus dihadapi oleh petani di Madiun adalah penyakit malaria.²³⁾ Nyamuk malaria yang menjadi sumber penyakit ini hidup subur dilingkungan yang tidak sehat seperti tempat-tempat becek, semak-semak dll. Dan yang penting adalah kurangnya kesadaran penduduk untuk menghindarinya.

Kombinasi antara kekurangan gizi, lingkungan yang tidak sehat dan penyakit malaria ini menyebabkan meningkatnya jumlah kematian pada tahun 1944 sampai 1945 dan menurunnya angka kelahiran. Pada tahun 1943 jumlah penduduk Madiun adalah 2.279.688 orang. Antara tahun 1943 dan awal tahun 1944 jumlah penduduk masih menunjukkan kenaikan yakni yang lahir 67.963 orang sedangkan yang meninggal 40.100 orang, berarti bertambah sekitar 27.538 orang. Namun antara tahun 1944 sampai 1945 jumlah penduduk berkurang karena meningkatnya angka kematian yaitu menjadi 56.973 orang dan menurunnya angka kelahiran menjadi

23) Soeara Asia, 9 Februari 1943

45.944 orang berarti jumlah penduduk berkurang sekitar 2038 orang ²⁴⁾

Dari angka ini terbukti bahwa golongan yang paling banyak merasakan pahitnya masa tiga setengah tahun penduduk Jepang di Indonesia adalah golongan petani. Sedangkan mereka yang tergabung dalam barisan **Keibodan** (barisan pembantu polisi), **Selnendan** (barisan pemuda) anggota Peta, kepala pemerintahan seperti **kucho**, (lurah) **Soncho** (camat) **Guncho** (wedana) **Kencho** (bupati) tokoh-tokoh agama Islam, anggota perkumpulan tertentu seperti Madiun **Shu Sangi Kai** (himpunan kebaktian rakyat madiun) dll, umumnya dapat menikmati hidup yang "lebih baik" bila dibandingkan dengan golongan yang pertama disebut di atas. Ini terlihat dari gaji yang mereka terima adalah sbb.:

Golongan pekerjaan	gaji sehari	gaji sebulan
-Opas, jongos, pelayan	20 sen — 40 sen	f. 6 — f. 12
-Juru tulis, supir, penjaga telepon	40 sen — 60 sen	f. 12 — f. 18
-Juru tik dan pekerjaan yang memerlukan pendidikan	60 sen — f. 1	f. 18 — f. 30 25)

Untuk memperoleh perbandingan, sebaiknya kita melihat harga bahan pokok yang ada di Madiun, sbb. ;

Jenis barang	Satuan	Harga
beras padi :		
beras bulu	1 kg.	8,2 sen
beras cere	1 kg.	7,2 sen
Gula pasir	1 kg.	10 sen
Garam	1 kg.	15 sen
Minyak kelapa	1 botol bir	16 sen
Ikan Asin	1 kg.	50 sen
Tekstil kasar	1 meter	35 sen

Sumber : untuk harga beras lihat **Kan Po**, 10 April 1943 dan untuk harga gula pasir, garam minyak kelapa, ikan asin, tekstil, lihat **Kan Po**, 10 Januari dan 25 Januari 1944.

Dari daftar ini dapat dilihat bahwa pegawai negeri yang berpenghasilan dengan harga bahan pokok. Dengan perhitungan hidup bersama keluarganya. Sedangkan yang tergolong kedua dan ketiga kiranya dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan lebih baik.

24) Sinar Baroe, 5 Januari 1945

25) Kan Po, 10 Oktober 1943

WAJAH DUA MUKA SEBUAH KEKUATAN POLITIK :

Badan Pekerja KNIP Periode Jakarta

Oleh : JR. Chaniago

Sering perubahan-perubahan yang terjadi setelah proklamasi, khususnya pada awal revolusi pisik mencengangkan banyak orang. Pada bulan-bulan pertama setelah Proklamasi itu diumumkan, sebagian masyarakat mulai diliputi oleh semangat yang besar untuk membela Proklamasi. Sebagian besar dari mereka itu tidak mengerti arti dan makna revolusi. Dan memang pada saat itu tidak banyak waktu untuk memikirkan masalah semacam itu.

Seperti halnya suatu gerak yang bersifat revolusioner sering membawa banyak kemungkinan-kemungkinan dan pergeseran-pergeseran. Sejumlah golongan tertentu yang pada masa kolonial memiliki status sosial yang tinggi, pada awal revolusi itu mungkin tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Sebaliknya mereka yang sebelumnya mempunyai status sosial yang rendah, tiba-tiba melonjak memegang posisi yang penting.

Salah satu kenyataan yang muncul dalam permulaan revolusi Indonesia adalah mulai menonjolnya peranan para pemuda. Bahkan sebagian dari perubahan-perubahan yang terjadi sejak Proklamasi, baik di bidang sosial, pemerintahan, dan legislatif, dimotori oleh para pemuda. Pada umumnya para pemuda ini sudah saling berhubungan, terutama bagi mereka yang dulu pernah bergerak di bawah tanah dalam masa pendudukan Jepang. Beberapa kelompok pemuda tersebut adalah : Kelompok Sjahrir; kelompok amir Sjari-fuddin; kelompok asrama mahasiswa Prapatan 10; kelompok asrama Angkatan Baru Indonesia di Menteng Raya 31; dan kelompok asrama Indonesia Merdeka di Bungur 56.

Adalah suatu kenyataan yang sukar diungkiri, bahwa baik pada hari-hari menjelang diucapkannya Proklamasi maupun pada minggu minggu peralihan setelah itu, para pemuda relatif mencoba mengenyampingkan pengelompokan mereka sebelumnya. disini terlihat, dalam batas-batas tertentu, adanya persamaan tujuan, persamaan kepentingan, dan rasa senasib, rupanya mempersatukan para pemuda. apa yang terjadi dalam pembentukan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP.KNIP) adalah salah satu contoh dari kenyataan tersebut.

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Badan Pekerja KNIP merupakan pelaksana sehari-hari Komite Nasional Indonesia Pusat ¹⁾ Karena itu untuk menjelaskan sejumlah

¹⁾ *Koesnodiprodo*. Himpunan Undang2, Peraturan2, Penetapan2, Pemerintah Republik Indonesia 1945, (Jakarta : Seno, 1951), hal 58.

faktor yang mendorong terbentuknya Badan Pekerja itu, perlu secara singkat mengkaji Komite Nasional Indonesia Pusat.

Azas pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) termuat dalam Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal IV UUD 1945 itu berbunyi, "Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden, dengan bantuan sebuah Komite Nasional.²⁾ Dengan demikian untuk mengetahui lebih banyak prinsip-prinsip Komite Nasional dengan sendirinya harus mengikuti secara mendalam seluruh pembicaraan mengenai hal ini dalam sidang-sidang PPKI.

Selamatiga hari sidang-sidang PPKI hampir selalu masalah Komite Nasional disinggung dalam pembicaraan. Perumusan yang mendalam dapat dijumpai dari hasil sidang PPKI tanggal 22 agustus 1945. Pada sidang ini PPKI mengambil keputusan .³⁾

1. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dengan pusat Jakarta.
2. Komite Nasional adalah penjelmaan kebulatan tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat.
3. Usaha-usaha Komite Nasional ialah :
 - a. Menyatakan keinginan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa Indonesia yang merdeka.
 - b. Mempersatukan rakyat dari segala lapisan dan jabatan, supaya terpadu pada segala tempat di seluruh Indonesia, persatuan kebangsaan yang bulat dan erat.
 - c. Membantu menentramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum.
 - d. Membantu pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia dan di daerah membantu pemerintah daerah untuk kesejahteraan umum.
4. Komite Nasional di pusat memimpin dan memberi petunjuk kepada Komite Nasional di daerah. Di mana perlu di daerah didirikan pusat daerah, yaitu untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, dan sebagainya.
5. Komite Nasional di pusat, di pusat daerah, dan di daerah, dipimpin oleh seorang ketua dan beberapa orang anggota pengurus yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional. buat pertama kali ketua pusat daerah ditetapkan oleh Presiden.

Dengan melihat Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan keputusan PPKI mengenai Komite Nasional, terlihat bahwa pada mulanya Komite Nasional tidak dimasukkan

²⁾ Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. (Jakarta, departemen Penerangan R.I. tt), hal 29

³⁾ Osman Ruliby. Documenta Historica. (Jakarta ulan Bintang, 1953), hal 16

sebagai suatu badan legislatif. Ia merupakan "pembantu" Presiden. dan rumusan PPKI mengenai Komite Nasional merupakan perincian dari bentuk-bentuk bantuan yang akan diberikannya kepada Presiden. Hal ini perlu dijelaskan karena kenyataan beberapa bulan kemudian berlainan dengan gagasan tersebut.

Moh. Hatta yang telah mengintrodusir nama Komite Nasional menjelang Jepang masuk dan kemudian diperkenalkan kembali pada awal Proklamasi bahwa Komite Nasional adalah semacam wakil-wakil rakyat untuk membantu Presiden selama perang Asia Timur Raya belum berakhir.⁴⁾ Hal yang hampir senada juga diucapkan Presiden Sukarno dalam pidato radionya tanggal 23 Agustus 1945⁵⁾ dan kemudian Wakil Presiden Hatta tanggal 29 Agustus, yakni beberapa saat menjelang KNIP diresmikan.⁶⁾ Mengikuti pidato Sukarno dan Hatta tersebut dapat disimpulkan bahwa Komite Nasional adalah penjelmaan kebulatan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia untuk merealisasi kemerdekaannya. Komite Nasional itu haruslah berdasarkan kedaulatan rakyat. Ia harus berfungsi menyalurkan keinginan rakyat, dan memperkuat persatuan dan kesatuan. Karena itulah Komite Nasional, baik di pusat maupun di daerah haruslah meliputi seluruh aliran dan golongan dalam masyarakat, dengan demikian persatuan tetap tergalang.⁷⁾ Pemimpin-pemimpin rakyat segala golongan, aliran, dan lapisan harus mempersatukan diri dalam Komite Nasional. Pangrehpraja, alim ulama, kaum pergerakan, pemuda, pedagang, harus bekerja bersama-sama dalam komite Nasional.

Tujuan untuk masuknya semua golongan dan aliran dalam KNIP adalah untuk menghadapi situasi situasi sesudah itu, terutama kabar bahwa sekutu akan mendarat. Karena itulah, salah satu keputusan PPKI.

Tujuan untuk masuknya semua golongan dan aliran dalam KNIP adalah untuk menghadapi situasi situasi sesudah itu, terutama kabar bahwa sekutu akan mendarat. Karena itulah, salah satu keputusan PPKI tentang Komite Nasional ini adalah bahwa Komite Nasional selain membantu pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia, turut menjaga ketertiban dan keamanan dengan berusaha menenteramkan rakyat. Dengan demikian Komite Nasional juga berfungsi sebagai penghubung antara Pemerintah dengan rakyat. Dari atas ia menterjemahkan kebijaksanaan Pemerintah, dan dari bawah menyampaikan keinginan rakyat kepada Pemerintah.

4) Wawancara dengan Hatta, Jakarta, 19 Januari 1978.

5) Osman Ruliby, *Ibid.*, hal 20.

6) Koesnodiprodjo, *Op.cit.*, hal 254 Wawancara dengan Hatta, Jakarta, 19 Januari 1978.

7) Wawancara dengan Hatta, Januari, 19 Januari 1978.

Dibalik terbentuknya Badan Pekerja KNIP.

Sukar diungkiri bahwa fungsi KNIP setelah diresmikan Presiden Sukarno tanggal 29 Agustus 1945, ternyata memang banyak banyak sebagai pembantu Presiden. Selama hampir sebulan setelah peresmian itu, tidak satupun produk KNIP yang memperlihatkan bahwa ia adalah suatu badan pengganti MPR, DPR, dan DPA. KNIP lebih banyak berfungsi daripada menyampaikan kondisi dan keinginan masyarakat kepada Pemerintah. Dalam situasi seperti ini adalah tidak mengherankan kalau kritik-kritik muncul kearah KNIP.

Kritikan-kritikan terhadap KNIP sebetulnya juga merupakan efek sampingan dari kritikan-kritikan yang telah dilakukan terhadap Pemerintah. Karena KNIP dianggap merupakan alat pembantu pemerintah, maka kritikan-kritikan terhadap Pemerintah juga berakibat pada KNIP. Kritikan terhadap pemerintah berakar pada personal-personal pemerintah yang dianggap sebagian dari mereka pernah berkolaborasi dengan Jepang. Selain itu Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 45, yang memungkinkan Presiden memegang sebagian besar kekuasaan, merupakan bentuk lain dari kritikan yang timbul. Kekuasaan Presiden dianggap tidak terbatas, dan karena ia dibantu oleh Komite Nasional, maka jalan satu-satunya adalah menegakkan demokrasi.

Untuk mengatasi kritikan-kritikan itu, dan untuk memenuhi ketentuan Ayat 1 dan Ayat 2.⁸⁾ Aturan Tambahan UUD 1945, maka Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945 mengeluarkan pengumuman bahwa Pemerintah sedang mempersiapkan pemilihan umum⁹⁾. Pengumuman ini merupakan kabar pertama tentang akan diadakannya pemilihan umum.

Adanya pengumuman Pemerintah tentang akan diadakannya pemilihan umum tidak mengurangi keinginan-keinginan untuk mengfungsikan Komite Nasional sesuai dengan azas kedaulatan rakyat. Dua hari setelah pengumuman itu, yakni tanggal 7 Oktober 1945, muncul sebuah "referendum" dalam KNIP¹⁰⁾. "Referendum" itu disponsori oleh lima puluh orang anggota KNIP, yang antara lain mendesak Presiden untuk memakai kekuasaan istimewanya, agar membentuk MPR dengan segera. Diusulkan, sebelum MPR tersebut dapat dibentuk, agar anggota-anggota KNIP dianggap sebagai anggota MPR¹¹⁾. Referendum inilah yang kemudian

8) Ayat 1 berbunyi, "Dalam 6 bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dengan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini".

Ayat 2 berbunyi, "Dalam 6 bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang dasar"

9) Berita Indonesia, 1, 7 Oktober 1945.

10) dr. Halim, "Menoedjoe Parlemen Sempoerna". Majalah Revue Indonesia, 1946, hal 12.

11) *Ibid.*

merupakan penyebab langsung diadakannya Sidang Pleno I KNIP di Jakarta tanggal 16 - 17 Oktober 1945, yang kemudian ternyata melahirkan Badan Pekerja KNIP.

Pertanyaan yang muncul adalah, apa sebetulnya yang mendorong munculnya referendum 7 Oktober tersebut. Sebagian orang sangat percaya bahwa referendum ini disponsori oleh kelompok Syahrir. Dan untuk menjawab hal itu marilah kita tinjau sejenak jalan pikiran Sjahrir pada sekitar Proklamasi dan kelompok atau orang-orang yang merasa dekat dengannya.

Kalau kita ikuti jalan pikiran Sjahrir dari sejumlah tulisan-tulisan yang pernah dikeluarkannya, maka segeralah kita menyimpulkan bahwa ia adalah seorang sosialis demokrat atau menurut istilah yang dipergunakannya "sosialis kerakyatan".¹²⁾ Sosialis kerakyatan itu bertujuan untuk menghancurkan feodalisme, imperialisme dan kapitalisme, dengan menjadikan kaum buruh dan pejuang sosialis sebagai tenaga terdepan.¹³⁾ Sosialis kerakyatan itu menghormati martabat manusia beserta hak-hak azasnya. Ia percaya akan kemampuan rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan demokrasi. Sosialisme yang dicita-citakan Sjahrir adalah sosialisme yang tidak dipaksakan dari atas, melainkan sosialisme yang tumbuh karena kesadaran dan bersifat kerakyatan, yang merupakan perkembangan maju dari kemanusiaan yang tertinggi.¹⁴⁾

Sosialis demokrat itu menghendaki perikatan hidup bersama yang dikepalai oleh suatu pemerintahan yang dipilih oleh dan dengan cara demokrasi.¹⁵⁾ Dalam pemerintahan semua alat penghasilan berada di tangan rakyat, tidak ada segolongan kecil (borjuis). Pembagian penghasilan dilakukan secara adil.¹⁶⁾

Selama Sjahrir dan kawan-kawannya bergerak di bawah tanah pada jaman Jepang, mereka sudah merenung-renung, apakah untuk negara Indonesia yang akan dimerdekakan itu. Menurut Sjahrir bentuknya harus persatuan dan berlandaskan demokrasi.¹⁷⁾ Ketika kemerdekaan itu telah tercapai, Sjahrir dan kawan-kawan sepemikiran dengannya tidak segera muncul kepermukaan. Tapi terus menyusun program-program yang jelas, dan pada gilirannya di-realisis secara sistimatis dan terarah. Salah satu dari program yang

12) Sjahrir, *Sosialisme dan Marxisme, suatu kritik terhadap Marxisme*, (Jakarta 1967), passim.

13) Sjahrir, *Perjuangan Kita*, (Jakarta, tt), hal 23.

14) Sjahbuddin Mangandaralam, *In Memoriam Sutan Sjahrir, perjuangan dan penderitaannya*, (Bandung, 1966)

15) H.O.S. Tjokroaminoto, *Islam dan Sosialisme*, (Jakarta, 1950), hal 16. Mengenai masuk dalam aliran mana Sosialisme sjahrir ini, lihatlah Ruslan Abdulgani, *Sosialisme Indonesia, perkembangan tjiu-tjitanya dan ketegasannya*, (Jakarta, 1961), hal 64 - 65. Dan Moh. Hatta, *Demokrasi Kita*, (Jakarta, 1966), hal 24.

16) Sjahrir, *Pikiran dan perdjoeangan*, hal 64 - 65.

17) Wawancara dengan Subadio Sastro satomo, Jakarta, 29 Januari 1978

sangat menentukan itu adalah apa yang dihasilkan mereka di "Jalan Guntur 23" 18)

Hasil dari "pertemuan Guntur" itu berakar pada pandangan-pandangan Sjahrir terhadap revolusi Indonesia dan kenyataan-kenyataan yang muncul pada minggu-minggu pertama setelah Proklamasi diucapkan. Menurut jalan pikiran Sjahrir revolusi Indonesia haruslah 19), merupakan revolusi rakyat yang dalam perjuangannya sebagai bangsa menuntut hak-haknya sebagai bangsa untuk jaminan bahwa ia tidak akan diperlakukan lagi sebagai budak belian. Karena itu revolusi Indonesia, kalau dilihat dari luar merupakan revolusi nasional, tetapi kalau dilihat dari dalam negeri berupa revolusi kerakyatan yang merubah struktur sosial yang ada secara revolusioner, yakni dengan menghancurkan feodalisme. Dan jalan ke arah itu adalah dengan mendemokratisering aparat-aparat negara dan kemasyarakatan, seperti dengan membentuk perwakilan rakyat dari desa sampai ke pusat. Untuk mencapai tujuan itu revolusi harus dipimpin oleh golongan demokratis yang revolusioner dan bukan golongan nasionalis yang membudak pada fasisisme Jepang.

Dalam batas-batas tertentu, apa yang dimaksudkan Sjahrir sebagai nasionalis yang membudak pada fasis, berlatar belakang pada pertemuannya dengan Hatta tanggal 15 Agustus 1945, dan kemudian dilanjutkan dengan Sukarno. Ketika itu Sjahrir menghendaki agar Proklamasi Indonesia janganlah dilakukan lewat badan PPKI yang menurut Sjahrir adalah ciptaan fasis Jepang. Sjahrir merasa bahwa pemerintahan Sukarno sedikit berbau Jepang, dan karena itu berarti berbau fasis.

Namun Sjahrir adalah orang yang mengerti realita revolusi. Ia melihat Sukarno-Hatta sudah identik dengan rakyat. Kenyataannya kemerdekaan disambut dimana-mana, dan Sukarno-Hatta, bukan hanya diakui sebagai pemimpin nasional, tetapi juga dipatuhi apa yang oleh kedua tokoh itu dianggap perlu dikerjakan rakyat atau yang tidak boleh dikerjakan rakyat. Karena itu adalah tidak mungkin untuk menjatuhkan Sukarno-Hatta. Sebab, kalau menjatuhkan Sukarno-Hatta berarti berhadapan dengan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Jalan satu-satunya yang bisa dilakukan adalah mengangkat Sukarno-Hatta ke atas derajat yang setinggi-tingginya, tapi kekuasaan sebenarnya berada pada golongan

18) Wawancara dengan Subadio Sastrosatomo, Jakarta, 23 - 24 Januari 1978.

Menurut dr. Tadjuluddin pertemuan tersebut tidak dilakukan sekali, tetapi beberapa kali. Wawancara dengan dr. Tadjuluddin, Jakarta, 17 dan 31 Oktober 1978, (Dokumentasi Sub-Bidang Sejarah Lisan Arsip Nasional R.I.).

Pada jaman Jepang pertemuan-pertemuan semacam ini dilakukan di Jalan Tambak.

19) *Berita Indonesia*, I, 27, 13 November 1945. *Sjahrir, Pikiran dan Perdjoeangan*, hal 70 - 71. Lihat juga Soe - Hok - Gie, "Simpang kiri dari sebuah jalan". (Skripsi Sarjana pada Jurusan Sejarah FSUI, tidak diterbitkan), hal 55 - 57. Sjahbuddin Mangandar Alam, Op. Cit, hal 47

sosialis demokrat.

Bertolak dari kesimpulan bahwa Sukarno-Hatta tidak usah dijatuhkan tetapi kekuasaan yang sebenarnya berada pada golongan sosialis demokrat, maka dirumuskanlah suatu strategi perjuangan yang menurut Subadio Sastrosatomo dirumuskan di rumahnya di jalan Guntur 23. Diantara mereka yang hadir adalah : Supeno, Ir Sakirman Sarmidi Mangunsarkoro, dan Subadio Sastrosatomo. Strategi perjuangan yang mereka rumuskan adalah : pertama, KNIP yang saat itu masih merupakan pembantu Presiden, harus dijadikan sebagai badan legislatif, sementara MPR dan DPR belum terbentuk. Kedua, setelah KNIP menjadi badan legislatif, akan diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, antar lain dengan mengintroduksi sistem kabinet parlementer. Ketiga, membentuk kabinet parlementer dengan Sjahrir sebagai perdana menteri dan golongan sosialis demokrat akan menduduki sebagian besar jabatan menteri. Bagaimanapun juga keputusan itu tidak jauh berbeda dengan jalan pikiran Sjahrir, khususnya apa yang diungkapkannya dalam brosur **Perdjoangan Kita**. Brosur ini berisi kritik Sjahrir terhadap situasi saat itu dan konsepsinya untuk mengatasi situasi tersebut. Menurut Sjahrir Republik Indonesia harus dijadikan alat perjuangan demokratis, yakni dengan membersihkan pemerintahan dari sisa fasisme Jepang. Undang-undang dasar yang belum sempurna demokratis harus ditukar dengan undang-undang dasar demokrasi yang tulus, di mana kekuasaan betul-betul berada ditangan rakyat. Rakyat mempunyai kemerdekaan berfikir, berbicara, beragama, menulis, mendapat kehidupan, mendapat pendidikan, dan turut membentuk dan menentukan susunan dan urusan negara dengan hak memilih dan dipilih.²⁰ Menurut dugaan Sjahrir saat itu, bahwa peraturan internasional setelah tahun 1946 adalah pertentangan kepentingan antara neo-kolonialisme dengan sosialis Rusia. Oleh karena itu kita di Indonesia harus segera mengadakan revolusi kerakyatan yang bertujuan untuk menghancurkan feodalisme. Revolusi Indonesia tidak sama dengan revolusi Perancis. Revolusi Indonesia adalah revolusi kerakyatan dan revolusi sosial. Tujuan revolusi Indonesia bukanlah nasionalisme melainkan demokrasi. Dengan kata lain demokrasi dulu baru nasionalisme bukan sebaliknya nasionalisme dulu baru demokrasi.²¹

Dengan inti demokrasi dulu baru nasionalisme, dan dengan berpegang pada petunjuk strategi perjuangan yang telah dirumuskan, maka **manoeuvre** pertama dari kelompok Sjahrir di KNIP mulai dilaksanakan yakni dengan referendum dari lima puluh orang anggota KNIP tanggal 7 1945, yang mendesak Presiden agar memaknai kekuasaan istimewanya untuk membentuk MPR dengan

20) Sutan Sjahrir, *Perdjoangan Kita*, hal 25.

21) *Ibid*, hal 39

segera. Sebelum MPR itu terbentuk agar anggota-anggota KNIP yang ada dianggap sebagai MPR

Kalau diperhatikan betul cara-cara yang dipakai untuk mengajukan referendum itu maka makin jelas bahwa referendum itu adalah ciptaan kelompok Sjahrir. Hal itu bukan hanya terlihat dari isinya, tapi juga alatnya, yaitu memanfaatkan Presiden. Disini jelas bahwa kelompok Sjahrir tidak menginginkan Sukarno jatuh.

Referendum itu diolah oleh Ir. Sakirman, Sarmidi Mangunsarkoro, Nvonya Mangunsarkoro dan Supeno. Mereka mengadakan pendekatan-pendekatan kepada anggota KNIP yang ada di Jakarta, sehingga berhasil mengumpulkan tanda-tanda sebanyak lima puluh. Referendum inilah seperti yang sudah disebutkan di muka merupakan penyebab langsung diadakannya Sidang Pleno I KNIP di Jakarta tanggal 16 - 17 Oktober 1945, yang kemudian melahirkan Badan Pekerja KNIP.

Badan Pekerja KNIP Periode Jakarta.

Sidang Pleno I KNIP iut diadakan di Gedung Balai Muslimin. Wakil Presiden Moh. Hatta hadir dalam sidang ini, tapi Presiden Sukarno tidak, karena sedang berada di Sukabumi.²²⁾ Kebanyakan para Menteri juga turut hadir.

Setelah pidato pembukaan oleh ketua KNIP Kasman Singodimedjo, sidang kemudian mendengarkan pidato Ir. Sakirman,²³⁾ yang pada tanggal 7 Oktober telah mengajukan referendum bersama 50 orang anggota KNIP agar diberi kekuasaan MPR.

Ketika referendum itu dibicarakan, salah seorang yang mengambil kesempatan berbicara adalah Amir Sjarifuddin. Menurut Amir, berhubung situasi yang sangat genting dengan mendaratnya Sekutu, banyak kemungkinan para anggota tidak akan bisa hadir pada setiap rapat yang diadakan KNIP. Selain itu KNIP yang begitu besar dengan anggota yang begitu banyak akan sukar mengambil keputusan cepat sesuai dengan suasana genting. Karena itu Amir mengusulkan agar dibentuk sebuah **Working committee**, yang buat sementara waktu disertai tugas legislatif.²⁴⁾ Amir mencontoh **Working committee** yang terdapat pada **Indian National Congress di India**. **Working committee** atau Badan Pekerja itu menurut Amir akan bersidang sepuluh hari sekali, sedangkan KNIP setahun sekali.²⁵⁾

Kedua usul itu kemudian dibicarakan, dan diputuskan bahwa KNIP segera mengirim surat pada pemerintah. Karena Wakil Presiden Hatta ada dalam ruangan itu, maka surat yang diajukan kepada Pemerintah itu langsung saja diolah dan dibalas. Konsep

22) Wawancara dengan Moh. Hatta, Jakarta, 19 Januari 1978.

23) "First session of central national committee at Batavia". *The voice of free Indonesia*, No. 1, Oktober 1945, hal 3 - 4.

24) Wawancara dengan Subadio Sastrosatomo, Jakarta, 23 - 24 Januari 1978.

25) George McTurman Kahin, *Nationalism and revolution in Indonesia*. (Ithaca : Cornell University Press, 1970)? hal 152.

balasan itu digarap oleh Hatta, Sekretaris Negara A.G. Pringgodigdo dan Amir Sjarifuddin sendiri. Surat balasan Pemerintah itu berbentuk Maklumat yang kemudian lebih terkenal dengan Maklumat No. X (baca eks).²⁶⁾ Bunyi lengkap Maklumat Pemerintah itu adalah :

Presiden Republik Indonesia sesudah mendengar pembicaraan oleh Komite Nasional Pusat tentang usul supaya sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dibentuk kekuasaannya yang hingga sekrang dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional menurut Pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-Undang Dasar hendaknya dikerjakan oleh Komite Nasional Pusat dan supaya pekerjaan Komite Nasional Pusat itu sehari-harinya berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan bernama Dewan Pekerja yang bertanggungjawab kepada Komite Nasional Pusat;

Menimbang bawa di dalam keadaan yang genting ini perlu ada badan yang ikut bertanggungjawab tentang nasib bangsa Indonesia, di sebelah Pemerintah;

Menimbang selanjutnya bahwa usul tadi berdasarkan paham kedaulatan rakyat;

Memutuskan : bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat disertai tugas kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara mereka dan bertanggungjawab kepada Komite Nasional Pusat.

Jakarta, 16 Oktober 1945
Wakil Presiden Republik Indonesia

Mohammad Hatta

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa Komite Nasional menjadi badan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara. Kedua, bahwa Badan Pekerja merupakan pelaksana sehari-hari dari KNIP dan bertanggungjawab kepadanya.

Maklumat No. X tidak memuat secara jelas hak dan kewajiban Badan Pekerja. Hak dan kewajiban itu baru dijelaskan empat hari kemudian oleh Badan Pekerja sendiri. Penjelasan itu dikeluarkan

²⁶⁾ Koesnodiprodjo, *Op. cit.* hal 58. Menurut Hatta No. X diberikan kepada Maklumat itu berhubung karena A.G. Pringgodigdo lupa nomor agenda yang terakhir dari surat-surat kepresidenan, sehingga sementara diberi dulu No. X. Tapi karena Maklumat itu sudah disiarkan Pers mulai hari itu, maka No. X (eks) itu diputuskan Hatta untuk tidak dirubah lagi.

Wawancara dengan Hatta, Jakarta, 19 Januari 1978.

tanggal 20 Oktober 1945,²⁷⁾ berisi bahwa kewajiban Badan Pekerja adalah :

Pertama, turut menetapkan garis-garis besar haluan negara. Hal ini berarti bahwa Badan Pekerja KNIP bersama-sama dengan Presiden menetapkan garis-garis besar haluan negara. Kedua, bersama-sama Presiden menetapkan undang-undang. Dengan demikian tugas pertama merupakan tugas MPR, dan tugas kedua mengemban tugas DPR.

Kalau kita perhatikan Maklumat No. X dan penjelasan yang diberikan kemudian yang berhubungan dengan Maklumat tersebut, terlihat bahwa Maklumat No. X itu merubah secara drastis makna Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Maklumat No. X itu dengan sendirinya mengurangi kekuasaan Presiden,²⁸⁾ yang semula KNIP berada dalam posisi sebagai pembantu Presiden, kemudian dengan kata di sebelah menjadi badan tersendiri dan mempunyai kekuasaan legislatif.²⁹⁾ Maklumat No. X yang kelahirannya didorong oleh adanya Sidang Pleno I KNIP itu, juga telah menjadikan KNIP pleno semacam MPR dan Badan Pekerja KNIP semacam DPR.³⁰⁾

Setelah Maklumat No. X itu disiarkan kepada pers oleh Menteri Penerangan Amir Sjarifuddin, Sidang Pleno KNIP hari pertama itu diteruskan. Dalam acara lanjutan ini muncul lagi sebuah persoalan baru, yakni siapa yang akan memimpin Badan Pekerja itu. Ketika itulah seorang tokoh pemuda lainnya Sukarni naik ke mimbar dan menyampaikan sebuah mosi yang menghendaki agar yang memimpin KNIP haruslah orang yang berjiwa revolusioner selaras dengan semangat rakyat dan pemuda.³¹⁾ Dengan mosi Sukarni itu, Ketua KNIP yang lama Mr. Kasman Singodimedjo kemudian secara suka rela mengundurkan diri, dan pimpinan sidang sementara dipegang oleh Mr. Latuharhary, wakil ketua KNIP. Namun masalah pokok belum terjawab dengan mundurnya Kasman. Siapa yang akan memimpin Badan Pekerja yang sekaligus memimpin KNIP. Dalam kesempatan itu, Sukarni dan Nyonya Mangunsarkoro mengusulkan nama Sjahrir. Sidang kemudian memilih Sjahrir dan Amir Sjarifuddin menjadi formatur untuk menyusun komposisi dan personalia Badan Pekerja.

Sidang Pleno I KNIP hari pertama hanya sampai pada penunjukan formatur. Keesokan harinya pada awal sidang, ketua meminta

27) Koesnodiprodjo, *Ibid.* hal 59. Lihat juga Berita Indonesia, I, No. 14, tanggal 23 Oktober 1945. Dan Osman Raliby, *Op. cit.* hal 60.

28) A.K. Pringgodigdo, *Kedudukan Presiden menurut tiga Undang-Undang Dasar dalam teori dan praktek.* (Jakarta, 1956), hal 11 - 13.

29) J.C.T. Simorangkir dan Mang Reng Say, *Tentang dan sekitar Undang-Undang Dasar 1945.* (Jakarta, 1971) Hal 105 - 106.
Lihat juga A. Halim, *Op. cit.* hal 14.

30) Wawancara-dengan Mr. Kasman Singodimedjo, Jakarta, 16 Januari 1978.
Wawancara dengan Hatta, Jakarta, 19 Januari 1978.

31) *Berita Indonesia*, I, No. 12, 18 Oktober 1945.

formatur untuk menyampaikan hasil kerjanya. Jumlah anggota KNIP adalah lima belas orang termasuk ketua, wakil ketua dan sekretaris.³²⁾ Mereka-mereka itu adalah :

1. Ketua : Sutan Sjahrir
2. Wakil Ketua : Amir Sjarifuddin.
3. Sekretaris : Mr. R. Suwandi.
4. Anggota : Mr. Sjafruddin Prawiranegara.
5. Anggota : Wachid Hasjim.
6. Anggota : Mr. R. Hindromartono.
7. Anggota : Mr. R.M. Sunarta Kolopaking.
8. Anggota : dr. A. Halim.
9. Anggota : Subadio Sastrosatomo.
10. anggota : Tan Ling Djie.
11. Anggota : Supeno
12. Anggota : S. Mangunsarkoro.
13. Anggota : Adam Malik.
14. Anggota : Tadjuluddin.
15. Anggota : dr. Sudarsono.

Setelah mengumumkan nama-nama anggota Badan Pekerja ini, maka mereka satu persatu diperkenalkan Sjahrir di hadapan sidang. Dan setelah itu ketua sidang langsung diserahkan-terimakan dari Mr. Latuharhary kepada Sutan Sjahrir. Sejak itu Sjahrir resmi menjadi ketua sampai diadakannya Sidang Pleno KNIP berikutnya.

Badan Pekerja KNIP pimpinan Sjahrir ini, memang lebih gesit daripada KNIP pimpinan Kasman. Akan tetapi kalau kita dengan tenang menelusuri hasil-hasil Badan Pekerja dalam bulan-bulan pertama sejak pembentukannya, sebagian dari karya mereka memang didorong oleh fungsinya sebagai badan legislatif, sedangkan sebagian lagi nampaknya membawakan suara kelompok Sjahrir. Kelompok ini telah berhasil menjadikan KNIP sebagai badan legislatif. Dua target mereka yang belum tercapai adalah mengintroduksi sistem parlementer dengan mengubah undang-undang dasar, dan kedua membentuk kabinet yang bertanggung jawab pada parlemen di mana Sjahrir akan muncul sebagai perdana menteri.

Yang berhak merubah undang-undang dasar hanyalah MPR, dan itu hanya bisa dilakukan kalau para anggotanya telah dipilih melalui pemilihan umum. Dan untuk menghadapi pemilihan umum itu tentu harus ada partai-partai yang bertarung. Bahwa pemilihan umum akan diadakan sudah diumumkan Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945. Dengan demikian tinggal wadah yang akan bertarung, yakni partai-partai.

Ketika rapat PPKI dilangsungkan, pernah diperkenalkan sistem satu partai, yang disebut sebagai Partai Nasional Indonesia (PNI). Tapi realisasi PNI ini kemudian dibatalkan Pemerintah dengan telah

32) Koésnodiprodjo, Op. cit, hal 141.

dilantiknya Komite Nasional Pusat pada tanggal 29 Agustus 1945.

Kelompok Sjahrir rupanya berhasil memanfaatkan momentum ini melalui Badan Pekerja tanggal 30 Oktober 1945, yakni dengan mengusulkan kepada Pemerintah (Presiden) agar rakyat diberi kesempatan untuk mendirikan partai-partai politik.³³⁾ Usul Badan Pekerja inilah yang kemudian menghasilkan Maklumat Wakil Presiden 3 Nopember 1945 yang berisi "menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat."³⁴⁾

Manoeuvre selanjutnya dari kelompok Sjahrir adalah pengumuman Badan Pekerja No. 5 yang dikeluarkan berdasarkan hasil rapat Badan Pekerja tanggal 11 November 1945.³⁵⁾ Pengumuman ini berisi usul Badan Pekerja tentang pertanggung jawaban menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang sementara itu dijalankan oleh Badan Pekerja. Pertimbangan yang diajukan atas usul tersebut adalah dengan dirubahnya Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar oleh Maklumat No. X yang menjadikan KNIP sebagai badan legislatif. Karena itu menurut pendapat Badan Pekerja harus ada pertanggung jawaban menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk kesekian kalinya usul tersebut dibawa kepada Wakil Presiden Hatta, dan ternyata Hatta dapat menyetujuinya. Usul inilah yang kemudian dijadikan alasan untuk menunjukkan Sjahrir menjadi formatur kabinet dan kemudian pada tanggal 14 November 1945 mengumumkan susunan kabinetnya dengan Sjahrir sebagai Perdana Menteri.

Dengan terbentuknya Kabinet Sjahrir, maka tiga rumusan strategis perjuangan kelompok Sjahrir telah terlaksana tanpa merubah satu pasalpun dari UUD 1945. Belakng orang mengumpulkan bahwa apa yang dilakukan kelompok sjahrir ini tidak sesuai dengan UUD.

Secara formal tidak terlihat kesan bahwa semua perubahan-perubahan yang terjadi pada KNIP dan Badan Pekerja KNIP serta pembentukan kabinet yang bertanggungjawab kepada parlemen, merupakan target kelompok sjahrir. Sidang Pleno II KNIP yang diadakan tanggal 25 - 27 November 1945 yang semula bertujuan untuk membahas secara mendalam masalah pembentukan Kabinet Sjahrir ini, ternyata dimanfaatkan secara baik oleh kelompok Sjahrir untuk mencari pengakuan (legitimacy) atas pembentukan kabinet itu. Dari kaca mata ini kelompok Sjahrir telah berhasil memunculkan kesan bahwa target mereka dijalankan secara legal. Namun bertolak dari Pasal 17 UUD 1945, khususnya ayat 2, "Menteri-menteri itu

33) Lihat pengumuman Badan Pekerja No. 3 dalam Koesnodiprodjo, *Op.cit.* hal 136-137

34) *Dokumentasi Republik Indonesia*, No. 1, 1945, hal 65.

35) Koesnodiprodjo, *Op.cit.* hal 139

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden". maka Kabinet Sjahrir adalah inkonstitusional (menyeleweng) dari UUD 1945. Atas dasar kenyataan itu adalah wajar kalau ada kesimpulan bahwa baik pembentukan Badan Pekerja KNIP maupun kabinet parlementer merupakan **a silent coup**, kudeta tidak berdarah atau mungkin bisa disebutkan sebagai perebutan kekuasaan yang tidak disadari oleh yang terkena kudeta. Salah satu pembenaran yang dikemukakan saat itu adalah istilah konvensi.

Reaksi-reaksi

Badan Pekerja KNIP (1945-1950) dapat dibagi atas tiga periode berdasarkan lokasi di tempat mana badan Pekerja itu bekerja, yakni periode Jakarta (Oktober 1945 - Maret 1946); periode Purwodjaja (Maret 1946 - Maret 1947); dan periode Yogyakarta (Maret 1947 - sampai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia). Selama Badan Pekerja KNIP periode Jakarta telah diadakan dua kali sidang pleno, yakni 25 - 27 November 1945 di Jakarta, dan sidang pleno di solo tanggal 28 Pebruari 1946 - 3 Maret 1946.

Reaksi pertama terhadap aktivitas kelompok Sjahrir ini muncul pada sidang pleno II KNIP tanggal 25 - 27 November di Jakarta. Namun kelompok Sjahrir masih sangat kuat. Perubahan yang terjadi hanyalah pada jumlah keanggotaan badan Pekerja yang semula berjumlah lima belas orang kemudian berubah menjadi dua puluh lima orang. Walaupun Sjahrir tidak lagi menduduki jabatan ketua Badan Pekerja karena sudah menjadi Perdana Menteri RI, namun dalam komposisi personalia Badan Pekerja yang baru itu kelompok Sjahrir masih menguasai sekitar 50 % suara.

Reaksi yang sangat keras muncul dari Persatuan Perjuangan, yakni sebuah organisasi yang menghimpun tidak kurang dari 141 organisasi (partaik lasykar, badan-badan perjuangan dan juga tentara) yang berhasil disponsori Tan Malaka di Purwokerto,³⁶⁾ tanggal 3 - 5 Januari 1946, dan di Solo tanggal 16 Januari 1946.³⁷⁾

Sebagian besar dari aksi-aksi yang dilaksanakan oleh Persatuan Perjuangan dengan tujuh pasal minimum programnya ditujukan bukan hanya terhadap Kabinet Sjahrir, tetapi juga terhadap Badan Pekerja dan KNIP. Aksi-aksi Persatuan Perjuangan inilah yang merupakan penyebab langsung diadakannya Sidang Pleno III KNIP di Solo (28 Feb. - 3 maret 1946). Posisi kelompok Sjahrir pada sidang pleno ini sudah sangat goyah, dan hanya bisa berhasil diselamatkan dengan menumpang kewibawaan Dwitunggal Sukarno-Hatta. Dan ketika inilah diputuskan bahwa Badan Pekerja KNIP dipindahkan dari Jakarta.

Jakarta, November 1981

36) Tan Malaka, *Dari Penjara kepenjara*. Jilid III (tk, Pustaka Murba. tt), hal. 60. Lihat juga Soe-Hog-Gie, *Loc. Cit.*, hal 81 - 82.

37) Tan Malaka, *Ibid.*, hal 59. Lihat juga Boeroeh, II No. 13. 16 Januari 1946.

DAFTAR BACAAN

A. Koran dan Majalah.

1. **Asia Raya** (1943 - 1945).
2. **Berita Indonesia** (1945 - 1946).
3. **Berjoeng** (1946).
4. **Boeroeh** (1945 - 1946).
5. **The voice of Free Indonesia** (1945 - 1946).

B. Penerbitan arsip dan Publikasi resmi.

Dokumentasi republik Indonesia, No. 1.

Koesnodiprodo. **Himpunan Undang2, Peraturan, Penetapan2, Pemerintah Indonesia** 1945. Jakarta : S.K. Seno, 1951.

"Pemberitaan Badan Pekerja Komite Nasional Poesat tentang pekerjaannya dalam masa 27 Nopember 1945 - 28 Pebruari 1946".
(Dokumentasi Rijkinstituut voor Oorlogdocumentatie).

C. Artikel - Artikel

Halim, Abdul. "Menoedjoe ke Parlemen Sempoerna". **Revue Indonesia**, Nomer peringatan setahun Republik Indonesia.

Gie, Soe-Hok. "Simpang sarjana pada jurusan sejarah FSUI, 1969. tidak diterbitkan).

D. Buku - buku

Anderson, Benedict R.O'G. **Java in time of revolution: occupation and resistance** 1944 - 1946. Ithaca : Cornell University Press, 1972.

Anwar, Rosihan. **Perjalanan terakhir pahlawan nasional Sutan Sjahrir**. Jakarta : Pembangunan, 1966.

Djojoadisuryo, Ahmad Subardjo. **Lahirnya Republik Indonesia**. Jakarta ; Kinta, 1951.

Hatta, Mohammad. **Demokrasi Kita**. Jakarta : Pustaka Antara, 1966

Sekitar Proklamasi. Jakarta : Tintamas, 1970

Kahin, George McTurnan. **Nationalism and revolution in Indonesia**. Ithaca : Cornell University Press, 1970.

malaka, Tan. **Dari Pendjara ke Pendjara**. Jilid II dan III. tk. : Pustaka Murba, tt.

Moerba, Hasa. **Membentock Kabinet yang ketiga**. Mataram : Nusantara, 1945.

Pringgodigdo, A.K. **Tiga Undang-Undang Dasar**. Jakarta : Pembangunan, 1956.

Raliby, Usman. **Documenta Historica**. Jakarta : Bulan Bintang, 1953.

Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta : DPRGR, tt.

Sepuluh Tahun Parlemen Republik Indonesia. Jakarta : Sekretariat

DPR - RI, 1960.

Simorangkir, J.C.T. **Tentang dan sekitar Majelis Permusyawaratan Rakyat.** Jakarta : Erlangga, 1972.

-----**Tentang dan sekitar Undang-Undang dasar 1945.** Djakarta: Djembatan, 1971.

Sjahrir, Sutan. **Pikiran Perdjoengan.** Jakarta : Pustaka Rakyat, 1947.

-----**Perdjoengan Kita.** Tk. Lembaga Kebudayaan Indo-Tk.: Lembaga Kebudayaan Indonesia, tt. tt.

----- **sosialisme dan Marxisme; suatu kritik terhadap marxisme.** Jakarta : Djembatan, 1967.

Sudijono, Djojoprajitno. **pki Sibar contra Tan Malaka; Pemberontakan 1926 & Kambing Hitam Tan Malaka.** Djakarta : Jajasan Massa, tt.

Suwarto, w. **Pokok-pokok Adjaran Tan Malaka (Murbalsme).** Seri Konsolidasi Partai Murba No. 2, 1960.

Tjokroaminoto, H.O.S. **islam dan Socialisme.** Djakarta : Bulan Bintang, 1950.

Yamin, Mohammad. **Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945; memuat segala naskah resmi penggalang Undang-Undang dasar 45 yang berlaku kembali dalam negara kesatuan RI.**

E. Wawancara :

1. Moh: Hatta.
2. Ahmad Subardjo.Djojoadisuryo.
3. Kasman Singodimedjo.
4. Sunario.
5. Subadio Sastrosatomo.
6. dr. A. Halim.
7. dr. Tadjuluddin.
8. Mr. sjafruddin Prawiranegara.

PENGARUH RASIONALISASI TERHADAP BADAN-BADAN PERJUANGAN TNI (1947 - 1950)

Oleh : Drs. Ariwiadi

B A B I

P E N D A H U L U A N

Timbulnya secara spontan organisasi-organisasi pemuda dengan corak dan gaya yang berbeda dengan organisasi-organisasi pemuda sebelumnya sejak bulan Agustus 1945 menunjukkan secara nyata partisipasi mereka dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Diantara organisasi-organisasi pemuda tersebut muncul organisasi bersenjata dalam wadah badan-badan perjuangan serta organisasi kelaskaran.

Ciri utama dari kedua jenis organisasi pemuda yang memainkan bagian penting dalam perjuangan bersenjata pada masa awal Perang Kemerdekaan, bahwa organisasi kepemudaan ini pada dasarnya adalah organisasi sukarela (*voluntary organization*) yang memiliki satu unit yang dipersenjatai. Di samping kesatuan yang memiliki persenjataan, maka terdapat bagian-bagian yang lebih banyak melakukan kegiatannya pada masalah-masalah politik serta pemerintahan.

Diantara berbagai organisasi badan-badan perjuangan terdapat perbedaan dalam pandangan serta latar belakang historis maupun sosial. Pada umumnya badan-badan perjuangan bersifat : lokal, etnis (kedaerahan) dan ideologis.

Biasanya organisasi perjuangan yang bersifat lokal yang pertama muncul disertai suatu gagasan yang dapat memikat para pemuda. Organisasi-organisasi kepemudaan yang muncul di daerah-daerah semula bersifat lokal. Disamping organisasi-organisasi yang bersifat lokal yang berdiri karena diilhami, atau memang sengaja dibentuk oleh salah satu dari organisasi lokal yang besar. Dengan demikian maka jenis organisasi lokal yang disebut terakhir itu tidak lagi bersifat lokal. Muncul kemudian suatu organisasi dengan struktur yang lebih luas.

Diselenggarakannya Kongres Pemuda I di Yogyakarta pada bulan November 1945 merupakan suatu upaya untuk menyatukan organisasi-organisasi kepemudaan. Usaha ini mengalami kegagalan, karena kemudian muncul dua kelompok besar, yaitu Pesindo (Pemuda sosialis Indonesia) serta badan Konggres Pemuda Indonesia yang merupakan suatu federasi dari pelbagai macam organisasi kepemudaan. Mengenai jenis organisasi pemuda yang bersifat etnis semula bersifat lokal. Organisasi ini muncul di kota-kota besar di Jawa, karena banyaknya suku bangsa Indonesia lainnya yang bermukim di sana sejak sebelum Perang Kemerdekaan. Sebagian besar dari badan-badan perjuangan yang bersifat etnis umumnya mengambil ilham dari berbagai organisasi besar yang sudah ada, seperti API, PRI, dll.

Suatu ciri khas dari badan-badan perjuangan yang bersifat etnis adalah menjaga keamanan kelompok etnis di kota-kota besar yang bersangkutan. Sebagian dari organisasi badan-badan perjuangan dari jenis yang disebut di muka umumnya memiliki keyakinan ideologis. Diantara badan-badan perjuangan ada yang muncul berdasarkan pengalaman-pengalaman yang bisa ditarik akarnya jauh kemasa Pergerakan Nasional. Pengaruh ideologi baru nampak jelas dalam badan-badan perjuangan setelah Pemerintah mengeluarkan "Maklumat" tanggal 3 November 1945 yang antara lain menyatakan bahwa masyarakat diperbolehkan mendirikan partai-partai politik untuk menyalurkan keinginan-keinginan politik mereka secara lega. Hal ini berarti bahwa usaha semula untuk membentuk satu partai saja, yaitu Partai Nasional Indonesia dilepaskan.

Maklumat ini merupakan bagian dari kebijaksanaan pemerintah pada waktu itu untuk mengadakan pendekatan diplomatik dengan pihak Sekutu. Maksudnya adalah untuk memperlihatkan pada dunia luar, terutama pihak Sekutu (sebagai pemenang Perang Dunia II) bahwa Indonesia melaksanakan idea demokrasi, sejalan dengan cara pemerintahan mereka. Dengan adanya dorongan pemerintah tersebut, maka di Indonesia dalam waktu singkat bermunculan berbagai macam partai politik.

Partai-partai politik berlain dengan badan-badan perjuangan. partai-partai politik yang merupakan alat pengarah partisipasi rakyat dalam bidang politik sebenarnya lebih sesuai kemunculannya pada masa damai, bukan pada saat-saat kita sedang berjuang menegakkan kemerdekaan. Seperti dikemukakan di muka, eksistensi partai-partai politik pada waktu itu dibutuhkan karena pertimbangan-pertimbangan praktis, yaitu sebagai suatu strategi untuk menegakkan kemerdekaan. Kemunculan berbagai macam partai dalam bentuk multi partai pada saat itu sebenarnya tidak sesuai dengan iklim perjuangan yang sedang berlangsung. Berlain dengan kemunculan partai-partai politik, pemunculan badan-badan perjuangan lebih wajar, karena sesuai dengan keadaan yang belum menentang.

Kehadiran mereka lebih diarahkan. Kekalutan yang kemudian muncul pada badan-badan perjuangan penyebabnya karena ulah beberapa partai politik tertentu. Karena kemudian ada golongan tertentu yang mencoba memanfaatkan keadaan ini untuk kepentingan mereka dalam usaha merebut kepemimpinan politik dalam masa perjuangan, maka pemerintah memutuskan untuk menggabungkan sebagian dari badan-badan perjuangan tersebut kedalam organisasi resmi ketentaraan (TNI).

BAB II

RASIONALISASI

1. Lahirnya konsep Rasionalisasi.

Zainal Baharudin, seorang anggota fraksi sayap kiri KNIP pada bulan Desember 1947 mengajukan suatu mosi agar dikalangan angkatan perang dilaksanakan rasionalisasi. Gagasan rasionalisasi ini sebelumnya sudah terdenar sejak pertengahan tahun 1947. Mosi yang diajukan oleh Zainal Baharudin pada tanggal 20 Desember 1947 memuat dua hal pokok ialah : "agar diadakan rekonstruksi dan rasionalisasi (RERA) dalam kesatuan Angkatan Perang dan Menteri Pertahanan disertai tanggung jawab penuh dalam hal organisasi maupun dalam masalah pertahanan". Mosi ini kemudian diterima oleh BPKNIP.

Karena rencana Rera berasal dari golongan sayap kiri, maka tidak dapat dihindarkan bahwa tujuannya untuk memperkuat sayap kiri dalam tubuh Angkatan Perang. Nampaknya tujuan Rera ingin melaksanakan penghematan sebab dalam keadaan ekonomi lemah tidak mungkin Pemerintah membiayai Angkatan Perang dalam jumlah besar. Inti dari Rera untuk menyalurkan tenaga yang berlebihan ke bidang-bidang yang produktif serta berguna bagi pembangunan negara. Rera kemudian dilaksanakan oleh Perdana Menteri/Menteri Pertahanan yang berhaluan kiri Mr. Amir Sjarifuddin. Oleh Perdana Menteri Amir Sjarifuddin waktu itu dikeluarkan Penetapan Presiden nomor 1 tahun 1948 pada tanggal 2 Januari 1948. Sesuai isi penetapan itu, maka pucuk pimpinan angkatan Perang dibubarkan. Amir Sjarifuddin menampilkan dua orang tokoh muda, ialah Komodor Suryadarma serta Kolonel T.B. Simatupang yang masing-masing menjadi Kepala Staf dan Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, sedang Jenderal Sudirman ditetapkan menjadi Panglima Besar Angkatan Perang. Dengan struktur baru ini berarti bahwa Jenderal Sudirman harus tunduk kepada Kepala Staf Umum yang dijabat oleh tokoh yang lebih rendah pangkatnya, demikian pula Letnan Jenderal Oerip Sumohardjo yang belum diberhentikan, sedangkan pejabat baru sudah diangkat. Reaksi pertama ditunjukkan oleh Seksi Badan Pertahanan Pekerja KNIP (BP KNIP). Seksi Pertahanan badan Pekerja KNIP (BPKNIP) menyatakan penyesalannya, karena cara pengumuman yang dikeluarkan dianggap kurang tepat. Mereka sebenarnya mengharapkan dikeluarkannya pengumuman tentang rekonstruksi dan reorganisasi dan baru kemudian disusul dengan struktur personalnya.

Setelah Kabinet amir Sjarifuddin diganti dengan Kabinet Hatta, rencana Rera yang dinilai rasional tetap dilanjutkan dengan tekanan pada kepentingan ekonomi. Kesulitan yang dihadapi Pemerintah semakin bertambah berat sebagai akibat-akibat yang ditimbulkan oleh persetujuan Renville ini. Daerah Republik di Jawa

Tengah sebagai akibat persetujuan Renville ini hanya tinggal Jawa Tengah bagian Selatan dan Banten. Serta harus menampung kira-kira 1.000.000 pengungsi. Daerah R.I. yang merupakan daerah minus harus memberi makan kepada para pengungsi, hal ini tentu saja merupakan beban yang tidak ringan bagi Kabinet Hatta. Di samping itu terdapat pengangguran di mana-mana, sedang di kementerian-kementerian, di kantor-kantor pemerintah lainnya terdapat kelebihan tenaga kerja. Di bidang Militer kabinet mencari jalan bagaimana mengurangi jumlah personalia militer yang jauh melebihi batas jumlahnya. Pada waktu itu terdapat kurang lebih 350.000 anggota angkatan Perang ditambah lagi dengan 90.000 laskar-laskar yang tergabung dalam Biro Perjuangan, belum tercantum laskar-laskar yang berada di Sumatera, seperti di Sumatera Selatan, di Tapanuli, Aceh, Sumatera Timur bagian utara. Semua ini harus dibiayai oleh Pemerintah, di mana secara geografis dan sosial ekonomis sudah tidak memungkinkan lagi untuk membiayai pasukan yang besar. 1)

Untuk menampung Rasionalisasi di Jawa maka pemerintah telah merencanakan beberapa proyek penampungan, seperti menempatkan mereka yang terkena rasionalisasi pada tempat penggantian negara Caruban dekat Madiun. Usaha ini ternyata kurang berhasil. Pada hari pertama dapat ditempatkan di sana kira-kira 90 orang, sedang pada hari kedua yang datang masuk kerja kurang dari 30 orang. Pada hari ketiga ternyata tidak ada yang datang. Mereka juga ada yang ditempatkan pada Jawatan Kehutanan untuk menjaga supaya jangan lagi terjadi pencurian kayu, serta mengusahakan pula tanaman kayu-kayu baru. Usaha ini ternyata lebih berhasil, berlangsung sampai masa Agresi Militer II Belanda.2)

2. Masa kelaskaran di Jawa

Pada masa awal Kemerdekaan badan-badan perjuangan umumnya masih memegang teguh prinsip perjuangan mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Tujuan murni perjuangan kelompok badan-badan perjuangan untuk mengusir Belanda ini menampakkan kekompakkannya sebelum Konggres Pemuda (Agustus - Nopember 1945). Setelah berlangsung Konggres Pemuda di Yogyakarta pada tanggal 10 Nopember 1945, suasana perpecahan mulai terasa. Adanya pengaruh politik yang mewarnai organisasi kelaskaran menyebabkan terjadinya perpecahan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dengan kebijaksanaan yang ditempuh oleh Pemerintah. Pemerintah dengan politik diplomasinya serta sifat pemerintahannya yang parlementaris telah mengundang pertentangan antara sesama bangsa dan kemudian menjurus kepada perpecahan. Situasi ini dipercepat dengan adanya himbauan pemerintah untuk menyesuaikan kehidupan dengan alam demokrasi yang liberal dimana telah membuka pintu bagi kehadiran partai-partai dari berbagai golongan

yang ada. Kehadiran partai-partai ini dijelaskan dalam Maklumat Wakil Presiden No. X Nopember 1945 tanggal 3 Nopember. Sadar atau tidak sebenarnya para pengambil kebijaksanaan waktu itu telah membawa kehidupan demokrasi di Indonesia ini kepada alam perpecahan. Di kalangan badan-badan perjuangan yang berafiliasi kepada sesuatu partai, biasanya mereka membela kepentingan pimpinan maupun kelompok aliran yang dianutnya. Tenden-tenden memperjuangkan kepentingan golongan ini nampak pada badan badan perjuangan atau kelasykaran yang ada di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di Jawa Barat dan Jawa Tengah ada organisasi kelaskaran yang tidak mau mengikuti petunjuk pemerintah untuk bergabung dengan TNI dalam rangka Rasionalisasi serta juga tidak melaksanakan hijrah ke ibukota R.I. sebagai realisasi dari persetujuan Renville. Beberapa organisasi kelaskaran di Jawa Barat dan Jawa Tengah ada yang kemudian memusuhi pemerintah.

Mereka melancarkan aksi-aksi bersenjata terhadap pemerintah (resmi) R.I. yang sedang berjuang menghadapi lawan. Hal ini misalnya saja terjadi di Jawa Barat.

Dengan hijrahnya TNI dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, maka sejak bulan april 1948 hampir seperempat daerah Jawa Barat berada di bawah golongan anti Republik dan Belanda, seperti **Darul Islam** (D.I.) 3), laskar **Bambu Runcing**4) serta **Brigade Tjitarum** 5). Sejak saat itu rakyat Jawa Barat terpecah atas 3 golongan, yaitu : Golongan Rakyat yang pro Republik, Golongan Rakyat yang dipengaruhi oleh Belanda dan Pemerintah Pasundan. Masuknya pengaruh D.I. dan Pasundan/Belanda disebabkan rakyat, terutama yang tinggal di daerah pedalaman merasa kehilangan pegangan karena ditinggalkan TNI.

Disekitar Jakarta serta berbatasan dengan Jawa Barat terdapat sebagian dari pasukan Hisbullah serta Sabilillah Surya Kencana (Resimen - 7) di bawah pimpinan Kapten Tabrani. Kedua pasukan ini tidak ikut hijrah ke Yogyakarta, tetapi melanjutkan perlawanannya melawan Belanda. Mereka melancarkan gangguan-gangguan dengan menyerang pos-pos tentara Belanda.6)

Di Jawa Tengah proses pengembalian ke masyarakat atau demobilisasi bekas tentara pelajar serta anggota-anggota kelaskaran yang sejak tahun 1946 dan 1948 sudah berada di lingkungan ketentaraan baru tahun 1950 dilaksanakan.

Sebagai pedoman untuk melaksanakan demobilisasi antara lain diatur dengan Instruksi Kementerian Pertahanan No.193 tahun 1950. Berdasarkan pedoman tersebut telah dapat diselesaikan pengembalian ke masyarakat kurang lebih 20.000 orang. Adapun usaha penampungan dilaksanakan dengan secara transmigrasi keluar pulau Jawa, kembali ke bangku sekolah, memberikan lapangan pekerjaan pada lapangan agraria dan sebagainya.7)

Di Jawa Timur. K.H. Zainul Arifin, pimpinan Hisbullah serta merangkap sebagai anggota Seksi Pertahanan BPKNIP menyatakan supaya Pemerintah tidak ragu-ragu melaksanakan Nasionalisasi. Ia juga menganjurkan agar dalam penunjukkan pejabat-pejabat baru dapat dihindarkan cara pemilihan yang berat sebelah.

Rasionalisasi di kalangan Hisbullah di Jawa Timur berlangsung tanpa rintangan. Sebanyak lebih kurang 900 orang anggota Hisbullah yang berasal dari divisi Hisbullah TRI berkekuatan 3 batalion di bawah pimpinan K.H. Wahid Wahab bergabung ke dalam TNI.8) Mereka dimasukkan kedalam satuan-satuan Sub Territorial Militer (STM) serta menjadi satuan TNI yang bertugas di daerah-daerah keresidenan Jawa timur. Setelah masuk TNI satuan ini ditugaskan di STM Kediri, terdiri dari dua batalion, yaitu : Batalion Hadji Machfud (H.M.) serta Batalion Zainal Fanwi (Zainal). Kedua batalion ini ditempatkan di Ngadiredjo, Tulungagung dan Trenggalek. Di dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun kedua batalion inipun turut serta menunaikan baktinya.

Kekuatan bekas Hisbullah lainnya, yaitu bekas Resimen Hisbullah Karesidenan Surabaya setelah diadakan rekonstruksi menjadi batalion 42. Batalion ini tergabung dalam STN Surabaya.9)

3. Masalah kelaskaran di luar Jawa

Di Aceh penggabungan laskar-laskar menjadi TNI tidak mengalami hambatan. Berdasarkan ketetapan Gubernur Militer Tengku M. Daud Beureueh, maka mulai tanggal 1 Juni 1948 satuan-satuan badan perjuangan yang ada seperti : **Kelaskaran Mudjahidin Divisi X Tgk. Tjhi' Ditiro, Ksatria Peslondo Divisi Rentjong, Divisi Tgk. Tjhi' Ditiro** di Paja Rakong serta kesatuan bersenjata lainnya di Langkat dan Tanah Karo dilebur dan digabungkan menjadi TNI, bergabung menjadi Divisi X Sumatera. Dalam susunan Divisi X Sumatra terdapat unsur-unsur pimpinan laskar-laskar yang telah disatukan, seperti : **Tje mat Rahmany** dan **Abdul Mutalib**. Keduanya dari staf **Divisi X Tgk Tjhi' Ditiro** serta **ahmad Adam** dari **Ksatria Peslondo** **Divisi Rencong**.

Selanjutnya pada pelaksanaan Rera, yaitu dengan adanya struktur Komandemen Sumatra, maka Aceh masuk dalam Sub. Ter. VII.

Tengku Daud Beureueh diangkat sebagai Gubernur Militer merangkap sebagai Panglima.11)

Berlainan dengan di daerah lain, maka di Tapanuli rencana pelaksanaan rekonstruksi dan rasionalisasi ternyata mengalami kesulitan, karena masing-masing pihak ingin mempertahankan kedudukannya dalam TNI. Selain untuk Jawa suatu rencana dibuat pula untuk Sumatra. Dalam bulan April 1947 Wakil Presiden dan Wakil Panglima Besar ke Bukit Tinggi untuk membicarakannya dengan Komandemen Sumatra. Ternyata konsep dari pusat ini tidak

disetujui oleh Panglima Sumatra. Menurut pendapatnya tentara di Sumatra lebih banyak bersifat **volkleger** (tentara rakyat) dan bukan **staatsleger** (tentara negara). Karena itu perubahan-perubahan seperti pengurangan jumlah batalion sesuai dengan rencana Rera, serta pengurangan jumlah anak buah tidak mungkin diterima. Namun adanya keinginan agar pusat mengirimkan beberapa orang perwira Siliwangi untuk membantu di Sumatra diterima oleh Wakil Presiden dan Kolonel A.H. Nasution.

Sementara itu Gubernur Militer dr. Gindo Siregar berusaha terus untuk melakukan apa yang dapat diperbuatnya. Tetapi rupanya karena ia sendiri bukan tokoh militer serta kurang menguasai seluk beluk permasalahan tentara dan laskar di Tapanuli, maka tindakan-tindakannya tidak diterima, terutama oleh pihak laskar. Karena ternyata usaha-usaha yang ditempuh dr. Gindo tidak banyak berhasil maka Komandemen Sumatera mengambil inisiatif untuk menyatukan semua brigade di bawah satu pimpinan. Selanjutnya dalam bulan Agustus 1948 dibentuk suatu Sub. Komando Tapanuli Sumatra Timur Selatan. Sebagai Komandan diangkat Mr. Abbas dengan pangkat Kolonel Tituler. Kepala Stafnya adalah Mayor Bejo dan markasnya ditempatkan di Padang Sidempuan.

Sesuai dengan rencana rasionalisasi Sub Komandemen memerintahkan untuk membubarkan semua brigade-brigade yang ada di Tapanuli dan Sumatera Timur Selatan. Sebagai gantinya akan dibentuk batalion-batalion. Tetapi rupanya ada tanggapan lain mengenai Sub Komando ini. Bagi mereka yang penting adalah bahwa pemerintah bersedia menyediakan perbekalan melalui Sub Komando ini. Bagi mereka yang penting adalah bahwa pemerintah bersedia menyediakan perbekalan melalui Sub Komando. Dengan demikian maka pembentukan Sub Komando ini sudah tidak berfungsi sesuai dengan rencana. Seluruh kekuatan Sub Komando ini terdiri dari tiga Brigade yang belum mematuhi perintah untuk membaginya dalam batalion-batalion, yaitu :

Brigade Ex. Banteng Negara berkedudukan di Tarutung.

Brigade A dari Saragih serta Brigade B dari Bejo. hanya Brigade XI saja yang mematuhi perintah membubarkan diri serta membentuk batalion-batalion.

Sementara itu pasukan **Barisan Harimau Liar** (B H L) di bawah pimpinan Payung Bangun telah masuk Tapanuli Selatan. Semula pasukan ini berada di Dairi bersama Resimen Halilintar. Adanya perbedaan faham antara Payung Bangun dan Slamet Ginting dari Resimen Halilintar mendorong kedua pasukan untuk meninggalkan Dairi. Atas usaha Mayor Bejo, maka kedua laskar yang berselisih faham ini dapat didamaikan. Akhirnya dapat dibentuk tujuh batalion, merupakan gabungan kekuatan dari Brigade A, Brigade B serta pasukan-pasukan Payung Bangun.

Pihak Brigade Ex. Banteng Negara setelah didekati mau menerima gagasan untuk membentuk satu batalion. Sisa dari pasukannya dijadikan pasukan teritorial dipimpin oleh Waldemar Nainggolan. Brigade-brigade lainpun membentuk pasukan teritorial dari sisa pasukannya yang tidak dapat dimasukkan dalam batalion tersebut. Saat itu adalah konsensus antara para pimpinan laskar untuk membentuk TNI dalam rangka rasionalisasi. Sementara itu dengan berhasilnya Belanda membentuk Negara Sumatra Timur, lalu Negara Sumatera Selatan, serta memasukkan agen-agensya ke daerah Republik, maka timbul sikap saling curiga mencurigai di kalangan para pejabat dan satuan-satuan yang telah melaksanakan rasionalisasi. Kecurigaan ini makin memuncak, karena pimpinan Sub Komando Tapanuli/Sumatera Timur pun tidak dipercayai. Krisis ini bertambah memuncak, karena adanya serangkaian penangkapan atas diri Komandan Sub Komando Tapanuli/Sumatera Timur Kolonel Mr. Abbas beserta perwira stafnya oleh Mayor Bejo yang menjabat sebagai Kepala Staf Operasi Sub Komando itu. Rangkaian tindakannya melakukan penangkapan dikatakannya untuk mengatasi keadaan, ternyata telah menimbulkan korban dan perpecahan. Kontak kontak bersenjata antar sesama kekuatan Republik terjadi antara pasukan Bejo dan Malau. Pangkal persoalan yang menimbulkan sengketa selama tiga bulan (September s/d Nopember 1948) ini hanya disebabkan kesalah pahaman. Kejadian ini kemudian dikenal dengan Peristiwa 10 September.12)

Di Sumatera Selatan pengembalian anggota TNI ke masyarakat tidak mengalami kesulitan, karena hanya berjumlah 2000 orang. Anggota TNI di Sumatera Selatan dan Jambi yang masuk Divisi VIII ada 12.000 orang. Sesudah reorganisasi untuk Sumatera Selatan dan Jambi dibutuhkan 10.000 orang. Umumnya proses pengembalian ke masyarakat berjalan lancar, sebab sebelumnya mereka telah mempunyai penghidupan tetap di kampungnya.

Kesulitan yang dialami di Divisi IX Sumatera Barat, karena anggota TNI yang akan dialih-tugaskan ke masyarakat berjumlah lebih kurang 17.000 orang. Kepada mereka diberikan tempat-tempat penampungan pada pelbagai lapangan pekerjaan seperti Kilang benang dan kain, kilang rokok, pertukangan besi, penyelenggaraan irigasi sungai Daerah dan lain-lain.13)

Mengenai pelaksanaan rasionalisasi kekuatan bersenjata laskar seberang maka atas perintah dan keputusan P.M. Hatta merangkap Menteri Pertahanan R.I., kesatuan-kesatuan seberang dipersatukan dalam Kesatuan Reserve Umum atau KRU X. Disamping KRU X terdapat kesatuan-kesatuan pelajar seperti :

TRIP, TP, CM (Corps Mahasiswa), TOP dll, serta KRU-N yang mencakup ex. Divisi Siliwangi dan Dewan Perjuangan Jawa Barat. Kesatuan-kesatuan seberang yang dipersatukan dari KRU X terdiri dari : TRI Resimen Hasanuddin, ALRI Expedisi Sulawesi, Laskar

KRIS, ALRI Armada IV, ALRI Divisi VI, ALRI Pasukan Istimewa dan Resimen Tulukbesay (Maluku), Ngurah Rai (Bali), Pradja (Timor Flores), dan lain-lain. Hasil dari reformasi ini menghasilkan susunan Komando X yang susunan pimpinannya terdiri dari :

Komandan : Letkol. G. Lembong
Kepala Staf : Letkol. F. Warouw

Kesatuan ini berkekuatan dua Brigade yaitu : Brigade I KRU X dengan komandannya Letkol. Rappar dan Brigade II KRU X, dengan komandannya Letkol. Kahar Muzakar.

Wakil Kepala Staf : Mayor Saleh Lahade.

Para Komandan Batalionnya terdiri dari :

Komandan Batalion A : Mayor Andi Matallata
Komandan Batalion B : Mayor H.V. Worang
Komandan Batalion C : Mayor Pudu Mas'ud
Komandan Batalion D : Mayor Pellupesey
Komandan Batalion E : Mayor Palar
Komandan Depot Batalion: Mayor H.N. Sumual.14)

Di Kalimantan, pada tanggal 16 Desember 1949 seluruh anggota gerilya diresmikan menjadi APRIS, sedangkan ex. KNIL diresmikan menjadi TNI pada tanggal 1 Januari 1950. Selanjutnya di Kalimantan Timur dibentuk Sub Territorium IV (STM IV) dipimpin oleh Mayor Wiluyo Puspoyudo yang kemudian membentuk rayon-rayon, serta kesatuan-kesatuan. Bekas anggota pejuang dari badan kelasykaran ini dimasukkan dalam kompi B.S.15)

B A B III

TINDAKAN EXTRIM BEBERAPA BADAN PERJUANGAN

1. Pengaruh-pengaruh luar dan dalam negeri

Setelah Amir Sjarifuddin menyerahkan mandatnya kepada Presiden Sukarno pada tanggal 20 Januari 1948 sebagai akibat adanya protes dari TNI dan Masyumi yang menarik diri dari Kabinet Amir Sjarifuddin karena Amir telah menerima persetujuan Renville, kemudian dibentuk kabinet baru di bawah Hatta. Kabinet Hatta adalah kabinet Presidensiil dengan baik tidak mengikutsertakan PKI. Semula PKI telah menuntut posisi jabatan empat Menteri bagi golongannya, salah satu posisi yang dituntutnya adalah Menteri Pertahanan.

Masyumi dan PNI menolak permintaan PKI ini, sehingga akibatnya kabinet dibentuk tanpa mengikutsertakan unsur PKI, kecuali Supeno diangkat sebagai Menteri Pemuda secara perseorangan.16) Pe-

ngaruh luar negeri dalam hal ini pengaruh Gerakan Komunis Internasional (GKI) makin terasa dalam dunia politik Indonesia lewat kelompok Amir Sjarifuddin. Akibatnya terjadi perpecahan antara pengikut Amir yang beraliran Sosialis. Kelompok Sjahrir kemudian membentuk Partai Sosialis Indonesia (PSI) pada tanggal 26 Februari 1948.17) Kelompok Amir membentuk organisasi Federasi dengan nama Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada tanggal 26 Februari 1948 di Surakarta. Inti kekuatan FDR terdiri dari laskar pemuda, Partai Buruh, PKI dan SOBSI. Kepada Kabinet Hatta diajukan tuntutan agar kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen. Mereka kemudian juga menuntut Pemerintah membatalkan persetujuan Linggarjati dan Renville serta berunding atas dasar hak yang sama.18) Dituntutnya pula agar dilaksanakan nasionalisasi perusahaan asing.19) Ketentuan GKI ini dibawa oleh Wakil Indonesia yang menghadiri konferensi Pemuda di Cakarta yang berlangsung pada tanggal 19 - 26 Februari 1948. Dalam petunjuknya untuk menyelesaikan revolusi di Indonesia, GKI menyatakan agar pemuda Indonesia meneruskan perjuangannya, meskipun telah tercapai persetujuan antara pemerintah Belanda dan Indonesia.

Menurut mereka persetujuan-persetujuan yang telah dicapai antara pemerintah Indonesia dan Belanda merupakan hasil tekanan Komisi Tiga Negara yang didominasi oleh Imperialis Amerika. Sebagai akibat bangsa adanya doktrin dari GKI di Indonesia maka perpecahan antara bangsa Indonesia makin menajam. Kekuatan politik terpecah menjadi tiga kelompok yaitu :

1. Kelompok pengikut Tan Malaka serta bekas Persatuan Perjuangan yang mempunyai sikap anti Linggarjati serta menuntut kemerdekaan 100 persen di bawah Tan Malaka.
2. Kelompok FDR selain anti Linggarjati dan Renville juga menuntut nasionalisasi di mana mereka mengikuti doktrin GKI yang berpusat di Moskow.
3. Kelompok Pemerintah di bawah Hatta yang menerima Linggarjati dan Renville serta melangsungkan perjuangannya melalui politik berunding.

Keadaan menjadi bertambah buruk lagi setelah kembalinya Muso ke Tanah Air. Dengan rumusnya : **Jalan baru untuk Indonesia**, dimana ditegaskan bahwa dunia terpecah menjadi dua blok yaitu blok kapitalis - Imperialis dan blok Komunis, dan yang menurut rumusnya sesuai dengan sifat perjuangan bangsa Indonesia yang menentang Imperialisme, maka Indonesia berada di pihak Rusia. Selain menempuh jalan perjuangan dengan agitasi. Setelah perjuangan melalui cara parlementer yang mereka tempuh mengalami kegagalan, sejak bulan Juli 1948 mereka menyusun perebutan kekuasaan yang mereka sebut dengan : **Menginjak tingkat perjuangan militer baru**. Mereka merencanakan akan melakukan perebutan

kekuasaan di Madiun yang akan membentuk pemerintahan Soviet Indonesia.

2. Pemberontakan PKI/Madiun

Untuk mencapai tujuan akhirnya, yaitu merebut kekuasaan maka oleh PKI direncanakan pula adanya sasaran utama, yaitu daerah Surakarta. Divisi IV Panembahan Senopati di Surakarta praktis telah dipengaruhi oleh FDR, demikian pula satuan angkatan laut di bawah pimpinan Letnan Kolonel Yadauw. Satuan lainnya yang berada di kota itu ialah pasukan Siliwangi yang telah melakukan hijrah dari Jawa Barat, Barisan Banteng di bawah pimpinan dr. Mawardi. Oleh FDR kemudian sengaja ditimbulkan iklim permusuhan, sehingga pada bulan Agustus di Surakarta situasi menjadi panas, karena makin seringnya terjadi bentrokan bersenjata antara satuan-satuan yang telah dipengaruhi oleh FDR dengan pasukan Siliwangi. Fihak FDR sesuai dengan rencananya telah melaksanakan perampokan, pembunuhan, penculikan yang dilakukan hampir di setiap desa.

Sementara kerusuhan-kerusuhan dikobarkan di Surakarta, PKI tidak melupakan sasaran utamanya yaitu Madiun. Setelah masa prolog dianggap selesai, maka jpada tanggal 18 September 1948 PKI melakukan perebutan kekuasaan di Madiun. Mereka berhasil menguasai Markas Staf Pertahanan Jawa Timur, Markas CPM dan Tangsi Polisi serta melucuti Tentara Pelajar, Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) dan Tentara Genie Pelajar (TGP). Kekuatan yang mereka gunakan terdiri dari kesatuan Pesindo di bawah pimpinan Sumarsono, sebagian terdiri dari kesatuan pasukan slagorde Divisi IV Jawa Timur, sebagian dari pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Sumantri dan Letnan Kolonel Dahlan.

Sehari kemudian FDR di Madiun membentuk pemerintahan baru atas dasar ide Muso. Dibentuklah Front Nasional yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur SOBSI, PKI, Partai Buruh dan Pesindo. Sebagai wakil komandan teritorial diangkat Letnan Kolonel Sumantri, Purba sebagai Walikota dan Indarto sebagai wakil Residen.

Peranan anggota Pesindo dalam pemerintahan dan pers sangat menonjol. Hal ini terbukti kemudian dengan diangkatnya Sumarjono sebagai Gubernur Militer dan Soepardi selaku pembantunya. Keduanya berasal dari **Pesindo**, sedang Soepardi sebelumnya Wakil Walikota Madiun. Sebagai alat komunikasi maka surat kabar **Api Rakyat** yang telah mereka kuasai, kemudianditerbitkan di bawah nama **Front Nasional**. Pimpinan umumnya ditunjuk **Basoeki**, anggota Pesindo, bekas redaktur surat kabar **Penghela Rakyat** di Magelang. Pembantu pimpinan redaksinya Sofyan Hadi, bekas pimpinan surat kabar **Api Rakyat**. 20)

Meskipun PKI telah berusaha menyebarkan cita-cita komunis

di kalangan pelajar. tetapi ternyata tidak mendapat sambutan yang luas. Situasinya berubah menjadi antipati setelah Markas TRIP pada tanggal 22 September diserbu. Seorang pelajar TRIP bernama Muljadi telah ditembak mati. Juga sembilan orang ditangkap dan dua orang ditahan, yang ternyata telah dibunuh di Dungus. Akibat kematian Muljadi serta hilangnya beberapa pelajar itu telah menimbulkan amarah di kalangan pelajar. Mereka kemudian mengajukan protes. Lebih kurang 5780 pelajar dikumpulkan pada tanggal 27 September di mana Residen Mutalib menyatakan memberi janji akan menghapuskan uang sekolah serta akan memberikan bantuan pada mereka yang terputus hubungan dengan orang tuanya, telah ditolak oleh para pelajar secara spontan. Demikian pula ketika dijanjikan akan didirikan Universitas dengan menggunakan aula bekas Gedung CPM dengan serentak ditolak oleh para pelajar. Para pelajar tetap meminta pertanggungjawaban atas kematian Muljadi.

Dalam usaha untuk melangsungkan pemerintahannya maka oleh Residen diberikan janji kepada penduduk bahwa pajak akan dihapuskan. Usahanya ini ternyata tidak dapat menolong pemerintahannya yang berhaluan komunis, karena rupanya faham komunis tidak mendapat tempat di hati rakyat.

Para pemuda yang mempunyai semangat patriotik dalam usahanya membantu pemerintah R.I. telah mengadakan kegaduhan dan kekacauan di dalam kota dengan cara menyamar menjadi tentara merah. Mereka melemparkan granat serta menempelkan siaran-siaran pemerintah R.I. Dalam usaha menguasai massa, maka PKI juga membentuk Front Nasional di daerah Pati. Sebagai masanya adalah buruh minyak yang tergabung dalam **Laskar Minyak Cepu**. Selain itu terdapat pula **Laskar Boeroeh** dengan **Laskar Merah** yang segera mengambil tindakan dengan mengirimkan satuan-satuan TNI dari berbagai jurusan, akhirnya Madiun dapat dikuasai kembali sejak tanggal 30 september 1948.22)

3. Gerakan "DI/TII"

Di Jawa Barat pemimpin gerakan pembentuk Negara Islam ialah Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo atau S.M. Kartosuwirjo. Pada perkembangan selanjutnya ia diakui sebagai pimpinan tertinggi (IMAM) dari gerakan Islam di Jawa, Sumatra dan Sulawesi. Gagasannya mendirikan Negara Islam Indonesia telah dimulai tahun 1942. Di Malangbong oleh Kartosuwirjo didirikan pesantren sufah. Selain berfungsi sebagai pesantren digunakan pula sebagai tempat latihan kemiliteran bagi pemuda Islam, khususnya Hisbullah dan Sabilillah. Selain sebagai tempat latihan militer dari pesantren tersebut disebar luaskan ajaran pembentukan negara berdasarkan Islam.

Selama pendudukan Jepang dan setelah Proklamasi Kemerdekaan dengan terbentuknya Masyumi, s.M. Kartosuwirjo menjadi anggota partai Masyumi. Bahkan ia kemudian terpilih sebagai

komisaris Jawa Barat merangkap Sekretaris I partai Masyumi. Sebelumnya ia pernah dicalonkan sebagai Menteri Muda Pertahanan. akan tetapi karena ia sudah mempunyai tujuan sendiri, maka jabatan itu tidak pernah dipangkunya. 23)

Pada tanggal 14 Agustus 1947, sesuai dengan agresi militer Belanda pertama, S.M. Kartosuwirjo menyatakan perang suci melawan Belanda. Mengenai konsep Negara D.I., ia membagi wilayahnya dalam beberapa daerah yang terdiri dari Daerah I (Daerah ibukota negara) yang dilengkapi dengan aparat pemerintahan yang berdasarkan hukum-hukum Islam. Daerah II merupakan wilayah negara meliputi Jawa Barat. Daerah III ialah wilayah di mana penduduknya menjadi pengikutnya. Penolakannya terhadap persetujuan Renville diwujudkan dalam sikapnya menolak melaksanakan Hijrah. Bersama dengan pasukannya yang terdiri dari Hisbullah dan Sabilillah sebanyak 4.000 orang tetap tinggal di Jawa Barat. dalam konferensi Cisayong yang diselenggarakan pada bulan Februari 1948 diputuskan untuk merubah ideologi Islam dari bentuk kepartaian ke bentuk kenegaraan serta membekukan Masyumi Jawa Barat.

Melalui Majelis Umat Islam yang kemudian dibentuk, S.M. Kartosuwirjo diangkat sebagai Imam dari Negara Islam Indonesia (NII). Selanjutnya dibentuk Angkatan Perang yang diberi nama Tentara Islam Indonesia (TII), ditempatkan di daerah pegunungan di sekitar Jawa Barat. Dengan dalih berjuang untuk kemerdekaan, Kartosuwirjo berusaha mempengaruhi rakyat melalui konsep Darul Islam yang dianggap sebagai ideologi serta ditimbulkan kesan bahwa Indonesia merupakan bagian dari wilayah Islam.

Kontak senjata pertama dengan TNI terjadi pada tanggal 23 Januari 1949 ketika pasukan Divisi Siliwangi melakukan Long March dari Jawa Tengah ke Jawa Barat. Mereka dianggap melanggar wilayah D.I., sehingga terjadi kontak senjata. meskipun dilancarkan usaha pendekatan melalui Ketua Masyumi Mohamad Natsir lewat surat, tetapi ternyata tidak berhasil. Pada tanggal 7 Agustus 1949 Kartosuwirjo secara resmi menyatakan berdirinya "Negara Islam Indonesia" (NII). Sedang konstitusinya disebut **Kanun Azasy**. Lembaga tertinggi semacam parlemen ialah **Majelis Syuro**. Selain itu terdapat pula **Dewan Fatwa** yang bertugas menghadapi masalah-masalah yang timbul di lingkungannya. Dewan ini beranggota tujuh orang **Mufti** dan dipimpin oleh seorang Mufti Agung. dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Kartosuwirjo dibantu oleh Dewan **Immamah** semacam Dewan Penasehat. Sebelum adanya Majelis Syuro yang terpilih, semua kekuasaan di bawah Kartosuwirjo termasuk jabatannya selaku Panglima TII. Meskipun Pemerintah untuk kedua kalinya berusaha menyelesaikan persoalan ini secara damai, yaitu dengan membentuk suatu komite di bawah Natsir pada bulan September 1949, ternyata tidak berhasil mengajak Kartosuwirjo kembali kepangkuan R.I. 24)

Gerombolan DI melancarkan terornya terhadap rakyat Jawa Barat, sehingga rakyat menanggung penderitaan karenanya. Untuk memenuhi kebutuhan gerombolan merampok harta milik rakyat yang tinggal di pedalaman.

Di Jawa Tengah sebagai pemimpin gerakan DI adalah Amir Fatah bekas komandan laskar Hisbullah di front Tulungan, selama agresi Militer Belanda pertama ia aktif berjuang di fron Brebes - Tegal demikian pula selama Agresi Militer Belanda kedua ia berjuang bersama satuan-satuan TNI setempat. Tugas utamanya mengurus penggabungan laskar-laskar kedalam TNI, setelah ada perintah rasionalisasi. Setelah mendapat pengikut cukup banyak, maka pada tanggal 23 Agustus 1949 di desa Pengarasan Tegal, ia memproklamasikan berdirinya "D.I.". Gerakan ini bermaksud mendirikan "Negara Islam Indonesia" (NII) dan bergabung dengan Kartosuwirjo di Jawa Barat. Selain mewakili kekuatan bersenjata, Amir Fatah yang menjadi Panglima Perang merangkap sebagai Batalion Syarif Hidayat Amir Fatah Wijaya Kusuma telah mendapat seorang penasihat yaitu Syarif Hidayat yang diangkat sebagai Kolonel. Sebagai Bupati Tegal diangkat Kosim Nachrowi, bekas komandannya di Kalisasak - Margasari di dekat Prupuk.

Untuk melancarkan jalannya "pemerintahan" kemudian di bentuk "pamongpraja DI". Hal ini tentu saja telah menimbulkan dualisme dalam pemerintahan yang berakibat membingungkan rakyat, karena disamping aparat pemerintah RI terdapat pula aparat "D.I.". 25) Selain di Brebes - Tegal maka di daerah Kebumen juga timbul gerombolan "D.I." pimpinan Mohamad Mahfu'dh Abdulrachman (Kyai Somolangu). Sebagaimana dengan gerakan Amir Fatah, maka gerakan ini juga bermaksud membentuk "Negara Islam Indonesia" dan bergabung dengan Kartosuwirjo. 26) Gerakan ini yang sudah mulai terdesak oleh TNI pada tahun 1952 mulai kuat kembali karena pemberontakan Batalion 420 dan 426.

Di Aceh setelah proklamasi kemerdekaan terjadi pertentangan antara ulama yang tergabung dalam organisasi PUSA (Peraturan Ulama Seluruh Aceh) dibawah pimpinan Daut Beureueh dengan para Oeloe balang (Kepala-kepala Adat), sehingga dari bulan Desember 1945 sampai bulan Februari 1946 berkobar perang saudara antara kedua golongan tersebut.

Untuk mengatasi perang saudara tersebut Pemerintah memberikan status Daerah Istimewa setingkat dengan provinsi, serta mengangkat pimpinan PUSA Daud Beureueh sebagai Gubernur. Selaku seorang Gubernur ternyata ia tidak melaksanakan tugasnya tetapi malahan menyebar luaskan-gagasan membentuk negara. 27)

Setelah Negara Kesatuan dibentuk dan pemerintah mengadakan penyederhanaan administrasi pemerintahan, maka beberapa daerah telah mengalami penurunan status. Salah satu di antaranya ialah Aceh yang diturunkan kedudukannya dari daerah Istimewa menjadi

karesidenan di bawah propinsi Sumatera Utara. Daud Beureueh yang semula menjabat sebagai Gubernur Militer Daerah Istimewa Aceh merasa kurang puas dan menganggap kekuasaannya turun ketika pada tahun 1950 Pemerintah menetapkan Status aceh sebagai karesidenan.

Pada tanggal 21 September 1953 Daud Beureueh menyatakan bahwa Aceh merupakan negara Islam bagian dari "NII" di bawah Imam Kartosuwirjo. Segera ia melakukan tindakan menguasai kota-kota di Aceh 28)

Di Sulawesi selatan setelah pengakuan kedaulatan bekas pemimpin Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) Kahar Muzakar menuntut agar semua anggota KGSS dimasukkan ke dalam APRIS dengan nama Brigade Hasannuddin. Tuntutan ini tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah. Pemerintah hanya akan menerima anggota KGSS yang lulus penyaringan, sedangkan Kahar Muzakar sendiri sudah diberi pangkat akting Letnan Kolonel serta menerima perlengkapan bagi anggota KGSS yang dianggap memenuhi syarat untuk masuk tentara. Tetapi uluran tangan Pemerintah itu tidak diterima; pada bulan Agustus 1951 ia melarikan diri ke hutan dengan membawa perlengkapan dan senjata yang baru diperolehnya. Pada tahun 1952 ia menyatakan bahwa daerah Sulawesi Selatan adalah bagian dari NII di bawah Kartosuwirjo. Sejak itu ia melancarkan kegiatannya dengan menteror rakyat. 29)

CATATAN

- 1) Ceramah Dr. Hatta di Fakultas sastra U.I., Jakarta, tanggal 23-2-72 dengan judul : rasionalisasi TNI dalam tahun 1948.
- 2) *Ibid.*
- 30 Dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1949 dengan Imam (Kepala negara) S.M. Kartosuwiryo; termasuk kekuatan ekstrim yang menentang r.I. Lihat lebih lanjut : Kementerian Penerangan R.I., *Propinsi Djawa Barat. Bandung*, 1952, hal. 242.
- 4) Laskar ini pada waktu agresi Belanda kedua melakukan perlawanan terhadap Belanda dan bergerak di daerah Bogor, Sukabumi, Cianjur dibawah pimpinan Wahidin Nasution. Sebagai pucuk pimpinannya adalah Hadji Akbar : Wawancara dengan Wahidin Nasution, September-Oktober 1968: Lihat juga : Kementerian Penerangan R.I., *Propinsi Djawa Barat*, hal 243.
- 5) Laskar ini bergerak di bogor, kemudian di Banten Selatan dipimpin oleh Tjejtje Subrata ; Lihat ; *Propinsi Djawa Barat*, hal 247. Termasuk laskar yang menentang kembalinya TNI ke Jawa Barat.
- 6) A.H. Nasution, *Tentara Nasional Indonesia, Jilid II*, hal 135.
- 70 Kementerian Penerangan, *Propinsi Djawa Tengah*, hal 213.
- 8) Wawancara dengan K.H. Wahid Wahab; Drs. H. Djawahir (bekas anggota Hisbullah Jawa Timur), Jakarta tanggal 19 Oktober 1976.
- 9) Semdam VIII/Brawijaya : Sam Karya Bhirawa Anoraga Sejarah Militer Kodam VIII/Brawijaya, hal 167.
- 12) Forum Komunikasi Ex. Sub Teritorium VII, *op.cit.*, hal 2343 - 238.
- 13) Naskah Markas Besar Komando Sumatera (M B K S)
- 14) Radik Djarwadi c.s., Naskah Sejarah Corps Hasannudin, Sekretaris Djen-dral CORHAS, MOMLXXII, Ujung Pandang, 1972, hal. 39. Lihat juga : *Upulem, Memoor Dr. G.A. Siwabesay*, hal 48.
- 15) Semdam IX/ Mulawarman, *Satwita Ganta*, Sejarah Kodam IX Mulawarman, Balikpapan, 1973, hal 12.
- 16) Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, hal. 232.
- 17) Subadio Sastrosatomo, Gerakan Sosialis di Indonesia, Ceramah dalam rangka Peringatan 17 Agustus '73.
- 18) Ruth TMC, Way. *The Development of the Indonesia Communist party*, hal. 51.
- 19) *I b i d.* hal 52
- 20) *Sin Po*, September 1948, hal 1.
- 21) *Sinpo*, 24 September 1948, hal 1.
- 22) Kahin, *op.cit.* hal 270-276 ; Soe Hok Gie, "Simpang Kiri dari Sebuah Jalan" (Kisah Pemberontakan Madiun September 1948). (Skripsi, Fakultas Sastra UI, Jurusan Sejarah tahun 1969), hal 157 dst.
- 23) J. Bolani, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, The Hagul, Martinus Nighoft, 1975, hal. 1 - 87.
- 24) Anne Marie The, *Darah tersimpah di Jawa Barat*, Kahin, *op.cit.*, hal 329.
- 25) Pranata SPP., "Perang Kemerdekaan di Tegal", *Berita Buana*, (dimuat secara bersambung) dari tanggal 29 Desember 1976 sampai dengan 21 Januari 1977.
- 26) *I b i d.*
- 27) A. Pieker, Aceh en de oorlog met Japan, Den Haag-Bandung London-New York, 1962, hal 92
28. Ariwiadi, *Gerakan Operasi Militer VII*, Djakarta, 1965, hal 3.
29. Naskah Perjuangan Rakyat Sulawesi Selatan, (Manuskrip), hal 81 - 83.

CINA ISLAM DI INDONESIA **(PENGENALAN AWAL TERHADAP PITI)**

Oleh : Tri Wahyuning M. Mahrus Irsam

Pendahuluan

Perkembangan studi sejarah modern tentang Indonesia telah berkembang sedemikian pesatnya memasuki hampir semua aspek kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu aspek yang menjadi garapan dari studi sejarah Indonesia Modern ialah masyarakat Islam di Indonesia dalam pelbagai bentuk ragamnya. Sejak Harry J. Benda menulis tentang Islam pada jaman Jepang, yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku yang berjudul *The Crescent and the Rising Sun*,¹⁾ ternyata studi tentang masyarakat Islam di Indonesia telah menghasilkan sejumlah ilmiawan seperti Deliar Noer, alfian, Allan Samson dan lain-lain.

Agama Islam di Indonesia seperti halnya masyarakat Indonesia itu sendiri yang sifatnya majemuk, agama ini pun mempunyai penganut dari pelbagai ras dan suku bangsa. Stereotype Islam dalam hubungannya dengan ras, biasanya hanya mempunyai konotasi yang terbatas pada ras Semit, yaitu bangsa Arab. Stereotype ini mulai pudar dengan berkembangnya kemajuan pendidikan dan komunikasi di mana masyarakat Indonesia memperoleh informasi bahwa agama Islam pun dipeluk pula oleh orang-orang dari kelima benua di dunia ini.

Kapan terbentuknya masyarakat Cina pemeluk Islam di Indonesia belum diketahui secara pasti, namun adanya kelompok Cina yang beragama Islam telah disebut-sebut dalam laporan tertulis dari masa VOC, seperti yang dituturkan oleh Lodewyck, yang mengadakan kunjungan ke Banten pada tahun 1596. Di dalam penuturannya tersebut dinyatakan adanya sekelompok orang-orang Cina pemeluk agama Islam yang telah lama bertempat tinggal di daerah Banten tersebut. Bukti kebenaran dari penuturan Lodewyck masih nampak dari reruntuhan mesjid Pacinan yang terdapat di Banten dan terletak di dekat makam-makam Cina yang ada di kota itu. Pada tahun 1902, di mesjid Pacinan masih terdapat sebuah menara yang bercorak Eropa, sedangkan hiasan keseluruhannya bercorak Cina.²⁾

Dari laporan tersebut jelas nampak bahwa masyarakat Cina Islam telah ada sebelum tahun 1596. Dan ternyata orang-orang Cina Islam tidak hanya terdapat di daerah Banten saja, melainkan

terdapat juga di daerah lain seperti Jakarta, Semarang, Madura, Makasar dan Ambon.

Bahkan folklore yang sampai saat ini hidup di kalangan masyarakat Cina Islam menunjuk pada adanya raja-raja dan tokoh-tokoh dimasa pemerintahan tradisional yang memiliki darah keturunan Cina dan sekaligus muslim. Seperti misalnya Raden Patah yang dikenal sebagai pendiri Demak, adalah seorang peranakan Cina yang lahir dari perkawinan raja Majapahit Kertabhumi dengan seorang puteri Cina, dengan nama asli Jin Bun. Demikian pula Pangeran Sabrang Lor dan Raden Trenggana yang kita kenal sebagai Sultan Demak II dan III ternyata juga seorang peranakan Cina dengan nama Yat Sun dan Tung Ka Lo.

Memang agak janggal kedengarannya, dan perlu penelitian yang mendalam untuk memecahkan "misteri" tersebut. Interpretasi sementara yang dapat penulis kemukakan adalah menempatkan berita tersebut sebagai hikayat atau folklore yang hidup dikalangan masyarakat Cina Islam hingga saat ini.

Makalah ini akan membahas proses integrasi masyarakat Cina Islam ke dalam masyarakat Indonesia dengan tidak mengabaikan peranan yang telah dan akan dilakukan oleh organisasi PITI.

Dengan mengadakan studi atas PITI ini diharapkan dapat dikembangkan suatu studi mikro untuk melengkapi studi-studi masyarakat Cina di Indonesia yang selama ini dikembangkan dari segi makro yang sifatnya general.

Metode Penelitian

Penulisan dilakukan dengan mendasarkan diri pada bahan-bahan dan data-data yang memenuhi kriteria metode sejarah yaitu sumber-sumber primer dan sekunder yang sejaman dengan masalah yang dibahas. Untuk mencapai maksud tersebut maka digunakan dua metode pengumpulan data, yaitu :

1. **Kepustakaan** : di pakai untuk mengumpulkan data tertulis baik penerbitan maupun tercetak, seperti buku-buku, artikel, brosur dan berita-berita di surat kabar atau majalah
2. **Wawancara** : dipakai untuk melacak dan mengumpulkan data-data melalui wawancara dengan tokoh-tokoh sejaman atau mengetahui masalah yang dibahas dalam makalah ini.

Metode Analisa

Penulisan dilakukan secara deskriptip-analitis. Setelah data terkumpul, dimulailah serangkaian proses untuk sampai pada penulisan sebuah makalah Rangkaian proses itu meliputi kegiatan-kegiatan menguji sumber, merekonstruksi peristiwa secara kronologis, memberikan interpretasi dan analisa. Hasilnya kemudian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut, khususnya sejarah mengenai masyarakat Cina Islam di Indonesia.

PITI dan Perkembangannya

PITI yang di dirikan pada tanggal 6 Juli 1963, sebenarnya adalah hasil gabungan dari dua organisasi Cina Islam yang terbentuk sejak jaman kolonial Belanda. Kedua organisasi tersebut adalah Persatuan Islam Tionghoa (PIT) yang berkedudukan di Sumatera dan Persatuan Tionghoa Islam (PTI) yang berkedudukan di Jawa. Tokoh-tokoh PIT antara lain adalah Haji Abdul Somad (Yap A Siong), Ibrahim dan Haji Abdul Hamid. Sedangkan tokoh-tokoh PTI antara lain Haji Abdul Karim (Oey Tjeng Hien), dr. Moh. Ali (Lie Kiat Teng) dan Burhan.³⁾

Walaupun telah terbentuk organisasi-organisasi Cina Islam namun golongan mayoritas Cina mempunyai pandangan bahwa orang-orang Cina yang masuk Islam berarti telah turun martabat dan status sosialnya. Pandangan tersebut merupakan hal yang wajar bila dihubungkan dengan struktur sosial yang hidup di jaman kolonial Belanda. Struktur sosial itu terdiri atas tiga golongan yaitu : Golongan Eropa, golongan Timur Asing dan golongan pribumi (inlander).

Bila hal ini dikaitkan dengan masalah agama maka akan terlihat bahwa agama Islam adalah merupakan agama pribumi karena pada masa peralihan abad ke-19 ke abad ke-20, Islam adalah identik dengan kebangsaan.⁴⁾ Pada waktu itu orang yang beragama Islam selalu digolongkan kepada penduduk pribumi. Dengan demikian agama Islam digolongkan dalam kelas tiga. Sejalan dengan pandangan tersebut berarti orang-orang Cina yang masuk Islam dipandang sama dengan orang-orang pribumi, yang mayoritas memeluk agama Islam. Bahkan orang-orang Cina sendiri mengatakan bahwa agama Islam itu adalah agama orang Melayu.⁵⁾

Dari segi status sosial, martabat dan hak-hak istimewa (privileges) orang-orang Cina yang masuk Islam makin menjadi rendah derajatnya di mata kalangan bangsanya dan pemerintah Hindia Belanda. Namun bila dikaji lebih mendalam lagi, dengan memeluk agama Islam yang statusnya sama dengan pribumi, orang-orang Cina ini telah mengalami mobilitas idial yang cukup drastis, sebab mereka dengan secara sadar harus mengidentikan dirinya dengan lingkungan barunya yaitu masyarakat pribumi, baik dalam hal nilai, tingkah laku dan sikapnya sehari-hari. Dengan demikian orang-orang Cina yang masuk Islam telah mengalami suatu "revolusi mental". Secara rasional tentu lebih enak mempertahankan statusnya sebagai orang Timur Asing dari pada menjadi sederajat dengan pribumi.

Apalagi di kalangan orang-orang pribumi yang berpendidikan memiliki kecenderungan untuk meninggalkan status pribuminya dan meminta pengakuan disamakan dengan orang Eropa.

Sekitar tahun 1962 - 1963 tokoh-tokoh PIT dan PTI bersepakat untuk menggabungkan kedua organisasi tersebut menjadi satu

wadah bagi orang-orang Cina yang beragama Islam. Dengan bimbingan H. Moh. Isa Edris, selaku Ketua Badan Kerjasama Ulama Militer, maka pada tahun 1963 terbentuklah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI). Masuknya peranan dan orang-orang militer dalam usaha penggabungan tersebut berlatar belakang pada usaha-usaha militer terutama pihak angkatan Darat dalam rangka menahan offensif PKI yang memasuki segala sektor kehidupan. Tujuan penggabungan tersebut sebenarnya untuk mengkoordinasikan orang-orang Cina yang memeluk agama Islam kedalam PITI agar mereka tidak masuk dalam Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki), yaitu organisasi Cina yang dibina oleh PKI. 6)

Offensif PKI ke kalangan masyarakat Cina menggunakan sebuah organisasi yang dinamakan Baperki. Kekhawatiran pihak Angkatan Darat terhadap offensif Baperki ke lingkungan masyarakat Cina Islam itu cukup beralasan, karena kondisi ekonomi orang-orang Cina yang masuk Islam kebanyakan berasal dari kalangan ekonomi lemah. Padahal strategi PKI mengutamakan dukungan yang diperolehnya dari kelas ekonomi lemah seperti petani, buruh, pedagang kecil, yang dalam kamus Komunis disebut '**kau proletar**'.

Dalam perkembangan selanjutnya PITI mengalami perubahan status kepengurusan dan keanggotaan. Pada mulanya kepengurusan dan keanggotaan PITI hanyalah terdiri dari orang-orang Cina Islam saja, tetapi sejak tahun 1973 susunan kepengurusan dan keanggotaannya terdiri dari orang-orang Cina dan orang-orang Indonesia yang memeluk agama Islam. Di dalam musyawarahnya yang diadakan di Mesjid ISTIQAL pada tanggal 14 Desember 1972, yang antara lain dihadiri oleh H. Soedirman, H. Mochlas Rowi, Padi Wijaya, Nurleila Pandi Wijaya, H. Abdul Karim Oey, nama Persatuan Islam Tionghoa Indonesia diubah menjadi Pembina Iman Tauchid Islam dengan singkatan tetap sama yaitu PITI. 7)

Salah satu alasan perubahan nama tersebut didasarkan pada salah satu essensi dari ajaran Islam yang tidak mengenal adanya perbedaan ras. Ajaran tersebut membawa konsekuensi ditolaknya pengelompokan-pengelompokan ras seperti Islam Cina, Islam Arab, Islam Indonesia dan lain-lain, karena semua muslim adalah ummat Muhammad yang satu.

Dalam usaha perubahan nama tersebut nampak peranan penting Buya Hamka. Beliau adalah yang memberikan fatwa akan ajaran Islam tersebut dan kemudian menyimpulkan bahwa dengan nama PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) akan timbul kesan bahwa Islam di Indonesia tidak bersatu. Atau lebih tepat dikatakan bahwa dengan nama itu terkesan bahwa muslim Cina terpisah dari wadah ummat Islam Indonesia. Kehadiran ulama besar seperti Buya Hamka ini mengidentifikasikan adanya jalinan hubungan dan interaksi yang baik antara masyarakat Cina Islam dengan **informal**

leader yang besar perannya dalam kalangan masyarakat Indonesia.

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya perubahan nama tersebut bisa dilacak dari pernyataan pihak Kejaksaan Agung yaitu "hendaknya golongan Cina tidak mengadakan pemencilan diri dalam suatu wadah",⁸⁾ sehingga merupakan kelompok terasing dari masyarakat sekitarnya.

Dari kedua alasan tersebut nampak bahwa adanya kesamaan pandangan antara ajaran Islam dengan kebijaksanaan pemerintah.

Pembina Iman Tauchid Islam berazaskan Islam dengan landasan Al-Quran, Sunnah Rasul, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya adalah membentuk masyarakat Islam dalam arti yang seluas-luasnya dalam rangka pembangunan Indonesia, di samping juga mewujudkan terlaksananya asimilasi yang sebenar-benarnya baik secara fisik maupun mental.⁹⁾

Asimilasi

Secara umum asimilasi berarti proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama.¹⁰⁾

Secara khusus, dalam hubungannya dengan keturunan Cina, Asimilasi berarti masuk dan diterimanya seorang yang berasal dari keturunan Cina ke dalam tubuh bangsa Indonesia sedemikian rupa sehingga akhirnya golongannya semula yang khas tidak ada lagi; mereka tidak lagi membedakan dirinya dengan bangsa Indonesia.

Dalam proses asimilasi yang penting adalah adanya pembauran baik secara fisik maupun mental, serta sikap dan tujuan hidup. Asimilasi bukan terjadi karena paksaan, melainkan karena kesadaran, karena cita-cita dan pandangan hidup yang sama dalam satu naungan kaidah-kaidah tertentu dalam rangka menciptakan suatu masyarakat yang harmonis.

Di antara warga-warga negara Indonesia keturunan asing, maka mungkin warga negara Indonesia keturunan Cina lah yang banyak mempunyai problem yang serius, yang bersumber pada masalah-masalah yang timbul di kalangan mereka sendiri. Sejak dulu kala di kalangan orang-orang Cina terdapat dua pengelompokan berdasarkan pola pemikirannya. **Pertama**, adalah kelompok keturunan Cina yang berorientasi pada Indonesia, dan **kedua**, adalah kelompok keturunan Cina yang masih berorientasi pada tanah leluhurnya.¹¹⁾

Dengan adanya dua pengelompokan itu maka bila satu kelompok berusaha melaksanakan proses asimilasi, maka kelompok yang lain bereaksi untuk menghambatnya, karena hal itu dianggap sebagai

menjatuhkan martabat leluhurnya. Seorang pemuda warga negara Indonesia yang disingkirkan oleh keluarganya karena akan menikah dengan gadis Indonesia di Padang, menggambarkan sebagai **orang Indonesia tetapi bangsa Tionghoa**, di tengah-tengah masyarakat Indonesia.12)

Berbeda dengan warga negara keturunan Arab, yang tidak mengalami kesulitan dalam melakukan asimilasi atau pembauran. Hal ini disebabkan karena agama yang dianut oleh bangsa Arab adalah merupakan agama mayoritas yang dipeluk oleh bangsa Indonesia. Di samping itu mereka melakukan pembauran dengan tiga cara. **Pertama**, melakukan pernikahan dengan penduduk pribumi. **Kedua**, menanggalkan jubah, sorban dan fanatisme tanah leluhurnya **Ketiga**, tidak mengangkut kekayaan yang dicari di Indonesia untuk dibawa pulang ke negeri asalnya (Arab). ternyata melalui agama (Islam) mereka dengan cepat membaaur.13)

PITI : Islamisasi = Asimilasi

Salah satu hambatan bagi kelancaran asimilasi tersebut terletak pada bagaimana orang-orang Cina Indonesia memandang dirinya yaitu orang Indonesia tetapi bangsa Cina. Hambatan lain berupa rasa superioritas dari sebagian golongan Cina, misalnya mereka merasa lebih unggul di bidang ekonomi. Di samping itu juga adanya satu corak kultus sistem famili kuno yang mereka junjung tinggi dan dihormati yaitu padangan "religion of seed" atau kebaktian sang benih. Mereka beranggapan bahwa benih Cina yang melalui rahim wanita apapun akan tetap menurunkan orang Cina.14)

Dengan demikian mereka menganggap bahwa asimilasi hanya dapat dilakukan oleh mereka yang karena sesuatu hal tidak lagi mampu mempertahankan tradisi serta kebudayaannya yang kuno itu. Hal ini disebabkan karena kehidupan sebagai Hoakiau tidak lagi dapat memuaskannya.

Para pengurus PITI memiliki pandangan yang unik terhadap organisasi mereka. Pengurus PITI tidak menamakan dirinya sebagai pimpinan atau elite di kalangan Cina muslim, melainkan sebagai "kelompok kerja". Dengan demikian bagi mereka terhampar dua tantangan sekaligus. **Pertama**, usaha islamisasi di kalangan masyarakat Cina, dan **kedua**, usaha asimilasi. Untuk menghadapi kedua tantangan tersebut PITI memiliki resep yang bersifat integral yaitu islamisasi sama dengan asimilasi. Sebab dengan masuk Islam, warga negara Republik Indonesia keturunan Cina langsung dirangkul dan menyatu dengan rakyat. Ia otomatis dianggap "orang kita", jiwa ke Indonesia-annya tidak lagi dipersoalkan dan sisa-sisa keraguran hilang sama sekali. 15) Karena tepat sekali ungkapan isi hati K.H. Imron Rosyadi, SH. yang menyatakan bahwa : PITI adalah merupakan pembauran yang konkrit tanpa banyak gembar-gembor. Orang yang masuk Islam otomatis sudah melakukan pembauran. 16)

Resep itu muncul tidak begitu saja dari perasaan beragama, tetapi lahir dari proses budaya yang telah berlangsung lama. Dengan perkataan lain sebetulnya PITI memiliki faktor-faktor dinamis yang berkembang dari dalam masyarakat Cina Islam sendiri, bukan karena tekanan atau tuntutan dari luar. Faktor-faktor itu antara lain adalah sebagai berikut :

1. Ajaran Islam mempunyai dan menyediakan konsep "ummat" atau sesama muslim adalah bersaudara di mana keunggulan ras ditolak. Bagi orang Cina yang masuk Islam mereka meninggalkan ikatan leluhurnya dan kemudian memasuki suatu sistem masyarakat yang lebih luas tanpa adanya perbedaan atau kecurigaan berdasarkan ras.
2. Memiliki akar dalam sejarah yang mengidentikan dirinya dengan bangsa Indonesia. Meskipun dari segi ilmu sejarah masih perlu pembuktian lebih lanjut, tetapi usaha-usaha menarik tokoh-tokoh Indonesia sebagai keturunan cina mempunyai arti yang dalam. artinya dengan memeluk agama Islam, maka dalam proses merubah diri menjadi orang Indonesia, kelompok ini relatif terhindari kegoncangan krisis identitas karena identifikasi dirinya dengan alur sejarah tersebut.
3. Tersedianya peralatan untuk melakukan identifikasi dengan masyarakat Indonesia yang langsung menyentuh kehidupan bermasyarakat seperti nama, pakaian dan lain sebagainya. Juga terdapatnya lembaga-lembaga sosial, agama, pendidikan yang mempertemukan kedua belah pihak tanpa rintangan garis pisah.

Adanya gerakan-gerakan rasialisme anti Cina seperti yang akhir-akhir ini muncul di Jawa Tengah dan Jawa timur, maka orang-orangpun menilai atau paling tidak mengingatkan kembali arti masyarakat Cina Islam dan PITI dalam rangka kesatuan bangsa. Peristiwa tersebut mengakibatkan Helmi Yunan Nasution, seorang tokoh Islam berseru : "Wahai Bapak Sudomo, resep untuk Solo dan Semarang adalah PITI".¹⁷⁾

Hal tersebut di atas dipertegas pula oleh Presiden SUHARTO, dalam perayaan Maulid Nabi Besar kita pada tanggal 18 Januari 1980 Beliau menegaskan bahwa "Islam dan sikap serta pergaulan Nabi kita bebas dari prasangka keturunan maupun ras, inilah yang patut kita contoh". Dengan menjadi muslim si keturunan Cina dengan sendirinya tidak lagi memiliki keangkuhan ras yang antara lain membuat "asing" di mata umum. 18)

Saluran-saluran sosialisasi

Masyarakat Cina Islam nampaknya lebih memiliki saluran-saluran sosial budaya untuk melakukan sosialisasi ke dalam masyarakat Indonesia. Sosialisasi itu lebih dimungkinkan untuk berjalan

lancar karena mayoritas masyarakat Indonesia sendiri memeluk agama Islam. Saluran tersebut antara lain adalah :

1. Ajaran Islam mempunyai satu konsep yang dikenal sebagai Ukhuwah Islamiyah yang mengajarkan bahwa setiap muslim adalah bersaudara, dengan demikian ajaran Islam tidak mengenal adanya perbedaan ras. Ajaran tersebut membawa konsekuensi ditolaknya pengelompokan-pengelompokan ras seperti Islam Cina, Islam Arab, Islam Indonesia dan lain-lain, karena semua muslim adalah ummat Muhammad yang satu.

2. Kegiatan ibadah dan majelis taklim.

Di dalam melakukan kegiatan ibadah dan pengajian-pengajian mereka berbaur dengan masyarakat setempat di samping itu terdapat juga mubaligh-mubaligh cina yang sering diminta untuk berdakwah, berkhotbah atau pun menjadi imam di mesjid-mesjid pada waktu sholat Jumat atau upacara keagamaan lainnya.

3. Zakat dan Wakaf.

Orang-orang Cina yang memeluk agama Islam kebanyakan berasal dari kalangan ekonomi lemah. Jika ekonominya menjadi lebih baik (naik) maka mereka akan memberikan wakaf yaitu menyumbangkan tanah atau bangunan yang berupa mesjid atau langgar, yang selain berfungsi sebagai tempat ibadah juga merupakan tempat bergaul (silaturahmi) antara orang-orang Islam. Dengan demikian mereka lebih mempribumi. Maka tidaklah aneh bila di beberapa tempat terdapat mesjid-mesjid dengan gaya dan arsitektur Cina, seperti misalnya di Jepara, Banten, Cirebon, Kudus, Jakarta dan lain-lain.¹⁹⁾ Masyarakat Cina yang beragama Islam pun menunaikan kewajiban memberi zakat atau zakat fitrah. Kegiatan berzakat membentuk image bahwa meskipun tingkat ekonominya tidak tinggi mereka mau membagikan keuntungan dan ikut merasakan kemiskinan. Sedangkan wakaf menunjukkan semata-mata tidak mencari keuntungan belaka.

4. Naik haji.

Orang Cina yang mengalami kenaikan ekonomi biasanya telah merasa berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Pengalaman di Tanah Suci memperkuat keyakinan bahwa Islam memang benar-benar tidak mengenal adanya perbedaan ras, golongan maupun kedudukan. Lebih dari itu baik sebelum berangkat maupun setelah mereka tiba kembali dari menjalankan ibadah haji, mereka mengadakan acara-acara yang berlaku di masyarakat Islam di Indonesia seperti selamatan memohon doa restu, syukuran, membawa air zam-zam sebagai bingkisan untuk dibagikan kepada para tetangga dan kenalannya.

Faktor-faktor yang mendorong mereka masuk Islam.

Satu pertanyaan yang menarik bagi kita adalah "mengapa mereka masuk Islam?". Padahal masuk Islam bagi mereka bukanlah satu kehormatan atau sesuatu yang menguntungkan, bahkan sebaliknya, dengan masuk Islam mereka dikucilkan oleh keluarganya dan dimusuhi oleh golongannya yang non Islam.²⁰⁾

Pada hakikatnya banyak sebab yang membawa mereka masuk Islam. Banyak Jalan untuk menjadi Islam, tapi yang penting adalah kesadaran yang terbentuk dari dalam diri sendiri. Kesadaran diri sendiri itu diungkapkan pula oleh Junus Jahja sebagai "Allah tidak membukakan pintu hatinya dan pintu untuk memasuki dunia Islam".²¹⁾ Dan pengalaman beberapa responden menyatakan bahwa "pintu" itu terbuka melalui cara-cara sebagai berikut : mempelajari Quran dan Hadith, mendengar alunan azan subuh, pergaulan, dakwah, perkawinan, melihat bahwa melalui Islam mereka mempunyai kesempatan yang luas untuk melakukan perbuatan sosial dan lain-lain.²²⁾ Semua itu berjalan sesuai dengan ajaran Islam yang meluas bukan karena paksaan dan pikatan yang datang dari luar dirinya melainkan karena kemauan sendiri.

Bagaimana persuasi itu dijalankan atau bagaimana tekanan itu disingkirkan dapat dilihat dari sikap para pengurus, aktivis, ulama PITI dalam menghadapi orang-orang Cina yang tertarik pada Islam namun masih ragu-ragu untuk memeluknya. Di dalam menghadapi keragu-raguan tersebut mereka dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan nasihat dan petunjuk-petunjuk lebih lanjut. Terhadap orang-orang Cina yang sebetulnya tinggal didorong masuk Islam saja akan mengikut, mereka masih memberikan tekanan bahwa Allah Subhanallah Waataallah belum menginginkannya jangan mengharapkan hati seseorang akan dibukanya.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi PITI terdiri dari : Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan wilayah/Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dan Ranting Organisasi. (Mengenai susunan kepengurusannya lihat Lampiran I - V).

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PITI

Dewan Pimpinan Daerah PITI DKI Jaya telah melakukan serangkaian kegiatan antara lain pengajian, khitanan, pengislaman dan pembinaan anggota serta peringatan hari-hari besar Islam. Usaha-usaha lain yang dilakukan oleh PITI adalah memperdalam pengertian tentang agama Islam kepada anggotanya; memberikan didikan, pengajaran tentang agama Islam kepada anggotanya; sesuai dengan urgensinya; membimbing anggota-anggotanya dalam melaksanakan amaliyah islamiyah; menyelenggarakan tabligh-

tabligh, pengajian, pengajian, kursus-kursus, pertemuan-pertemuan dan kunjungan-kunjungan kekeluargaan; mengadakan hubungan dengan organisasi-organisaasi sosial/dakwah dalam rangka kerjasama di bidang dakwah dan pendidikan; serta menyelenggarakan atau membantu usaha-usaha bagi kesejahteraan umum. 23)

Rangkaian kegiatan terakhir yang penulis ikuti sewaktu penulis melakukan penelitian mengenai PITI, berupa peringatan Isra Mikraj yang berlangsung dari tanggal 3 Mei - 6 Juni 1981. Pelaksanaannya dilakukan atas dasar kerjasama antara PITI dan Badan Komunikasi Pemuda Masjid DKI Jaya. Dalam peringatan itu dilaksanakan serangkaian acara antara lain donor darah, ceramah-ceramah dan pertandingan-pertandingan seperti pingpong, catur, puitisasi terjemahan Al-Quran dan lain-lain.24)

PITI ternyata tidak saja terdapat di Jakarta melainkan juga di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia, misalnya antara lain terdapat di Propinsi Nusatenggara Barat, yang diresmikan pada tanggal 10 Mei 1980. Selama tahun 1980 di Propinsi Nusatenggara Barat terdapat kurang lebih 300 orang Cina yang mengikrarkan diri masuk Islam dan ketigarus orang tersebut kini telah terdaftar sebagai anggota PITI tingkat Propinsi Nusatenggara Barat yang tersebar di enam kabupaten yang ada di Nusatenggara Bara.

Seperti halnya di Nusatenggara Barat, PITI juga berkembang di Maluku/Ambon, Kalimantan, Sulawesi, Aceh. di beberapa tempat seperti Tuban, Gresik, Semarang, Salatiga, Padang, Palembang dan Medan terdapat permintaan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota PITI walaupun di tempat tersebut belum terdapat perwakilan organisasi PITI.

Sebagai badan dakwah Islamiyah di kalangan keturunan Cina, PITI diharapkan mampu memberikan penjelasan-penjelasan yang mantap mengenai Islam. Hal ini merupakan satu persoalan teknis yang cukup berat, mengingat tenaga dan dana PITI terbatas sedangkan tugas makin banyak.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas maka Junus Jahja beserta Hambas Tulasaputra dan Sudrajat Brotokuntjoro berinisiatip membentuk Yayasan Muslim Baru yang kemudian lebih dikenal sebagai Kelompok Tujuh. Kelompok ini "menggarap" orang Cina Islam di kalangan kaum Cina intelektual, yang nantinya diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin Islam yang terkemuka.25)

Hingga saat ini Kelompok Tujuh telah berhasil mengislamkan kurang lebih 300 orang Cina dari kalangan cendekiawan dan pedagang besar. Kegiatan lain yang dilakukan oleh Kelompok ini adalah menyelenggarakan Peringatan Maulud Nabi Muhammad Saw Isra Miraj bersama PITI: mengadakan diskusi mengenai strategi dakwah serta mengadakan diskusi panel mengenai "Dakwah Islamiyah" di kalangan keturunan Cina dan mengundang negara sahabat khususnya Asean; bersama PITI membagikan beras zakat fitrah sejumlah 20 ton ke lima wilayah DKI Jaya dan Tangerang;

juga membagikan 17 ekor sapi dan 8 ekor kambing dalam rangka Hari Raya Idul Qurban tahun 1980. 26)

Di bidang penerbitan Kelompok Tujuh telah melakukan beberapa penerbitan yaitu :

- menerbitkan Serial Dakwah Selayang Pandang I, II, III dan IV dengan oplag 2.000 eksemplar.
- menerbitkan cetak ulang majalah Tempo no. 26, Tahun X, 23 Agustus 1980 dengan judul "Orang Islam Keturunan Cina", sebuah laporan, dengan oplag 50.000 eksemplar.
- mempersiapkan penyusunan buku riwayat H. Abdul Somad (Yap A Siong) pendakwah puluhan tahun yang sekarang berusia hampir 100 tahun.
- memikirkan untuk mengirm pemuda-pemudi keturunan Cina ke pesantren-pesantren guna dididik menjadi kader-kader Islam yang qualified. Hingga saat ini telah dikirim 4 (empat) orang keturunan Cina ke pesantren-pesantren di Jakarta dan Jawa Barat dengan biaya setiap bulan rata-rata rp. 25.000,- setiap orang²⁷⁾

Kesimpulan

Adalah suatu kenyataan bahwa di Indonesia terdapat masyarakat Cina pemeluk agama Islam, walaupun belum diketahui sejak kapan timbulnya arus orang-rang Cina yang memasuki agama Islam. dalam melakukan sosialisasi dengan masyarakat Indonesia mereka relatif tidak mengalami kegoncangan-kegoncangan sosial sebab mereka mempunyai folklore yang berakar pada sejarah bangsa Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa folklore/hikayat dipandang sekelompok masyarakat sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, segala nilai yang didukung oleh folklore/hikayat bukan dianggap sebagai hasil imajinasi dan buah pikiran pengarang (hikayat) tetapi sebagai suatu hal yang sungguh-sungguh dalam dunia kehidupan, dan sebaliknya kehidupan telah dipandang pula sebagai hikayah.²⁸⁾

Hikayah telah menjadi simbol dalam nilai tingkah laku sosial dan semua nilai yang didukung hikayah mereka pandang sebagai suatu kenyataan obyektif. Inilah titik pangkal yang amat penting yang merupakan kunci kekuatan dari posisi hikayah. Dari kunci posisi semacam itu hikayah kemudian mengambil peranan dan berpengaruh yang cukup berarti bagi masyarakat Cina untuk menjadi bangsa Indonesia. Folklore itu diperkuat oleh tersedianya lembaga-lembaga Islam yang muncul dalam tingkah laku beragama di dalam masyarakat Islam Indonesia. Lembaga-lembaga itu merupakan saluran interaksi dan integrasi antara masyarakat Cina dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Organisasi-organisasi yang menghimpun orang-orang Cina yang memeluk agama Islam sebenarnya telah ada sejak jaman kolo-

nial dahulu yaitu PIT dan PTI. Kedua organisasi tersebut kemudian melakukan fusi yang menghasilkan PITI. Dalam perkembangan selanjutnya telah terjadi satu perubahan yang mendasar pada tahun 1972, di mana kepanjangan PITI menjadi Pembina Iman Tauchid Indonesia. Dikatakan mendasar karena hilangnya istilah Tionghoa yang berarti bahwa organisasi tersebut diletakkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam bahwa "Setiap muslim adalah bersaudara". Salah satu alasan perubahan nama tersebut didasarkan pada proses perjalanan masyarakat Cina Islam selama ini dipandang telah mencapai salah satu essensi dari ajaran Islam yang tidak mengenal adanya perbedaan ras.

Ternyata orang-orang Cina yang telah memeluk agama Islam mempunyai pandangan yang jauh ke depan, dalam melakukan islamisasi. Mereka tidak hanya memikirkan banyaknya jumlah orang Cina yang memeluk agama Islam, tetapi dipikirkan juga mengenai kualitasnya. Hal itulah yang menyebabkan munculnya Kelompok Tujuh, yang bergerak di kalangan intelektual.

Dengan ambisi yang diinginkannya dan kecenderungan bertambahnya jumlah orang-orang Cina yang masuk Islam, justru pertanyaan lebih banyak ditujukan ke dalam diri organisasi PITI yaitu mampukan organisasi ini menata fungsi, struktur, dan peranannya secara baik ?

LAMPIRAN I

Susunan Pengurus DPP-PTII Periode 1980 — 1983

Dewan Penyantun	: Letjen. H. Soedirman Prof Dr. Hamka Jend. (Pol). Soetjipto Yudodihardjo Brigjen H.M. Isa Edris Letkol H. Yunan Helmi Nasution Drs. H. Junus Jahja K.H. Abdullah Syafei H. Imron Rosyadi H. Moch. Husin H Abdul Somad (Yap a Siong) K.H. TB. Amin Abdullah Prof. A.M. Ismiran
Ketua Kehormatan	: H. Abdul Karim Oey
Ketua Umum	: Herman Santoso
Ketua I	: Tony Alyan Abdullah
Ketua II	: Ong Seimi Koto
Ketua III	: Ny. H. Qomariah (Gamar)
Ketua IV	: Yuwana satya
Sekretaris Jenderal	: H. Good Wahyudi
Sekretaris I	: Anton Hong
Sekretaris II	: Herman HB.
Bendahara Umum	: Jeffrey Rizal Salim
Bendahara	: H. Nurhasanah Liem
Biro-biro	
Pendidikan Kebudayaan	: H. Benny Muharam
Dakwah	: Ustaz syarief Hidayatullah Herman HB.
Sosial	: Moh. Soleh
Organisasi	: E. Sutarman BE
Penerangan	: HM. Maryanto Wijoyo SH.
Hubungan Luar Negeri	: Jeffrey Rizal Salim HM. Maryanto Wijoyo SH.
Umum	: Abdullah Hidayat Tony M. Syahroni
Sekretariat	: Syamsuddin HZA

LAMPIRAN II

Susunan Pengurus DPD PITI DKIJAYA

Ketua Kehormatan	:	H. Moh. Husen
Dewan Penyantun	:	Dr. H. Effendi Zarkasi May. Laut dr. H.M. Mu'adz D. Drs. H. Khozyn Arief Syukur Ya'kub Adang Bahruddin H. Akhmad Ismail

Badan Pengurus

Ketua	:	Pandi Widjaja (Phan Wan Hwa)
Ketua I	:	Moh. Toyib (Lauw Kim Swan)
Ketua II	:	Moh. Isfron
Sekretaris I	:	MSJ. Suprayogi (Ong Soei Liong)
Sekretaris II	:	M. Yunus Iskandar
Bendahara I	:	Ny. Nurleila Widjaja
Bendahara II	:	Abdul Cholid (JU Nam Hay)
Pembantu Umum	:	Abdul Rahman

Biro-biro

Penerangan dan Publikasi	:	Drs. Eddy Farid Drs. Adiyono Aries Riadi, ba
Pendidikan & Kebudayaan	:	H. Firdaus Ramadi R. Rusyiana MD. R. Susantiyo, BA
Dakwah	:	M. Sobari H. Ghazali Marjuki Ilyas (Kwee Fat Tjun) Muh. Amin (Yong Lin Cahi)
Kesejahteraan Sosial	:	Ny. Nasution Ny. Nuh Ny. Atmaja Sude
Pengembangan Usaha	:	Hermasyah Mashuri
Pembinaan Anggota	:	Jon Soehadijono Kaharuddin

Sumber : Wawancara dengan Bapak Padi Widjaja, 16 Mei 1981.

LAMPIRAN III

Susunan Pengurus PITI Wilayah Nusatenggara Barat

Ketua Umum	:	Rahmat Angka Wijaya*)
Wakil Ketua	:	H. Lukman Taufik
Sekretaris Umum	:	Achmad Ichsan
Wakil Sekretaris	:	Eddy Ruminto
Bendahara Umum	:	Ali Sukry
Wakil Bendahara	:	Mustafa Syamsi Pimin

Biro-biro

Pendidikan Kebudayaan	:	Sumadi
Sosial dakwah	:	H. Taufik Uci Sanusi

Sumber : Bulletin PITI

*) Bapak Rahmat Angkawijaya telah meninggal dunia di Tanah Suci, ketika beliau menunaikan ibadah haji pada tahun 1980.

LAMPIRAN IV

Susunan Pengurus PITI Pimpinan Cabang Pusat Jakarta

Pembimbing / penasihat	:	Subana Priyana Muhammad H. Hasbullah Adang Bachruddin H. Hasan Basjri H. Achmad Ismail Nawawi Asjari sjukur Harun
Ketua	:	Padi Widjaja
Ketua I	:	Arifin
Sekretaris	:	Machrodj Sjah
Sekretaris I	:	Ibrahim Mussa
Bendahara	:	Nurleila Widjaja
Bendahara I	:	Titraday Husen
Koordinator Dakwah	:	H. Hasan Basjri Sjukur Ja' kub H. Abdul Kadir
Koordinator Pendidikan	:	Firdaus Sjarmili Mansjur Na' zir
Koordinator Sosial	:	H. Zaini Munir Nursjehan Bachtiar
Publikasi	:	Rusdy Edward

Sumber : Wawancara dengan Bapak Padi Widjaja, 16 Mei 1981.

LAMPIRAN V

Susunan Pengurus DPC Wilayah Aceh

Ketua	:	Ibnu Abbas Alhas
Wakil Ketua	:	Daldiri
Sekretaris	:	Djakfar Alhas
Sekretari I	:	Azhari Dely
Bendahara	:	Nuriah Mazdalena
Bendahara I	:	adnan

Sumber : Buletin PITI

LAMPIRAN VI

Susunan Pengurus Yayasan Rahmat Semesta

Dewan Penyantun	:	Jen. (Pol). Soetjipto Joedodihardjo H. Abdul Karim Oey K. Sindhunata Ir. Justian Suhadinata
-----------------	---	--

Dewan Pimpinan

Ketua Umum	:	Brigjen. H.M. Isa Edris
Ketua I		
Bidang Sosial Kebudayaan:		Drs. Junus Jahya
Ketua II		
Bidang Pendidikan Dakwah		Bagja Nitidiwiria
Wakil	:	Suhari Setiono
Ketua III		
Bidang Pemupukan Dana	:	H. Moh. Maryanto, SH
Sekretaris Umum	:	Ir. Alex Dario Herman Hasan Basri
Bendahara Umum	:	Herman Santoso
Bendahara	:	Juwana satya
Anggota-anggota	:	Jeffry Rizal Salim Ong Seimi Koto

Sumber : Dakwah dan Asimilasi, hal 50.

LAMPIRAN VII

Susunan Pengurus Yayasan Muslim Baru

Ketua
Wakil Ketua

Sekretaris
Bendahara

Ketua	:	Hambas Tulasaputra
Wakil Ketua	:	Junus Jahja Moh. Pudyatna
Sekretaris	:	Ny. Tien Siti Sapartinah
Bendahara	:	Sudradjat Brotokuntjoro Junus Jahja

Anggota Dewan Pengurus

- Slamet Sukirnanto
- Mohammad Maryanto
- Nitia Subarkah

Sumber :Akte Pendirian Yayasan Muslim Baru, pasal 4.

CATATAN

- 1) Buku tsb. sekarang telah diterbitkan oleh Pustaka Jaya dalam bahasa Indonesia, dengan judul **Bulan sabit dan Matahari Terbit**
- 2) W.F. Stutterheim, "De kraton van Majapahit", dalam **VKL**, jilid VII, 1948, hal 112
- 3) Wawancara dgn Bapak Moh. Isa Edris, Jakarta, 12 Mei 1981
- 4) Deliar Noer, **Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 - 1942**, LP3ES, Jakarta, 1980 hal 8
- 5) T.Y. Ibrahim, Tanya Jawab dengan seorang Muslim Tionghoa, PT. Alma Arif, Bandung, 1980, hal 10
- 6) wawancara dengan Bapak H. Moh. Isa Edris, Jkt, 12 Mei 1981
- 7) Wawancara dengan Bapak dan Ibu Pandi Widjaja, Jakarta, 15 Mei 1981
- 8) Wawancara dengan Bapak H. Good Wahyudi, Jakarta, 29 April 1981
- 9) **Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PITI**, 1980, hal 1
- 10) Soerjono Soekanto, **Sosiologi**, suatu pengantar, Yayasan Penerbit UI, 1974, hal 190
- 11) **Panji Masyarakat**, 15 April 1980, hal 32
- 12) **Sebab Musabab Masuk Islam** (surat-menyurat Sdr. Widjaja dengan Junus Jahja dan Slamet Sukirnantanto)
- 13) Abdul Karim, "Citra Pembauran dan Pembinaan Hidup Beragama", dalam **Panji Masyarakat**, 15 April 1980, hal 32 Mengenai hal ini Deliar Noer menyatakan bahwa orang-orang Arab itu bukan saja beragama Islam, jadi mempunyai faktor yang menyebabkan mereka dekat dengan orang-orang Indonesia, tetapi umumnya mereka juga adalah orang-orang berasal dari ibu-ibu Indonesia, berbicara dengan bahasa-bahasa ibu mereka, kadang-kadang tanpa mengetahui bahasa Arab (Lihat Deliar Noer, op cit. hal 66)
- 14) **Panji Masyarakat**, 15 April 1980, hal 34
- 15) **Renungan Maulid Nabi Muhammad SAW.**, 1401 H, oleh H. Junus Jahja dengan judul "Pembauran Otomatis" di Jakarta, 23 Januari 1980, hal 2
- 16) **Pelita**, 24 Juni 1980
- 17) **Kiblat** no. 17, tahun 1981
- 18) **Renungan Maulid Nabi Muhammad SAW.**, 1401 H, oleh Junus Jahya, dengan judul "Pembauran Otomatis" di Jakarta, 23 Januari 1980, hal 3
- 19) Mengenai bentuk dan corak mesjid yang bergaya Cina, lihat H.J. de Graaf, "De Oorsprong der Javanse Moskee", **Indonesie**, I hal 289 - 305. Lihat juga "Mesjid Djamo Angko, didirikan tahun 1751," **Kompas**, 24 april 1972
- 20) wawancara dengan bapak H. Sudradjat Brotkuntjoro, Jakarta, 13 Mei 1981.

- 21) Sebab Musabab Masuk Islam (surat menyurat Sdr. Widjaja dengan Junus Jahya dan Slamet Sukirnanto).
- 22) wawancara dengan Ser. Syarief Hidyatullah, Jakarta, 13 Mei 1981. Lihat juga **Vista**, no. 521, Maret/April 1981, hal 24
- 23) **Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PITI**, 1980, hal 2
- 24) Wawancara dengan Bapak H. Junus Jahja, Jakarta, 12 September dan 14 Oktober 1981
- 26) Laporan Kegiatan Kelompok Tujuh, November 1979 s/d Desember 1980 dan Desember 1980 s/d April 1981
- 27) **Idem**
- 28) **Budaya Djaja**, no. 80 tahun ke delapan, Januari, 1975, hal 28

MAJALAH DAN BROSUR

Budaya Djaja, no. 80, tahun ke delapan, Januari, 1975

Kiblat, no. 17, tahun 1981

Panji Masyarakat, 15 Maret 1981

Ultra, no. 67, maret 1981

Tempo, no. 16 Agustus 1980

Vista, no. 521, Maret/April 1981

Sari Dakwah Islamiyah, no. I, II, III, IV

Buletin PITI

Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PITI, 1980

B. BUKU-BUKU DAN ARTIKEL

Budiman, Anen, **Masyarakat Islam Tionghoa di Indonesia**, Tanjung Sari, Semarang, 1979

Dakwah dan Asimilasi, Yayasan Rahmat Semesta, Jakarta, 1979

Asimilasi dan Islam, Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa, Jakarta 1981

Gazalba, Sidi, **Islam, Integrasi Ilmu dan Kebudayaan, Tintamas, Djakarta, 1967**

Graaf, H.J., de, "De Oorsprong der Javaanse Moskee". **Indonesie**, I, 1948

Lahirnya Konsepsi Asimilasi, Yayasan Tunas Bangsa, jakarta, 1977
Noor, Deliar, **Grakan Modern Islam di Indonesia 1900 - 1942**, LP3ES, Jakarta 1980

"Mesjdjid Djamo An ke Didirikan Tahun 1975" **Kompas**, 24 April 1972
Kusmiati, Tjut Nyak, **Mesjdjid Angke : Tinjauan Ilmu Bangunan, Seni Hias dan Ukirannya**, Skripsi Sarjana Sastra Bidang Arkeologi, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta, 1976, tidak terbit).

Paulus, BP., **Masalah Cina : Hasil penelitian ilmiah di beberapa negara Asia dan Australia**, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1976.
Stuterheim, W.F., "De kraton van Majapahit", **vkI**, VII, 1948

Sukanto, Soerjono, **Sosiologi, suatu pengantar**, Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 1974.

Tan Mely G, (ed) **Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia: Suatu masalah pembinaan kesatuan bangsa.** Gramedia, Jakarta, 1979.
T.Y. Ibrahim, H., **Tanya Jawab dengan Seorang Muslim Tionghoa,** PT Alma Arif, Bandung, 1980.
Suryadinata, Leo, **The Chinese Minority in Indonesia,** Chopmen Enterprises, Singapore, 1977.

C. DAFTAR SUMBER LISAN

H. Good Wahyudi
Brigjen (Purn). H. Moh. Isa Edris
Junus Jahja
Nurleila Widjaja
Sudradjat Brotokuntjoro
Nitia subarkah
Syarief Hidayatullah
Pandi Widjaja

MINORITAS TIONGHOA dalam SASTRA INDONESIA

Oleh : Husain Haikal

PENDAHULUAN :

Minoritas Tionghoa di Indonesia sampai kini masih merupakan problema yang belum berhasil diselesaikan sebagaimana diinginkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Karena dianggap cukup peka, berita-berita mengenai minoritas Tionghoa lebih memadai disajikan dalam publikasi di luar negeri dari pada di Indonesia.1) Keresahan sosial yang bersifat anti Tionghoa sering terjadi dan "berpindah-pindah". Terahir peristiwa Sala dan Semarang pada tanggal 25 Nopember 1980 yang antara lain beroleh tanggapan dari Menhankam M. Yusuf sebagai berikut : "Kalau salah menangani masalah ini bisa terulang lagi".2) Sekedar sebagai penghibur dapat dikatakan problema minoritas Tionghoa tidak hanya monopoli Indonesia, tetapi juga umumnya negara-negara Asia Tenggara 3).

Karya sastra langsung atau tidak langsung menanggapi masalah-masalah yang ada disekitar pengarangnya, karena objek karya sastra adalah realitas atau apapun yang dianggap sebagai realitas oleh pengarangnya.4) Nampaknya beberapa karya sastra Indonesia mengetengahkan pula minoritas Tionghoa yang akan dicoba penyajiannya dalam studi awal ini.

Berikut ini dipandang perlu diketengahkan sekedar latar belakang sejarah mengenai minoritas Tionghoa di Indonesia, seperti migrasi mereka, hubungan mereka dengan pribumi dan pemerintah Belanda, kehidupan ekonomi mereka dan problema-problema yang mereka hadapi, Kemudian akan dicoba penyajian beberapa karya sastra yang mengetengahkan minoritas Tionghoa. Kesimpulan sementara akan mengakhiri studi awal ini.

MINORITAS TIONGHOA :

Sekalipun cukup memadai para cendekiawan telah menulis mengenai minoritas Tionghoa di Indonesia,5) salah seorang sejarawan Indonesia keturunan Tionghoa, Leo Suryadinata menyatakan pada 1976 : "..... the English-speaking scholars-only with one exception6) - have been attracted to this field only in the las two decades". 7)

Orang-orang Tionghoa sudah sama berdatangan ke Indonesia jauh sebelum kedatangan orang-orang Barat ke Indonesia. Letak strategis Indonesia serta hasil-hasil produksi Indonesia telah merupakan besi berani yang menarik kedatangan orang-orang Tionghoa dan Timur asing lainnya. Mereka datang tidak hanya membawa

barang-barang dagangan mereka tapi juga budaya mereka *) yang kemudian sebagian dari kebudayaan mereka itu berhasil diadaptasikan dalam budaya Indonesia.

Tulisan Ha-Huan, **Ying-yai Shen-lan** dan tulisan Fei-Hsin, **Hsing-Chia Shel Lan** memberitakan adanya para pedagang Tionghoa Muslim yang telah menetap di beberapa pelabuhan di Indonesia. Sebagian dari mereka berhasil mengawini wanita-wanita pribumi dan hidup sesuai dengan ajaran agama mereka, serta hidup harmonis dengan para penduduk pribumi yang umumnya masih "pagan"9)

Kurang jelas apakah ada problema rasial dalam kerajaan-kerajaan di Nusantara, termasuk dalam kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, hanya patut direnungkan apa yang dikatakan oleh M.A. Jaspán : "Rase consciousness and discrimination appear to have gained momentum or to have commenced after contact with the Dutch was made."10) Nampaknya kalimat ini cukup dapat dipertanggungjawabkan mengingat minoritas Tionghoa cukup "dimanja" oleh Belanda, setidaknya sejak masa J.P. Coen, yang menyatakan : "There is no people in the world which serve us better than the Chinese; too many of them cannot be brought to Batavia".11) Bahkan dia menyarankan pada penggantinya agar mengirimkan armada ke daratan Tiongkok untuk menangkap orang-orang Tionghoa sebanyak mungkin untuk "dijadikan" penduduk Indonesia.

Nampaknya para pendatang awal ke Batavia, lepas dari asal usul maupun kepercayaan mereka, secara bertahap berhasil "di-Islamkan" dan mereka lebur membaur di kalangan para penduduk asli.12) Proses pembauran ini juga "melibatkan" pula orang-orang Tionghoa yang telah menetap di Batavia.13)

Ti adanya pengawasan menyebabkan laju kedatangan orang-orang Tionghoa sangat meningkat sekali dan menimbulkan masalah-masalah sosial, terutama disebabkan terbatasnya lapangan kerja yang ada. Kebanyakan para pendatang Tionghoa ke Indonesia ini sangat miskin, buta aksara serta tidak memiliki suatu ketrampilan, hingga bila mereka tidak memperoleh kerja tertentu, sebagian mereka menjadi gelandangan dan lebih menyedihkan sebagian mereka karena dorongan atau tuntutan perut terlibat dalam berbagai kejahatan. Beberapa daerah tertentu Batavia benar-benar rawan lebih-lebih pada malam hari. Untuk mengendalikan situasi yang rawan, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan sejenis paspor diperuntukkan bagi orang-orang Tionghoa yang telah berada di Batavia dan melarang kedatangan orang-orang Tionghoa baru.

Orang-orang Tionghoa yang tuna karya dan lebih-lebih dianggap berbahaya dikirim kembali pulang atau ke Sailan. Hubungan antara keduanya makin memburuk, apalagi ada semacam desas-desus bahwa mereka yang diangkut dengan kapal tidak dikirim kembali pulang ke tanah leluhur atau ke Sailan, tapi hanya ditenggelamkan di tengah-tengah lautan. Akibatnya orang-orang Tionghoa makin marah dan "putus asa" terhadap pemerintah kolonial Belanda se-

dang Belanda makin curiga terhadap mereka. Ketegangan makin lama makin memuncak dan ketika salah sebuah rumah orang Tionghoa terbakar, Belanda menganggap hal tersebut sebagai tanda dimulai pemberontakan orang-orang Tionghoa. Belandapun menyerang dan membunuh mereka.14)

Dalam situasi yang demikian kritis ini tampil Thai Wan Sui memimpin orang-orang Tionghoa melawan Belanda secara gerilya. Dengan kerjasama dengan Mas Garendi, Belanda beserta sekutunya berhasil didesak. Ketika Paku Buwana II bimbang untuk bekerja sama, pasukan gabungan yang dipimpin Thai Wan Sui serta Mas Garendi berhasil menduduki Kartasura. Hanya dengan bantuan Cakraningrat dari Madura, perlawanan tersebut dapat dipadamkan.15)

Setelah situasi sepenuhnya dikuasai Belanda, seperti masa sebelumnya orang-orang Tionghoa ditempatkan di daerah tertentu di kota-kota. Mereka diperintah oleh pimpinan yang diambilkan dari kalangan mereka sendiri dan cukup mempunyai otonomi. Ketika jumlah mereka bertambah, diangkat pula beberapa opsir tambahan sesuai dengan kebutuhan dan mereka yang terpilih ini beroleh pangkat seperti militer, dari sersan sampai dengan mayor. Pengangkatan mereka berdasarkan pengaruh di kalangan orang-orang Tionghoa yang mereka miliki dan biasanya berdasarkan kekayaan yang berhasil dikumpulkan.16)

Orang-orang Tionghoa yang sama berdatangan ke Indonesia dapat dibedakan dalam beberapa grup seperti grup Kanton atau Hokkien, Masing-masing grup mendirikan semacam perkumpulan rahasia yang antara lain bergerak untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan para pendatang Tionghoa baru yang termasuk grup masing-masing. Bahkan beberapa tokoh terkenal seperti Dr. Sun Yat Sen konon berasal dari semacam perkumpulan rahasia ini.17)

Sayangnya antar perkumpulan rahasia tadi saling berkompetisi secara "berlebih-lebihan" untuk merebut pengaruh maupun keuntungan ekonomi. Hal ini sering "mengganggu" keamanan hingga pemerintah Belanda berusaha menumpasnya.

Pada perempat terakhir ke XIX, kalangan Tionghoa perananan mulai menerima pendidikan Barat. 18) Kemudian karena adanya semacam kekhawatiran di kalangan pemerintah Belanda akan kehilangan "pengaruh" di kalangan Tionghoa-peranakan, pemerintah Belanda menganggap perlu didirikan sekolah khusus untuk orang-orang Tionghoa, sebagaimana dikatakan oleh Suryadinata :

By 1909, the Minister of Colonies, D. Fock, had come to consider the question of schools for the Chinese as urgent. In the same year the Council of the Indies advised the Founding of a special school for the Chinese. One year later, the first Dutch primary school for the Chinese, the Hollandsch Chinesesch school

(HCS), was established in Batavia, to beduplicated in other major cities. 19)

Sementara golongan pribumi juga amat sangat membutuhkan sejenis sekolah tersebut dan baru pada 1918 didirikan Holland Inlandsche School (HIS), cukup lama setelah golongan pribumi mendirikan sejenis sekolah tersebut.20)

Pada masa pergerakan nasional, orang-orang Tionghoa setidaknya dipisahkan dalam dua golongan. Golongan yang bersikap "negatif" dan golongan yang bersikap "positif" terhadap pergerakan nasional. Hanya patut direnungkan pada yang dikatakan oleh salah seorang cendekiawan yang cukup menekuni masalah tersebut : "....." any Chinese aid to Indonesian nationalist prewar period was often motivated by sympathy for Asian nationalism and anti imperialist sentiment, but only very rarely by any identification with the fate Indonesia or Indonesians.21)

Sekalipun Partai Tionghoa Indonesia (PTI) berorientasi Indonesia sebagai tanah air mereka, tapi para PTI tetap memantapkan adat istiadat dan pendidikan mereka. 22) Hingga setelah Indonesia merdeka, problema minoritas Tionghoa belum berhasil diselesaikan sebagaimana yang diinginkan. Hal ini lebih terasa sekali bagi minoritas Tionghoa yang hidup di kota-kota kecil maupun pedesaan.23)

MINORITAS TIONGHOA DALAM SASTRA INDONESIA

Dalam puisi Indonesia, belum diketemukan penyair yang memilih minoritas Tionghoa dalam sanjak-sanjaknya, termasuk penyair Amir Hamzah maupun Chairi Anwar. Hanya Rendra dalam sanjaknya "Ho Liang Telah Pergi", nampak membandingkan hidup dalam dunia kita ini dengan tempat Ho liang hidup. Rendra menulis dalam sanjaknya itu antara lain sebagai berikut :

Apa panas di sana, Ho Liang ?
Padang Salju atau Firdausi ?
Engkau saja yang cerita, Ho Liang ?
Jangan kemurungan tanah merah di sini. 24)

Lukisan minoritas Tionghoa dalam prosa Indonesia nampaknya lebih bervariasi. Dalam karya sastra mengenai zaman penjajahan minoritas Tionghoa digambarkan dalam situasi yang lebih baik dibandingkan golongan pribumi. Minoritas Tionghoa memiliki toko, cukup dekat dengan kau priyayi, dan hubungan mereka dengan pribumi terbatas pada transaksi perdagangan. Mungkin karena umumnya mereka lebih baik, umumnya pribumi bersikap negatif terhadap mereka.

Dalam **Salah Asuhan** diketengahkan peranan Tante Lien, seorang setengah umur, perokok serta penjual barang-barang, teru-

tama barang berlian. Tante Lien dikenal sebagai penjual wanita, yang mencari mangsanya dari wanita-wanita yang telah bersuami dan dari keluarga baik-baik. Sering-sering Tante Lien datang ke rumah Hanafi dan berhasil menghibur Corrie dengan berbagai lelucon-leluconnya. Setelah makin akrab mulailah Tante Lien menawarkan anting-anting berlian yang mahal dan ketika Corrie tidak minat karena tidak mampu, Tante Lien mulai memainkan perannya :

"Oh, kalau itu jangan menjadi alangan, tentu perkara kecil. Marilah Tante bercerita dengan sebenarnya. Sesungguhnya kerabu ini bukan dagangan biasa, melainkan seorang tuan tanah bawahan Tangerang, Baba Tjie, menyuruh jualkan kalau..... kalau engkau suka menerimanya".

"Siapa Baba Tjie ? Kenapa aku mesti menerimanya ?"

"Oh, non, engkau masih muda, belum tahu keadaan kota Betawi di dalam dunia kepelesiran. Baba Tjie seorang anak muda keluaran HBS, ayahnya kapitan dan meskipun ayah itu masih hidup, tapi ia sudah diberi menguasai satu bidang tanah, buat kepelesiran sadja. Lu tau bae-nja Non, itu kerabu belum berape, asal lu suka ladenin, apa juga dia kasi, dong !".

Corrie sangat kaget dan terhina oleh tawaran itu. Langsung Tante Lien diusir dan tidak diperkenankan datang lagi. 25)

Dalam **Merantau ke Deli** diketengahkan orang-orang Tionghoa yang cukup kaya memiliki perkebunan-perkebunan dan hotel-hotel. Para Nyai mandor perkebunan tembakau yang lari dengan kekasih mereka kemudian ditipu, ditinggalkan setelah hartanya habis, karena tak berdaya lalu menjadi pelacur di hotel-hotel. Kelak setelah para pelacur ini sakit-sakitan dan luntur dengan mudah mereka dilemparkan oleh para tauke mereka. Selanjutnya Hamka mengetengahkan suatu istilah : "Biasanya orang berkedai diusir orang yang ingin melihat letak kedai itu dengan uang, "tjia thee" namanya, yaitu adat yang telah biasa ditiru dari orang Tionghoa"26)

Dalam **Matahari Jakarta** yang berisi riwayat hidup Husni Thamrin. Soekamto menceritakan sekolah Mangga Besar tempat Husni belajar. Sekolah ini didirikan kapitan Tionghoa dan kebanyakan muridnya dari golongan Tionghoa pula. Pada perayaan Cap Go Meh orang-orang Tionghoa mengirimkan hadia pada Wedana Thamrin. Pertunjukan barongsay dan kunthau menghibur rakyat kawedanan. 27)

Dalam **Subuh** (Cerita-cerita Pendek Revolusi) Pramoedya Ananta Toer menyajikan runtutan bangunan milik Tionghoa di depa stasiun kereta apa Blora. Selanjutnya Pram juga berkata : "Dan orang Tionghoa mengikuti/Pasukan/dengan matanya yang sipit. Di belakang mata sipit itu merujuk beribu macam pikiran-pikiran antara uang dan darah"28)

Dalam **Midah si Manis Bergigi Emas**, Pramoedya menggam-

barkan betapa berat hati keluarga yang taat bergama melihat anak puteri mereka menjadi penyanyi jalanan untuk menghidupi diri puteri itu sendiri beserta anaknya. Nampaknya mereka lebih menderita lagi ketika mendengar anaknya menyanyi dalam perkawinan keluarga Tionghoa hingga ibu Midah berteriak : "Nyanyi di rumah Tionghoa kawin ! Midah ! Anakku ! 29)

Rasa kurang senang terhadap golongan Tionghoa juga tercermin sampai di kalangan tukang becak maupun kupu-kupu malam. Keduanya menolak memberikan pelayanan sekalipun akan beroleh uang yang cukup banyak. Ini tergambarkan dalam "Selamat Jalan Anak Kufur".

"Oh, angin ? kata si Tionghoa gemuk, mukanya kembali gembira "Tapi dari pada menunggu angin, kita lebih baik masuk kamar. Mari ?"

"Ogah !, jawab Titi lagi. Dan sekali ini terus menjauh. Si tionghoa gemuk itulah kembali kehilangan kegembiraan. Sebentar ia menyusust keringat. Kemudian menghampiri si ibu, katanya dengan suara mengadu. 30)

Sejauh kemampuan menyusun menelaah prosa Indonesia, hanya dua karya saja yang mengetengahkan minoritas Tionghoa dalam peran penting.

Tulisan Aoh, "Tidak ada apa-apa" melukiskan betapa Sardan sangat menyesal karena telah meminta uangnya kembali dari Gouw Boen In alias Darmawikarta. Dia tidak hanya kehilangan muka berhadapan dengan tetangga tadi, tapi tidak bakal menerima bunga sebanyak Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Gouw meminjam uang dari Sardan tanpa dapat memberikan jaminan apa-apa kecuali memberikan bunga tiap bulan sebanyak 20 %.

Sebulan kemudian Gouw hanya terbahak ketika Sardan menawarkan uangnya untuk dipinjam Gouw dan bukan Gouw yang meminta pinjam. Gouw menerima tawaran tersebut dan tiap bulan dia memberi Sardan bunga seperti yang dijanjikannya, sebanyak 20 % transaksi ini berjalan lancar selama dua tahun. Gouw meminjam uang tidak hanya satu tapi sampai lima tujuh juta rupiah.

Suatu saat Gouw sangat membutuhkan uang sebanyak Rp. 25 juta untuk membeli kuda balap dari Australia. Keuntungan yang bakal diperoleh benar-benar hebat karena banyak jenderal sangat tertarik dengan kuda balap tersebut.

"Tapi aku tidak ada uang sebanyak Rp. 25 juta ; yang ada hanya 10". "Tidak mengapa", jawab Gouw. "Berikan yang sepuluh 'itu dan yang lima belas lagi engkau pinjam dari bank". 31)

Kemudian selama beberapa bulan Gouw tidak tampak batang hidungnya. Sardan tidak menerima kabar dari Gouw apalagi menerima bunga, tapi terus menerus dia harus membayar bunga pada bank. Isteri Gouw mengatakan bahwa suaminya sangat sibuk di Jakarta. Akhirnya Sardan pergi ke Jakarta dan dengan mudah menemui Gouw dan memperoleh kembali uangnya dalam bentuk cek.

Ternyata Gouw seorang teman yang baik, karena membawa Sardan dan mengunjungi berbagai nite club. Sardan hanya mengucapkan istighfar melihat tarian strip tease yang baru pertama kali dilihatnya.

Hari berikutnya Sardan kembali pulang dan langsung menuju ke bank langganannya. Celakanya Sardan tak dapat menguangkan cek yang baru diterima dari Gouw, karena Gouw tak punya deposit sepeserpun di bank. Sebagai langganan yang baik, Sardan dengan mudah berhasil menemui direktur bank untuk mengharapkan nasihat yang berharga.

"Yah," kata Bapak Kepala mengangkat bahu. "Kalau saudara laporkan belum tentu uang itu bisa kembali, sebab tentu si Gouw akan mengajukan pengacara yang ulung. Tetapi yang pasti, Saudara akan dituntut telah mendirikan bank gelap, yang hukumannya tidak enteng. Bukan saja seperti sudah saya katakan Saudara tidak mempunyai izin, akan tetapi juga Saudara akan dituduh telah menggelap pajak. Saya tidak percaya atas keuntungan-keuntungan yang didapat dari Gouw selama dua tahun itu Saudara telah memberitahukannya kepada Kantor Pajak. Bukan itu saja ; Saudarapun akan dituduh menjadi lintah darat, karena bunga yang terlampau tinggi biarpun kehendak Saudara".³²⁾

Tulisan Putu, **Pabrik**, menggambarkan kesuksesan Tirtoatmojo. Dia mendirikan sebuah pabrik tanpa modal apa-apa. Pabrik ini lama-lama makin bertambah besar dan bertambah baik. Tetapi para buruh tidak pernah puas karena Tirto tidak pernah memenuhi janjinya kepada mereka, sedang mereka hidup dalam serba kemiskinan. Kadang-kadang Tirto memberikan sekedar sumbangan pada buruh yang amat sangat dalam kekurangan. Sumbangan ini diberikan lewat pemimpin mereka. Ilyas. Tapi Tirto tidak pernah tahu apakah sumbangan tersebut sampai kepada yang bersangkutan atau tidak.

Semula Tirtoatmojo dikenal sebagai Robert Lee, asal-usulnya tidak jelas. Ketika masih muda Robert hidup intim dengan adik kandungnya, dan lahirlah anak mereka seorang puteri yang dikenal sebagai Maret. Adik kandung Robert kemudian menjadi gila dan meninggal. Seseorang memelihara Maret yang hidup dalam lingkungan Pabrik dan seperti ibunya Maret juga sinting. Pengalaman-pengalaman pahit masa lalunya sering mengganggu Robert, terutama bila dia sedang mabuk Robert sering ngomel : "Kenapa ikke bikin pabrik ?" Kenapa ikke bikin susah banyak orang ? Kenapa ikke tidak perdula janji-janji ? Kenapa ikke usir banyak orang ?"³³⁾

Tirto pernah pula mengawini Marie yang memberinya seorang putera, Joni. Beberapa hari setelah Marie meninggal, terjadi kebakaran di kampung, Tirto menuduh seseorang pasti telah membunuh isterinya, sedang masyarakat percaya bahwa Marie bunuh diri dengan menggantung. Tirto nampaknya kehilangan sangat isterinya, dan mengambil Susi sebagai gundiknya. Ketika bosan,

Susi dilepas Tirto. Kehidupan pribadi Tirto makin runyam karena Joni pergi.

Seperti kebiasaan Tirto menunda kenaikan THR Akibatnya ketegangan terjadi. Saat itu tiba-tiba Joni pulang sebagai pemuda yang telah matang dan siap mengambil oper pimpinan Pabrik. Celakanya Baik Tirto maupun Paman tidak menyukai Joni, bahkan Tirto tidak bersedia ditemui Joni.

Suatu hari Dringgo yang serba kekurangan terlambat dan Tirto tidak memberi izin padanya untuk menemui Tirto. Dringgo marah dan mencoba untuk membunuh Tirto. Karyawan lain berhasil memisah mereka sedang Paman berhasil merebut pisau Dringgo. Paman kemudian minta beberapa karyawan untuk menjaga Pabrik dan rumah Tirto, karena situasi makin genting. Karyawan lain yang mencoba mendapatkan kepastian kenaikan THR hanya berhasil menemui kasir Tirto, Mei Lan. Karyawan yang tambah marah dicoba ditenangkan oleh Mei Lan : "Tapi sabal dulu, balangkali masih ada instluksi lain. Pembicalaan belon putus. Tunggulah !". 34)

Pada saat Dringgo menemukan waktu yang baik untuk mengeluarkan kekesalannya dan mempengaruhi rekan-rekannya :

"Dia (Tirto) maju terus, kita mau dikuburkan di sarang pelacuran itu ! Dia sengaja membiarkan kita main judi, Paman dilepasnya supaya kita jadi penjudi, kita dibiarkannya di mulut pelacur, supaya kita miskin dan selalu kurang. Kalau sudah hutang, kita akan lupa tanah ini kepunyaan kita, tanah ini kita sewakan kepadanya. Kita sudah lupa mengusut siapa yang sudah membakar kampung kita ini dulu. Banyak orang tahu.35)

Sebelum diselesaikan, kalimat Dingggo sudah diputus Ilyas, yang juga berhasil mengalihkan pembicaraan. Dia berhasil mempengaruhi karyawan-karyawan lain agar pembicaraan dilanjutkan di gudang, kemudian dia memanipulasi topik pembicaraan yang tengah berlangsung. Hingga Dringgo tidak dapat menahan diri dan langsung berbicara :

"Lihat ! Sejak pertama kali saya lihat Pak Ilyas inilah yang menerangkan pada kita soal saham. Kita dibujuk agar meminjamkan tanah ini beramai-ramai kepada Robert. Pak Ilyas pulalah yang telah berusaha selama ini mendamaikan agar kita selalu sabar. Saya jadi curiga, maaf saya tidak perlu menutup-nutup, barangkali besok saya akan dipecat. Saya curiga jangan-jangan Pak Ilyas ini mempunyai hubungan yang rapat dengan Robert, jadi dia bukan pemimpin kita, tapi orang yang dikirim Robert untuk memata-mati kita !".

Kelompok itu gemuruh. Ilyas tertawa terbahak-bahak. "Benar saudara-saudara, benar. Meskipun saya sudah tua, saya adalah antek Tuan Tirto. Saya hampir saja dipermantu, mau dikawinkan dengan Siyem (bedinde Tirto). Dan saya hampir mau.....". Kelompok itu tertawa. Suasana yang panas jadi encer kembali. Kemudian Dringgo dan Ilyas saling menuduh. Tiba-tiba mereka

terhenti karena Paman datang. Paman mencoba mencampuri masalah ini dan menghina Dringgo. Dringgo menyerang Paman, tapi gagal, juga pada serangan ke dua Dringgo. Semua kemudian datang untuk meleraikan. Tiba-tiba mereka melihat Paman membawa pisau, para karyawan lalu berpecah mencari senjata apa saja, mereka mengitari dan mengepung Paman. Suasana menjadi tegang kembali.

"Sabar, sabar," kata Ilyas. "Kalau kalian mau bunuh-bunuhan biar aku dibunuh lebih..."(37) Tiba-tiba mereka berhenti. Ilyas berhasil membujuk mereka. Dringgo yang telah di luar terusan mengancam dengan teriaknya akan membakar pabrik itu dilaksanakan. Tirta menyaksikan ini terus jatuh pingsan. Beruntunglah polisi dan pemadam kebakaran berhasil memadamkan. Dringgo ditangkap dan dipenjarakan. Tirta sekarang lumpuh. Hanya dengan pertolongan Siyem Tirta dapat makan, mandi atau menjalankan tugas sehari-hari. Joni sekarang memimpin pabrik. Beberapa hari kemudian Tirta meninggal Paman pergi.

Dengan pimpinan baru, para karyawan menerima uang lebih dari yang sudah, hanya mereka menghabiskan uang dengan judi atau pelacur, hingga keadaan mereka tidak bertambah baik. Suatu hari terjadi perampokan di pabrik dan pada waktu yang hampir bersamaan Paman pulang, dia kehilangan kopor-kopornya. Tanpa sengaja Paman ditangkap polisi dan diinterogasi. Joni minta agar Paman dibebaskan dan antara Joni dan polisi terjadi percakapan intim dan polisi mengulang-ulang betapa hubungannya dengan mendiang Tirta sangat dekat sekali. Paman dibebaskan tapi Paman berpendapat Jonilah yang menyuruh polisi menangkapnya dan dia dendam sekali. Dringgo juga dibebaskan, agar si perampok segera dapat ditangkap.

Banyak yang masih menggerutu dengan situasi yang ada. Paman dibawah pengaruh alkohol membawa granat ingin menyelesaikan masalahnya dengan Joni dan menantang Joni untuk duel, sambil berteriak-teriak : "Kau bunuh papamu supaya dia tidak mewariskan pabrik pada anaknya yang syah ! Siapa kamu ! Kamu kira aku tidak tahu siapa kamu. Anak sundal Marie ! Penduduk disini membunuhnya karena dia menjerat pemuda-pemuda sampai berkelahi !" (38)

Dengan bersenjata pistol, Joni ingin melayani Paman, tapi dicegah Ilyas. Joni berwasiat kalau dia terbunuh minta dikubur diantara ibu dan ayahnya. Sementara karyawan asyik dengan Paman dan Joni, Dringgo telah berhasil membakar pabrik dan kebakaran tak dapat dipadamkan lagi. Melihat semua ini Susi berteriak setengah gila : "Pabrikk !" (39)

Hubungan intim antara para pejabat dengan minoritas Tionghoa dengan jelas digambarkan dalam cerita pendek Umar Nur Zain. "Transaksi".

Kalau dibanding-banding relasi-relasi orang Melayu meranglah bodoh-bodoh. Mereka tidak memperhitungkan dalam bisnisnya

soal-soal kecil semacam ini, hingga aku hanya menarik napas panjang kalau mereka selesai kubantu, karena hanya mengucapkan terima kasih saja. Sebaliknya para pedagang Cina itu, mereka memang tahu diri betul. Tanpa kuminta, mereka datang ke rumah, menaruhkan barang-barang yang kuperlukan, atau uang di dalam amplop besar. 40)

Banyak relasi, pedagang terutama orang-orang Cina yang tahu kegemaranku, selalu mengirim wanita-wanita cantik ke kantor, semua itu ditanggung relasinya 41) Nampaknya antara dua kelompok itu saling menguntungkan dan dapat belajar dari sebagian kelebihan masing-masing. Mereka/beberapa pegawai bawahanku yang tergabung dalam staf *task-force* / jugalah yang mengatur wanita-wanita bayaran untuk menghormat tamu-tamuku, para pejabat dari daerah atau mana saja. 42)

Sebagai seorang pejabat aku memang sudah demikian terlatih bermain sandiwara. Kapan aku bisa marah, kapan aku bisa halus sopan, patuh pada kepada pejabat yang lebih tinggi dan aku bisa memerankan seseorang tokoh berwibawa, yang tak berdosa serta bersikap seperti pejabat teladan: 43)

BEBERAPA KESIMPULAN SEMENTARA :

Nampaknya karya sastra Indonesia lebih banyak berbicara tentang perubahan-perubahan yang cukup fundamental yang tengah berlangsung dalam masyarakat. Minoritas Tionghoa hanya dijadikan topik sampingan saja, hanya beberapa karya saja yang cukup memusatkan perhatian pada minoritas tionghoa.

Kecuali hanya dalam salah satu sanjak Rendra "minoritas Tionghoa." Kebanyakan karya prosa Indonesia menggambarkan minoritas Tionghoa sebagai tokoh tambahan. Mereka digambarkan sebagai para pedagang, pemilik hotel, pemilik perkebunan. Lukisan terhadap mereka biasanya "negatif" atau setidaknya "netral" serta hampir tidak ada yang bersifat "positif". Selain beberapa nama makanan dan permainan, beberapa istilah Tionghoa juga menjadi milik Indonesia, seperti tjia thee atau gundik, hanya saja mempunyai arti yang agak negatif.

Makin berakarnya kegiatan ekonomi minoritas Tionghoa secara tidak langsung berkaitan pula dengan makin seringnya minoritas Tionghoa dijadikan bahan dalam penulisan sastra Indonesia, dan lukisan mengenai mereka makin bertambah "jelas". Terbukti karya Aoh, "Tidak ada apa-apa". dan karya Putu Pabrik, terbit pada tahun 1975. Sedang tulisan Umar Nur Zain, "Transaksi", terbit pada pertama kali pada tahun 1978.

Sebagai penutup dapat dikatakan adanya tiga hal dalam problema minoritas Tionghoa di Indonesia. Hanya saja minoritas Tionghoa saja yang harus menanggung "resiko", sedikit sekali "resiko" ditimpakan pada sebagian kecil orang Indonesia atau pejabat "pri-

bumi" yang memanfaatkan minoritas Tionghoa untuk kepentingan pribadi mereka. Sedang hal ketiga adalah yang paling sulit untuk ditangani, karena pemerintah daratan Tionghoa sejak zaman dinasti Manchu sampai dengan pemerintahan komunis sekarang menge-trapkan **jus sanguinis** pada orang-orang Tionghoa yang hidup di seberang lautan.-

CATATAN

1Salah satu contoh adalah tulisan David Jenkins, "unwanted Minority". **Far Eastern Economic Review**, Januari 18, 1980 ; "Liem Sioe Liong Indonesia"s Imperial Cukong, **"Insight**, May '78.

2"Masalah Cina Takkan Habisnya", **Muhibbah**, No. 8, 1981, p.i2.

3Lihat V. Thompson dan R. Adloff, **Minority Problems in Shoutheast Asia**, New York : Russel and Russel, 1970)

4Satyagraha Hoerip, **Cerita Pendik Indonesia**, Jilid I, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dep. P dan K., 1979), p. xviii ; Kuntowijono, "Peristiwa Sejarah dan Karya Satra", Makalah dalam Seminar Ilmu dan Seni Pusat Penelitian dan Studi Kebudayaan UGM, Yogyakarta, 1981, p. 1.

5Beberapa tulisan tersebut antara lain : D.E. Willmott, **The Chinese of Semarang**, (Ithaca : Cornell Un. Press, 1960) ; Lea E. Williams, **Overseas Chinese Nationalism**, (Chicago : Glencoe, 1960); Mary F. Somers. **Peranakan Chinese Politics in Indonesia**, (Ithaca : Cornell Indonesia Project, 1964)

6W.J. Cator, **The Economic Position of the Chinese in the Netherlands**, (Chicago : Un. of Chicago Press, 1931).

7Leo Suryadinata, **Peranakan Chinese Politics in Java 1917-42** (Singapore : ISEAS, 1976).

8.V.W. Wolters, **Early Indonesia Commerce**, (Ithaca : Cornell Un. Press, 1967), pp. 219, 250 ; Somers, **op. cit.**, p.1.

9L. Siauw, "Ethnic Chinese in Malaysia, "**Jurnal Antropology and Sosiologi**, II, 1972 -3, p. 2, 1961. Hamka, **Sedjarah Umat Islam**, Jilid IV, (Bukittinggi : Nusantara,) p. 41. c. f.

10.M.A. Jaspian, **Ethnic and Racial Relation in Indonesia**, (Bandung : Unpad, 1959), p.5.

11G.Mc. Turnan Kahin, **Nationalism and Revolution in Indonesia** (Ithaca : Cornell Un, Press, 1963), p.8.

12Lance Casles, "The Ethnic Profile of Djakarta, "**Indonesia**, (Cornell), Vol 1 No. 3, 1967, pp. 158-9.

13**ibid.**, p.162

14.R. Moh. Ali, **Perjuangan Feodal**, (Djakarta : Ganaco, 1963), pp.181-2.

15**ibid.**, pp. 183-3.

16Lee suryadinata, **The Pre-World War II Peranakan Chinese Press of Java** (Athens : Ohio Un. Center for International Studies, S.E.A. Program, 1971), p.9.

17.G.P. Means, **Malaysian Politics**, (London : Un. of London Press. 1970), p.29.

18 Suryadarma, **op. cit.**, p. 5.

19 Leo Suryadarma, "Indonesia Chinese Education : Past anda Present, "**Indonesia** (Cornell), No. 14, 1972, p.54.

20Deliar Noor, **The Modernist Muslim Movement in Indonesia**, (Kuala Lumpur : Oxford Un. Press, 1972), p.58

21Somers, *op. cit.*, p.5 ; c.f. Suryadinata, "The Pre. World War, p.22.

22.Leo Suryadinata, "Pre War Indonesia Nationalism and the Peranakan Chinese," **Indonesia**, No. 11, 1971, p.91.

23Somers, *op. cit.*, p.2.

24W.S. Rendra, **Ballads and Blues : Poems**, translated by B. Raffel, H. Aveling and Derwent May, pp. 108-9.
H. Aveling and Derwent May, pp. 108-9.

25Abdul Muis, **Salah Asuhan**, (Jakarta : Balai Pustaka, 1961), pp. 194-5. Roman ini mengisahkan pria Indonesia yang beroleh pendidikan Barat. Hanafi lama menjadi orang asing dalam masyarakat Indonesia. Dia berusaha mengatasi kesulitannya dengan menjadi warga negara Belanda dan mengawini gadis Indo Eropa, tapi gagal.

26Hamka, **Merantau ke Deli**, (Jakarta : Djajanurni, 1962), p.110. Roman ini mengisahkan perkawinan yang bahagia antara wanita Jawa, Poniem, dengan pria Minang. Leman, sampai kemudian Leman mengawini gadis Minang.

27Soekanto S.A., **Matahari Jakarta**, (Jakarta : Pustaka Jaya, 1974), pp. 33-5.

28Pramudya Ananta Toer, **Subuh**, (Bukittinggi : Nusantara, 1961) p.56.

29P.A. Toer, **Midah si Manis Bergigi Emas** (Jakarta : Grafika 1963), p. 101.

30U.T. Sontani, "Selamat Djalan Anak Kufur, **Indonesia**, No. 8 Th. VII, Agustus, 1956, pp. 346-7.

31Aoh K. Hadimadja, **Poligami** (Jakarta : Pustaka Jaya, 1975), p.111.

32**Ibid.**, p.113.

33Ptut Wijaya, **Pabrik**, (Jakarta : Pustaka Jaya, 1975), p.40.

34**Ibid.**, pp. 54-5

35**Ibid.**, p.55

36**Ibid.** p.60

37.**Ibid.**, p.62

38**Ibid.**, p. 117.

39**Ibid.**, p.118

40Umar Nur Zain, "Transaksi," S. Hoerip, *op. cit.*, III, p.175.

41**Ibid.**, p.176.

42**Ibid.**,

43**Ibid.**, p.178.

Lampiran I

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 26/A.I/1981**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB
PENYELENGGARAAN SEMINAR KESEJARAHAN DI JAKARTA
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**

- Menimbang : a. bahwa salah satu kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional adalah mengadakan Seminar Kesenjaraan di Jakarta;
- b. bahwa untuk dapat tercapainya trtib kerja yang berdaya guna dalam penyelenggaraan Seminar tersebut, maka dipandang perlu membentuk "Panitia Pengarah dan Penanggung Jawab Penyelenggaraan Seminar Kesenjaraan di Jakarta".
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1981;
 - c. Nomor 47 Tahun 1979;
 - d. Nomor 237/M Tahun 1978;
 - e. Nomor 14 A Tahun 1980 beserta penyempurnaannya;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. Nomor 0222 e/0/1980 tanggal 11 September 1980;
 - b. Nomor 0122/P/1981 tanggal 7 April 1981;
3. Surat Pengesahan DIP Tahun Anggaran 1981/1982 Nomor 462/XXIII/3/1981 tanggal 12 Maret 1981.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : 1. Membentuk "Panitia Pengarah Seminar" dengan tugas mengarahkan serta menyelesaikan sesuatu agar penyelenggaraan Seminar Kesenjaraan mencapai hasil yang diharapkan.
2. Panitia tersebut pada ayat 1 pasal ini mempunyai anggota sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Mengangkat Penanggung Jawab Penyelenggaraan Seminar Kesenjaraan yang bertugas mengadakan persiapan pelaksanaan dan penyelesaian Seminar Kesenjaraan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan Seminar Kesenjaraan yang namanya seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang disediakan dalam DIP Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional tanggal 12 Maret 1981 Nomor 462/XXIII/3/1981.

- KEEMPAT** : Apabila pelaksanaan Seminar Kesejarahan telah selesai, Panitia Seminar dianggap bubar, dan mewajibkan Ketua Panitia Seminar menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan tugasnya serta pertanggungjawaban keuangan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa Keputusan ini berlaku selama 3 bulan mulai 1 Agustus 1981.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juli 1981.
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN,
ttt.

Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130 119 123

SALINAN KEPUTUSAN INI

Disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri Koordinator,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen Dep. P. dan K.,
8. Inspektur Jenderal Dep. P. dan K.
9. Kepala BP3K Dep. P. dan K.,
10. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
11. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep. P. dan K.,
12. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen, dan BP3K dalam Lingk. Dep. P dan K.,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingk. Dep. P. dan K.,
14. Semua Kepala Kanwil Dep. P. dan K. di Propinsi,
15. Semua Kordinator Perguruan Tinggi Swasta,
16. Semua Gubernur Kepala Daerah Tk. I.,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P. dan K.
18. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen Anggaran Dep. Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara/Kantor Pembantu Perbendaharaan Negara,
23. Badan Pemeriksa Keuangan,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. *Ybs. untuk seperlunya.*

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana
Direktorat Jenderal Kebudayaan,

ttd

Sutarso, SH
NIP. 130186291

LAMPIRAN Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor : 26/A.1/1981
Tanggal : 17 Juli 1981.

**Daftar Susunan Keanggotaan Panitia Pengarah dan Penanggung Jawab
Penyelenggaraan Seminar Kesejahteraan di Jakarta**

PELINDUNG:

1. Prof. Dr. Haryati Soebadio — Sebagai Pelindung;

PANITIA PENGARAH:

1. Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo — Sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Dr. S. Budhisantoso — Sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
3. Drs. Anhar Gonggong — Sebagai Sekretaris;
4. Prof. Dr. Nugroho Notosusanto — Sebagai Anggota;
5. Dr. R.P. Suyono — Sebagai Anggota;
6. Drs. Bastomi Ervan — Sebagai Anggota;
7. Drs. Buchari — Sebagai Anggota;
8. Drs. Uka Tjandrasasmita — Sebagai anggota;
9. Drs. Abdurachman Surjomihar-
djo : Sebagai anggota.
Sutrisno Kutouo — Sebagai Penanggung Jawab Penyelenggara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana
Direktorat Jenderal Kebudayaan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juli 1981
DIREKTUR JENDERAL KEBU-
DAYAAN

ttd.

Sutarso S.H.
NIP. 130186291

ttd

Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130119123

Lampiran II

DAFTAR PESERTA SEMINAR SEJARAH NASIONAL III.

I. PANITIA PENGARAH

1. Prof. Dr. Haryati Soebadio — Pelindung
2. Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo — Ketua/Anggota
3. Dr. S. Budhisantoso — Wakil Ketua/anggota
4. Drs. Anhar Gonggong — Sekretaris
5. Prof. Dr. Nugroho Notosusanto — Anggota
6. Dr. R.P. Suyono — Anggota
7. Drs. Bastomi Ervan — Anggota
8. Drs. Buchari — Anggota
9. Drs. Uka Tjandrasasmita — Anggota
10. Drs. Abdurrahman Suryomihardjo — Anggota

II. PANELIS

1. Dr. S. Budhisantoso
2. Dr. Taufik Abdullah
3. Dr. Kuntowijoyo
4. Dr. Edi Ekadjati
5. Drs. Amir Ruchiatmo
6. Prof. Dr. Mattulada
7. Dr. Nico Kana
8. Drs. Mudardjito
9. Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar
10. Dr. Steve Jawanao
11. Dr. T. Ibrahim Alfian
12. Dr. Onghokham
13. Dr. Yang Aisyah
14. Prof. Dr. Nugroho Notosusanto
15. Dra. Mona Lohanda
16. Dra. Sumartini
17. Prof. Dr. Sulastin Sutrisno
18. Dr. Sri Wulan Rudjiati
19. Dr. Ayat Rochaedy
20. Drs. F.X. Sutjipto
21. Dr. Nico L. Kalangie

III. Seksi-Seksi:

Seksi Pra Sejarah

1. Dr. R.P. Suyono — Ketua
2. Drs. Goenadi Nitihaminoto — Anggota/pembawa naskah
3. Drs. Hary Truman Simanjuntak : Anggota/pembawa naskah
4. Drs. D. Suryanto — Anggota/pembawa naskah
5. Drs. Haris Sukendar — Anggota/pembawa naskah
6. D.D. Bintarti — Anggota/pembawa naskah
7. Dr. R.P. Suyono — Anggota/pembawa naskah
8. Drs. Santoso Soegondo — Anggota/pembawa naskah
9. R. Budi Santosa Azis — Anggota/pembawa naskah

10. Ny. Nios A. Subagus — Anggota/pembawa naskah
11. J. Ratna Indraningsih Panggabean : Anggota/pembawa naskah
12. Drs. I Made Sutaba — Anggota/pembawa naskah
13. Drs. Nyoman Purusa Mahaviranata — Anggota/pembawa naskah
14. Dra. Ayu Kusumawati — Anggota/pembawa naskah
15. Dra. Sumiati Atmosudiro

Seksi Sejarah Kuno

16. Drs. Buchari — Ketua
17. Drs. I Gde Semado Astra — Anggota/pembawa naskah
18. Drs. M.M. Sukarto K. Atmodjo — Anggota/pembawa naskah
19. Dra. Ricadiana Kartakusumah — Anggota/pembawa naskah
20. Drs. Bambang Budi Utomo — Anggota/pembawa naskah
21. Dra. Sri Soejatmi Satari — Anggota/pembawa naskah
22. Drs. Moh. Umar — Anggota/pembawa naskah
23. Drs. Yanto Ditjosuwondo — Anggota/pembawa naskah
24. Drs. Nur Abbas — Anggota/pembawa naskah
25. Edhie Wuryantoro — Anggota/pembawa naskah
26. D.S. Setya Wardhani — Anggota/pembawa naskah
27. Drs. Buchari — Anggota/pembawa naskah
28. Drs. Rusyai Padmawidjaja — Anggota/pembawa naskah

Seksi Sejarah Pasca Kuno

29. Drs. Uka Tjandrasasmita — Ketua
30. Drs. P.J. Suwarno, SH — Anggota/pembawa naskah
31. Ahmad Adaby Dahlan — Anggota/pembawa naskah
32. Sagimun M.D — Anggota/pembawa naskah
33. Tawalinuddin Haris — Anggota/pembawa naskah
34. H. Abdullah Tayib, BA — Anggota/pembawa naskah
35. Drs. H. Ramli Nawawi — Anggota/pembawa naskah
36. Drs. Fendy E.W. Parengkuan — Anggota/pembawa naskah
37. Drs. Aminuddin Kasdi — Anggota/pembawa naskah
38. Drs. A.A. Gde Putra Agung — Anggota/pembawa naskah
39. Dra. Marledily Asmuni — Anggota/pembawa naskah
40. M. Th. Naniek Harkantining-sih — Anggota/pembawa naskah
41. Drs. Moch. Hudan — Anggota/pembawa naskah
42. Drs. Ma'mun Abdullah — Anggota/pembawa naskah
43. Drs. E. Kosim — Anggota/pembawa naskah
44. Drs. Sauki Hadiwardoyo — Anggota/pembawa naskah
45. Drs. Daud Limbu Gau — Anggota/pembawa naskah
46. Drs. G. Moedjahto, MA — Anggota/pembawa naskah

Seksi Sejarah Penjajahan Kolonial

47. Drs. Djoko Sukiman /Dr. T. Ibrahim Alfian — Ketua
48. Drs. Suhartono — Anggota/pembawa naskah

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 49. Firdaus Burhan | — Anggota/pembawa naskah |
| 50. Drs. Nasief Chatib | — Anggota/pembawa naskah |
| 51. Drs. Imam Hilman | — Anggota/pembawa naskah |
| 52. Ida Bagus Sideman | — Anggota/pembawa naskah |
| 53. Drs. H. Siahaan | — Anggota/pembawa naskah |
| 54. Drs. A.A. Bagus Wirawan | — Anggota/pembawa naskah |
| 55. Drs. Suwardi, MS | — Anggota/pembawa naskah |
| 56. Dra. Tiurma L. Tobing | — Anggota/pembawa naskah |
| 57. Drs. Hollius Syamsuddin, MA | — Anggota/pembawa naskah |
| 58. Drs. R.Z. Leirissa | — Anggota/pembawa naskah |
| 59. Dra. Julianti Parani | — Anggota/pembawa naskah |
| 60. Drs. Didi Suryadi | — Anggota/pembawa naskah |
| 61. Drs. M. Idwar Saleh | — Anggota/pembawa naskah |
| 62. Drs. Rosad Amidjaja | — Anggota/pembawa naskah |
| 63. A.M. Djuliati Suroyo | — Anggota/pembawa naskah |
| 64. Moh. Noor ARS | — Anggota/pembawa naskah |
| 65. Drs. Djoko Utomo | — Anggota/pembawa naskah |

Seksi Sejarah Pergerakan Nasional

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 66. Drs. Abdurrahman Suryo mihardjo | — Ketua |
| 67. Tengku Lukman Sinar, SH | — Anggota/pembawa naskah |
| 68. Dra. Soekesi Soemoatmodjo | — Anggota/pembawa naskah |
| 69. Wardiningsih Soerjohardjo | — Anggota/pembawa naskah |
| 70. Drs. Rusdi Sufi | — Anggota/pembawa naskah |
| 71. Drs. Mardanas Safwan | — Anggota/pembawa naskah |
| 72. Drs. Yusmar Basri | — Anggota/pembawa naskah |
| 73. Dra. Irna Hanny Hadisuwito | — Anggota/pembawa naskah |

Seksi Sejarah Mutakhir

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 74. Prof. Dr. Nugroho Notosusanto | — Ketua |
| 75. H.A.M. Effendy, SH | — Anggota/pembawa naskah |
| 76. Drs. Gazali Usman | — Anggota/pembawa naskah |
| 77. I Gde Putu Gunawan | — Anggota/pembawa naskah |
| 78. Drs. Süranto Sütanto | — Anggota/pembawa naskah |
| 79. J.R. Chaniago, Drs | — Anggota/pembawa naskah |
| 80. Drs. Adikusilo S.J. | — Anggota/pembawa naskah |
| 81. Ariwiadi | — Anggota/pembawa naskah |
| 82. Tri Wahyuning Mahrus Irsyam, SS | — Anggota/pembawa naskah |
| 83. Husain Haikal | — Anggota/pembawa naskah |
| 84. Drs. Sütopo Sütanto | — Anggota/pembawa naskah |
| 85. Tanu Suherly | — Anggota/pembawa naskah |
| 86. J. Yogaswara | — Anggota/pembawa naskah |
| 87. Drs. Anhar Gonggong | — Anggota/pembawa naskah |
| 88. Susanto Zuhdi | — Anggota/pembawa naskah |
| 89. Amrin Imran | — Anggota/pembawa naskah |
| 90. Saleh A. Djamhari | — Anggota/pembawa naskah |
| 91. Masfar R. Hakim | — Anggota/pembawa naskah |
| 92. M. Idwar Saleh | — Anggota/pembawa naskah |
| 93. Moela Marboen | — Anggota/pembawa naskah |

PENGANTAR

Seminar Sejarah Nasional III dengan tujuan memasyarakatkan kesadaran bersejarah melalui diselenggarakan penelitian, penulisan, dan publikasi sejarah secara baik telah diselenggarakan pada tanggal 10 sampai dengan 13 November 1981 di Jakarta.

Seminar telah membahas 17 makalah dalam sidang-sidang panel dan 86 dalam sidang-sidang seksi, dengan perincian sebagai berikut:

A. SIDANG PANEL

Sidang-sidang panel telah membahas:

1. *Etnohistori* dengan 4 makalah yang terdiri dari:
 - a. "Etnohistori Sebagai Pendekatan Sejarah di Indonesia", oleh Dr. S. Budhisantoso.
 - b. "Studi Kasus Komuniti Sebagai Pendukung Penulisan Sejarah Nasional" oleh Dr. N.S. Kalangie
 - c. "Pengkajian Teks Lisan Sebagai Sumber Sejarah" oleh Dr. Stephanus Djawanai.
 - d. "Etnoarkeologi: Peranannya dalam Pengembangan Arkeologi Indonesia", oleh Drs. Mundardjito.

Kesimpulan: Mengingat keanekaragaman masyarakat dan kebudayaan Indonesia dan jangkauan masa sejarah yang sangat luas, sementara itu tradisi tulis menulis dan sumber sejarah masih sangat terbatas, maka dirasa perlu untuk mengembangkan konsep-konsep, metodologi dan cara pengumpulan data yang mampu menggali dan memanfaatkan berbagai sumber sejarah yang tidak tertulis baik yang berupa teks lisan maupun lain-lain.

Atas dasar kenyataan tersebut, maka pendekatan etnohistori perlu diselenggarakan secara terarah, khususnya dalam mengungkapkan sejarah kelompok etnis sebagai bagian dari masyarakat-masyarakat bangsa.

Sedang etnoarkeologi dirasa perlu dalam usaha memahami sejarah asal-usul, perkembangan, persebaran dan pembauran kebudayaan bangsa di masa lampau sebagaimana bercermin dalam kebudayaan materiil.

2. *Historiografi Tradisional* dengan 5 makalah yang terdiri dari:
 - a. "Struktur Politik dan Historiografi Tradisional" oleh Drs. F.A. Sutjipto.
 - b. "Kebudayaan Setempat dan Historiografi Tradisional" oleh Dr. Sri Wulan Rudjiati Mulyadi.
 - c. "Sastra dan Historiografi Tradisional" oleh Prof. Dr. Sulastin Sutrisno.
 - d. "Tokoh dan Historiografi Tradisional: Studi Kasus Tokoh Dipati Ukur" oleh Dr. Edi S. Ekajati.
 - e. "Peranan Benda Purbakala dalam Historiografi Tradisional" oleh Dr. Ayatrohaedi.

Kesimpulan: *Historiografi Tradisional* sebagai satu jenis penulisan sejarah yang disusun secara tradisional, berbeda dengan *historiografi modern*, karena ia berlandaskan pada pengertian dan pandangan penulis tentang sejarah dan kebudayaannya. Oleh karena itu pengkajian tulisan

sejarah tradisional amat penting artinya bagi penulisan sejarah nasional, khususnya dalam mengungkapkan nilai-nilai budaya, gagasan utama dan keyakinan yang melatarbelakangi peristiwa-peristiwa sejarah.

3. *Sejarah Lokal* meliputi 3 makalah, yaitu:
 - a. "Di sekitar Sejarah Lokal di Indonesia" oleh Dr. Taufik Abdullah.
 - b. "Sebelah catatan Tentang Bagaimana Lokalnya Sejarah Lokal" oleh Dr. Ibrahim Alfian.
 - c. "Sejarah Lokal" oleh Dr. Onghokham.

Kesimpulan: Penulisan sejarah lokal sangat penting artinya dalam menyusun sejarah nasional mengingat perkembangan masyarakat yang beragama sebelum dan sesudah terbentuknya negara kesatuan Indonesia. Kerajaan-kerajaan besar maupun kecil yang pernah berkembang dan banyaknya masyarakat kesukuan serta perkauman yang mengalami sejarah di lokalitas masing-masing, memerlukan pendekatan penulisan sejarah yang lebih banyak memperhatikan keadaan setempat dengan dinamikanya masing-masing.

4. *Sejarah Lisan* meliputi 3 makalah yang terdiri dari:
 - a. "Wawancara Simultan: Suatu Experimen Dalam Sejarah Lisan" Oleh Prof. Dr. Nugroho Notokusanto.
 - b. "Sumber Sejarah Lisan Dalam Penulisan Sejarah Kontemporer Indonesia" oleh Dra. Mona Lohanda.
 - c. "Kegunaan Sejarah Lisan Dalam Penulisan Sejarah Nasional" oleh Dr. Kuntowijoyo.

Kesimpulan: Kelangkaan sumber dokumenter mendorong sejarawan untuk mencari sumber lisan. Untuk penulisan sejarah mutakhir terutama sejarah revolusi, pengumpulan sumber lisan sudah sangat mendesak untuk dilakukan, karena semakin jauh jarak waktu yang semakin surut usia serta daya ingat para pelaku sejarah, akan semakin sukarlah pengaliannya. Dikhawatirkan bahwa sumber sejarah lisan itu akan punah sebelum berhasil direkam.

B. SIDANG SEKSI

Sidang-sidang seksi telah membahas:

1. *Prasejarah* yang meliputi 14 makalah (lihat lampiran daftar makalah).
 2. *Sejarah Kuno*: meliputi 12 makalah (lihat lampiran daftar makalah)
 3. *Sejarah Abad XVI — XVIII* meliputi 15 makalah (lihat lampiran daftar makalah).
 4. *Sejarah Abad XIX — Masa Perlawanan Terhadap Penjajah*, meliputi 16 makalah (lihat lampiran daftar makalah).
 5. *Sejarah Awal Abad XX — Perguruan Nasional* meliputi 10 makalah (lihat lampiran daftar makalah).
 6. *Sejarah Mutakhir* meliputi 19 makalah (lihat lampiran daftar makalah).
- C. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sidang-sidang seksi telah menyimpulkan bahwa jarak antara Seminar Sejarah Nasional II dan III terlalu jauh, sehingga tampak adanya kesenjangan mutu antara makalah yang ditulis oleh para peserta Senior dan peserta junior.

Adapun kesimpulan dari masing-masing seksi ialah sebagai berikut:

1. PRASEJARAH:

- a. Beberapa makalah mengungkapkan data baru yang penting untuk melengkapi sejarah manusia dan kebudayaannya. Pada masa prasejarah di Indonesia.
- b. Sebagian makalah membahas keadaan masyarakat masa kini yang masih hidup dengan tradisi prasejarah (etnoarkeologi).
- c. Dari pembahasan ternyata terdapat kesinambungan unsur-unsur kebudayaan prasejarah yang melintasi batas kurun waktu Indonesia Hindu, Indonesia Islam dan berlanjut sampai masa kini.

2. SEJARAH KUNA

- a. Tampak kemajuan dalam penelitian Sejarah Kuna, ternyata dibahasnya temuan-temuan baru, dan munculnya tafsiran-tafsiran baru atas sumber yang telah tersedia.
- b. Munculnya muka-muka baru yang di antaranya baru pertama kali tampil dalam forum nasional, tetapi telah menunjukkan karya ilmiah yang cukup bermutu.
- c. Adanya beberapa makalah yang mutunya agak kurang, yang diajukan oleh peserta dari daerah, yang rupanya amat kekurangan sumber kepustakaan sebagai bahan referensi.
- d. Nampak kurangnya perhatian terhadap penggunaan sumber-sumber naskah kuna, baik yang membahas segi-segi prosesusal, maupun segi struktural Sejarah Kuna Indonesia.
- e. Dari makalah-makalah yang diajukan tampak bahwa para peneliti sejarah kuna dihambat oleh kurang tersedianya hasil-hasil penelitian filologis, khususnya, mengenai naskah-naskah yang berkenaan dengan pemerintahan, hukum, keagamaan, peraturan tentang tingkah laku bagi golongan-golongan masyarakat, dan lain-lain.

3. SEJARAH ABAD XVI — XVIII

- a. Di antara 14 makalah, hanya ada lima yang mengungkapkan data-data baru yang penting bagi memperkaya pengetahuan Sejarah Indonesia, yaitu mengenai masuk dan proses perkembangan Islam di Bima, Lombok, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali.
- b. Masuk dan proses perkembangan Islam di Indonesia menimbulkan perubahan sosial-budaya dan pergeseran kekuasaan. Walaupun demikian tetap terdapat kesinambungan sosial-budaya yang berdiri Indonesia.

4. SEJARAH ABAD XIX/MASA PERLAWANAN TERHADAP PENJAJAH

Minat dan peran-serta dalam penulisan dan pembahasan sejarah abad XIX sangat besar, namun demikian kritisisme historis belum mendapat perhatian yang serius. Di samping itu masalah pendekatan atau kerangka acuan masih belum mendapat tempat dalam sebagian besar makalah.

5. SEJARAH AWAL ABAD XX/PERGERAKAN NASIONAL

Beberapa makalah yang dibahas mengenai sejarah awal abad XX dan Pergerakan Nasional menunjukkan adanya penguasaan metodologis dan kemampuan penulisannya.

6. SEJARAH MUTAKHIR

Nampak besarnya minat masyarakat terhadap sejarah kutakhir, sehingga menuntut kecermatan dan peningkatan kemampuan metodologis dalam penelitian dan penulisan sejarah.

Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas maka diajukan saran-saran

umum sebagai berikut:

- a. Agar Seminar Sejarah Nasional diselenggarakan secara bersinambung sekurang-kurangnya 4 tahun sekali.
 - b. Agar topik yang hendak dibahas ditentukan terlebih dahulu, sehingga masalahnya lebih terpusat dan lebih banyak waktu untuk pembahasan. Selanjutnya saran dari masing-masing saksi ialah sebagai berikut:
1. **PRASEJARAH**
 - a. Untuk menyempurnakan/memantapkan kronologi prasejarah Indonesia, penggunaan metode pertanggalan radiometris sangat diperlukan.
 - b. Untuk menyusun perkerangkaan prasejarah Indonesia berdasarkan pada sosial ekonomi, diperlukan peningkatan penelitian paleo-ekologi yang terpadu.
 - c. Penyebarluasan pola sosial ekonomi dalam perkerangkaan prasejarah Indonesia perlu ditingkatkan pola pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi.
 2. **SEJARAH KUNA**
 - a. Diharapkan kepada pemerintah, cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menyediakan perpustakaan yang memadai bagi Universitas dan Institut yang mempunyai jurusan Sejarah dan Arkeologi, khususnya majalah-majalah ilmiah dalam kedua bidang tersebut. Baik dari dalam maupun dari luar negeri.
 - b. Disarankan agar pemerintah memberi rangsangan bagi para ahli filologi untuk menggarap naskah-naskah kuna sebagai sumber informasi bagi penelitian dan penulisan sejarah dan arkeologi Indonesia.
 3. **SEJARAH ABAD XVI — XVIII**

Peningkatan penelitian sejarah abad XVI — XVIII dirasa perlu untuk dilakukan secara lebih mendalam dengan memperhatikan sumber-sumber informasi dan metodologi yang sesuai, sehingga dapat mengungkapkan sejarah secara objektif.
 4. **SEJARAH ABAD XIX/MASA PERLAWANAN TERHADAP PENJAJAH**
 - a. Dirasa perlu peningkatan penelitian dan penulisan sejarah perlawanan terhadap penjajah dari seluruh daerah di Indonesia, sehingga hasilnya dapat dipetik untuk dijadikan bahan guna menanamkan semangat patriotisme dan cinta tanah air bagi segenap lapisan masyarakat bangsa Indonesia.
 - b. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, diperlukan penyusunan bibliografi yang menyangkut sejarah dan kebudayaan dari setiap daerah yang antara lain memuat daftar makalah yang terdapat dalam majalah-majalah seperti *IMT*, *TNI*, *TBG*, *BKI*, dan lain-lain.
 - c. Hendaknya diusahakan pula bahan-bahan arsip yang penting untuk penulisan sejarah suatu daerah.
 5. **SEJARAH AWAL ABAD XX/PERGERAKAN NASIONAL**

Agar makalah-makalah yang baik segera diterbitkan untuk disebarluaskan kepada masyarakat.
 6. **SEJARAH MUTAKHIR**

Agar makalah-makalah yang baik segera diterbitkan untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

Jakarta, 13 Nopember 1981

Tim Perumus Seminar Sejarah Nasional III

Lampiran IV

DAFTAR MAKALAH SEMINAR SEJARAH NASIONAL III

I. MAKALAH SEKSI PRA SEJARAH:

1. Tradisi Megalitik pada Makam Islam/Asta Tinggi Sumenep, oleh Drs. Goenadi Nitihaminoto.
2. Tradisi Masa Perundagian pada Masyarakat Batak, oleh Drs. Harri Truman Simanjuntak.
3. Watu Kandang Matesih: Arti pentingnya dalam Masa Perundagian, oleh Drs. D. Suryanto.
4. Peninggalan Megalitik khususnya tentang kubur Batu Megalitik Terjan, oleh Drs. Haris Sukendar.
5. Moko sebagai salah satu unsur penting masa perundagian, oleh DRA. D.D. Bintarti.
6. Masalah-masalah kronologi Prasejarah Indonesia, oleh Dr. R.P. Suyono.
7. Awal perdagangan gerabah di Indonesia, oleh Drs. Santoso Soegondo.
8. Tinjauan tentang tradisi kapal perimbas-penetak di Indonesia, oleh Drs. R. Budi Santosa Azis.
9. Tradisi serpih bilah di Indonesia, oleh Dra. Ny. Nies A. Subagus.
10. Situs kubur tempayan di Anyer, Jawa Barat, oleh Drs. J. Ratna Indraningsih.
11. Bentuk-bentuk megalit di Pura Bukit Mentik di desa Buwahan Kintamani, Bangli, oleh Drs. I Made Sutaba.
12. Pola penguburan sarkofagus di desa Tigawasa Buleleng, oleh Drs. Nyoman Purusa Mahaviranata.
13. Peninggalan tradisi masa perundagian di Sumba Timur, oleh Drs. Ayu Kusumawati.
14. Tradisi masyarakat bercocok tanam di Liwolere, Larantuka, Nusa Tenggara Barat, oleh Dra. Sumiati Atmosudiro.

II. MAKALAH SEKSI SEJARAH KUNO

1. Teori tentang asal usul Ratu Çri Sang Ajnadevi, oleh Drs. Gde Made Astra.
2. Betulkah Artasura Retna Bumi Banten seorang raja Bali yang murka dan hina oleh Drs. M.M. Sukarto K. Atmodjo.
3. Rakryan Sanjiwana, oleh Dra. Richadiana Kartakusumah.
4. Timbul dan berlanjutnya pemukiman di daerah Kedu, oleh Drs. Bambang Budi Utomo.
5. Sejarah Batang Kuno dan sekitarnya. Studi wilayah Sejarah Lama, oleh Drs. Moh. Oemar.
6. Mithos Ratu Adil Jawa sebagai usaha motivasi penyatuan kembali Kerajaan Jenggala, oleh Drs. Yanto Dirjosuwondo.
7. Peninggalan Hinduisme di Aceh, oleh Drs. Nur Abbas.
8. Wanua I Tpi Siring, data prasasti jaman Balitung, oleh Drs. Edhi Wurjantoro.
9. Sri Jayawarsa Digiya Sastraprabhu, oleh Dra. D.S. Setya Wardani.
10. Ulah pemungut pajak dalam masyarakat Jawa Kuno (Faudulent tax officials in ancient Javanese Society), oleh Drs. Buchari.
11. Candi Cangkuang dan permasalahannya, oleh Drs. Rusyai Padmawidjaja.
12. Kerajaan Kuantan, oleh Dra. Marlaely Asmuni.

III. MAKALAH SEKSI SEJARAH ARAB KE-16 — 18

1. Sejarah Kauman Yogya. Sebuah Studi perubahan Sosial, oleh Ahmad Adaby Darban.
2. Sombaopu, Bungaya dan beberapa kesalahan dalam penulisan sejarah, oleh Sagimun M.D.
3. Sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Lombok, oleh Tawalinuddin Haris.
4. Sejarah masuk dan berkembangnya agama Islam di Bima, oleh H. Abdullah Tayib, B.A.
5. Perkembangan agama Islam di Kalimantan Selatan sampai akhir abad ke-18, oleh Drs. H. Ramli Mawawi.
6. Pengaruh penyebaran agama Islam terhadap kehidupan sosial politik di daerah Sulawesi Utara, oleh: Drs. Fendy E.W. Parengkuan.
7. Peranan kepurbakalaan Islam untuk memahami kedatangan dan persebaran Islam di Jawa, oleh Drs. Aminuddin Kasdi.
8. Sejarah masuknya Islam di Karangasem Bali, oleh Drs. A.A. Gde Putra Agung.
9. Faham keislaman dan perkembangan politik dalam masa kerajaan Islam di Demak, oleh Drs. Moch Hudan.
10. Caatan singkat tentang Masyarakat kota Banten Lama abad ke-16, oleh Dra. M. Th. Naniek Harkantiningih.
11. Masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah Sumatera Selatan; suatu tinjauan historis, oleh Drs. Ma'mun Abdullah.
12. Pertumbuhan idem kekuasaan Jawa: Studi kasus Kerajaan Matram pada masa pertengahan abad XVIII, oleh Drs. Sauki Hadiwardoyo.
13. Masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, oleh Drs. Daud Limbu Gau.
14. Pergeseran kekuasaan dalam sejarah Mataram, oleh Drs. G. Moedjanto, MA.

IV. MAKALAH SEKSI MASA PERLAWANAN TERHADAP PENJAJAH

1. Bekal dan Gerakan sosial: Kasus Srikaton Surakarta 1888, oleh Drs. Suhartono.
2. Interpretasi positif atas pengaruh Inggeris Bengkulu, oleh Firdaus Burhan.
3. Perlawanan Sutan Mangkurat terhadap Belanda di Mandiling, oleh Drs. Nazief Chatib.
4. Peristiwa pembunuhan Asisten residen Nagel tahun 1845, oleh Drs. Imam Hilman.
5. Perang Kusamba 24 Mei 1949, oleh Ida Bagus Sidemen.
6. Keterlibatan Belanda dalam percaturan politik di Kalimantan Barat pada abad ke-19, oleh Drs. H. Siahaan.
7. Puputan Klungkung 28 April 1958. Perlawanan terhadap penjajah, oleh Drs. A.A. Bagus Wirawan.
8. Perlawanan Raja Haji Marhum Telok Ketapang-Malaka menghadapi Belanda (1782 — 1784), oleh Drs. Suwardi MS.
9. Pengkristenan Tanah Batak pertemuan dua kepentingan (Usaha memper-tahankan Hababatahon dan kolonialisme Belanda) oleh Drs. Tiarma L. Tobing.
10. Perang Ngali dan Perang Sapugara di pulau Sumbawa tahun 1908, oleh Drs. Helius Syamsuddin, M.A.
11. Raja Jailolo (1811 — 1932). Gerakan Nativisme di Maluku, oleh Drs. R.Z.

Leirissa.

12. Tradisi lokal dan penulisan sejarah Buton, Dra. Julianti Parani.
13. Pemberontakan Petani di Tanggerang 1924, Drs. Didi Suryadi
14. Wajib kerja di Karesidenan Kedu pada abad ke-19, oleh A.M. Djulianti Suroyo.
15. Pangeran Panji dari Kerajaan Pasir, oleh Noor Ars.
16. Pemogokan Buruh tani di Yogyakarta tahun 1882, oleh Drs. Djoko Utomo.

V. MAKALAH SEKSI PERGERAKAN NASIONAL

1. Tuhan Sang Nahualu Raja Siantar, oleh Tengku Lukman Sinar S.H.
2. Sekolah Kartini suatu usaha untuk menyebarkan dan meningkatkan kecerdasan wanita pada permulaan abad ke XX, oleh Drs. Sukeksi Soemoatmodjo.
3. Dua Radicale Concentric; Sebuah perbandingan, oleh Wardiningsih Soerjohardjo, SS.
4. Pengaruh Pendidikan Barat terhadap kedudukan ekonomi Uleebalang di Aceh oleh Drs. Rusdi Sufi.
5. Beberapa pengalaman wawancara untuk menulis sejarah perintis kemerdekaan oleh Drs. Mardanan Safwan.
6. Pelaksanaan Sejarah Lisan dalam penelitian sejarah pemberontakan De Zeven Provincien, oleh Drs. Yusmar Basri.
7. Soewardi Soerjaningrat dalam pengasingan, oleh Dra. Irna Hanny Hadi Soewito.
8. Peranan Inlandsche Matine Bond (IMB) dalam pemberontakan di atas kapal De Zeven Provincien, oleh Rochmani Santosa.
9. Mangkunegaran dan Nata Surata, oleh Dra. Darsiti Suratman.
10. Suatu Pendekatan Sejarah Sosial Kota Yogyakarta akhir abad ke-19 awal abad ke-20.

VI. MAKALAH SEKSI SEJARAH MUTAKHIR

1. Kapan lahirnya Pancasila, oleh R.A.M. Effendy, SH
2. Pengaruh persetujuan Linggarjati terhadap perjuangan ABRI Divisi IV, Periode revolusi Fisik 1945 — 1949, oleh Drs. Gazali Usman.
3. Usaha Petani dalam mempertahankan hidup. Kisah pendudukan Jepang di Madiun, oleh Drs. I Gde Putu Gunawan.
4. Pemberontakan PKI Mr. Mohammad Joesoeph tahun 1946 di Cirebon, oleh Drs. Soeranto Soetanto.
5. Wajah dua muka sebuah kekuatan politik. Badan Pekerja KNIP periode Jakarta, oleh Drs. J.R. Chaniago.
6. Pengaruh Rasionalisme terhadap Badan-badan Perjuangan dan TNI (1947 — 1950), oleh Drs. Ariwiadi.
7. Cina Islam di Indonesia (Pengenalan awal terhadap PITI) oleh Tri Wahyuning Mahrus Irsyam, SS.
8. Minoritas Tionghoa dalam sastra Indonesia, oleh Husain Raikal.
9. Pemerintahan Nasional kota Jakarta, oleh Drs. Soetopo Soetanto.
10. Kekuatan Gerilya di daerah Priangan pada waktu Divisi Siliwangi hijrah 1948, oleh Drs. Tanu Suherly.
11. Lahirnya Badan-badan Perjuangan dan BKR di kota Bandung sampai timbulnya MDPP/MPPP, oleh Drs. J. Jogaswara.
12. Qahhar Mudzakkar: Pergumulan dalam siri, Suatu Sisi situasi gerakan

Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Pada 1950 — 1965, oleh Drs. Anhar Gonggong.

13. **Bogor Shu pada masa pendudukan Jepang (1942 — 1945) oleh Sumanto Zuhdi**
14. **Markas Besar Komando Sumatera 1948 — 1949, oleh Drs. Amrin Imran.**
15. **Kekuatan-kekuatan revolusi di Surabaya (1945), oleh Saleh S. Djamhari.**
16. **Operasi lintas laut menembus blokade Belanda (1946 — 1949), oleh Drs. Masfar R. Hakim.**
17. **Sejarah pembentukan UUD '45 dan pengesahannya, oleh Drs. Moela Marbun.**
18. **Sumbangan Prof. Dr. Soepomo terhadap perumusan Dasar Negara dan UUD 1945, oleh Prof. Dr. Nugroho Notokusanto.**
19. **Perkembangan Peranan Ulama Dalam Arena Politik di Aceh Utara, oleh Drs. P.J. Suwarno, SH.**
20. **Rakyat dan Tentara di Bibis 1949, oleh Drs. Adisusilo S.J.**

**Panitia Seminar Sejarah
Nasional III**

Perpustakaan
Jenderal